



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

2023

LAPORAN

KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA BONTANG



PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

JALAN MOEH ROEM, KELURAHAN BONTANG LESTARI, KECAMATAN BONTANG SELATAN,
KOTA BONTANG, KALIMANTAN TIMUR



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Tahun 2023 dapat terselesaikan dan disampaikan tepat waktu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang. Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 69 dan pasal 71, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2019, bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, yang memuat informasi pelaksanaan program yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. LKPJ Tahun 2023 juga merupakan laporan realisasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2021-2026.

Ruang lingkup LKPJ Wali Kota Bontang Tahun 2023 meliputi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdiri atas : capaian pelaksanaan program dan kegiatan beserta permasalahan dan upaya penyelesaiannya, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya, serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

Berdasarkan laporan hasil kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam LKPJ Wali Kota Bontang Tahun 2023, telah banyak target yang tercapai walaupun masih terdapat beberapa capaian yang belum optimal. Harus disadari masih terdapat sejumlah persoalan yang harus dipecahkan, sehingga seluruh target hasil pembahasan DPRD diharapkan menjadi pertimbangan yang penting dalam melakukan sejumlah perbaikan penyelenggaraan pembangunan di Kota Bontang pada tahun-tahun selanjutnya.

Demikian pengantar LKPJ Wali Kota Bontang Tahun 2023, semoga dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban dan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan di Kota Bontang. Semoga Allah SWT



senantiasa memberikan perlindungan bagi kita semua untuk senantiasa menuju Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab.

Bontang, 19 Maret 2024

Walikota Bontang

Basri Rase, S.Ip, M.Si



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	ix
Daftar Diagram	x
Bab I Pendahuluan	Bab I-1
1.1 Dasar Hukum	Bab I-2
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	Bab I-4
1.2.1 Visi	Bab I-4
1.2.2 Misi	Bab I-5
1.3 Data Umum Daerah	Bab I-7
1.3.1 Data Geografis Wilayah	Bab I-7
1.3.2 Jumlah Penduduk	Bab I-15
1.3.3 Pertumbuhan Penduduk	Bab I-19
1.3.4 Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara	Bab I-19
1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	Bab I-25
1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	Bab I-26
1.3.7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	Bab I-26
Bab II Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Bab II-1
2.1 Penjabaran Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bab II-1
2.2 Penjabaran Pengelolaan Belanja Daerah	Bab II-4
Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Bab III-1
3.1 Evaluasi Capaian Tujuan dan Sasaran 2023	Bab III-1
3.2 Urusan Pemerintahan Daerah	Bab III-7
3.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Bab III-9
3.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Bab III-45
3.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan	Bab III-96
3.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Bab III-113
3.2.5 Unsur Penunjang Pemerintahan	Bab III-119
3.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Bab III-132
3.2.7 Unsur Kewilayahan Urusan Pemerintahan	Bab III-134
3.2.8 Unsur Pemerintahan Umum	Bab III-141
3.3 Kebijakan strategis Yang Ditetapkan	Bab III-145
3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	Bab III-146



Bab IV	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan	Bab IV-1
	4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan	Bab IV-1
	4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian	Bab IV-2
Bab V	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga dan Prestasi/Penghargaan	Bab V-1
	5.1 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Bab V-1
	5.2 Penghargaan/Prestasi Kota Bontang Tahun 2022	Bab V-5
Bab VI	Penutup	Bab VI-1



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luasan Penggunaan Lahan Tahun 2019	Bab I-14
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	Bab I-16
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	Bab I-17
Tabel 1.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	Bab I-18
Tabel 1.5	Persebaran dan Perkembangan Jumlah Penduduk Per Kecamatan	Bab I-19
Tabel 1.6	Jumlah Pegawai ASN Kota Bontang	Bab I-19
Tabel 1.7	Jumlah PNS Pada Masing-Masing Perangkat Daerah Kota Bontang Tahun 2023	Bab I-20
Tabel 1.8	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Bontang Tahun 2023	Bab I-22
Tabel 1.9	Jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Pendidikan Kota Bontang Tahun 2023	Bab I-24
Tabel 1.10	Jumlah PNS Berdasarkan golongan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2023	Bab I-24
Tabel 1.11	Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2023	Bab I-25
Tabel 1.12	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	Bab I-26
Tabel 1.13	Realisasi Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2023	Bab I-26
Tabel 1.14	Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Bontang Tahun 2023	Bab I-26
Tabel 2.1	Anggaran Perubahan Pada Pendapatan	Bab II-2
Tabel 2.2	Anggaran Perubahan Pada Belanja 2023	Bab II-5
Tabel 2.3	Rincian Belanja Pada Anggaran Perubahan 2023	Bab II-8
Tabel 3.1	Capaian Tujuan dan Sasaran Kota Bontang 2023	Bab III-1
Tabel 3.2	Pembagian Urusan Pemerintahan	Bab III-8
Tabel 3.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Bab III-11
Tabel 3.4	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Bab III-14
Tabel 3.5	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Bab III-22
Tabel 3.6	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Bab III-28



Tabel 3.7	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Bab III-33
Tabel 3.8	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Bab III-42
Tabel 3.9	Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Tenaga Kerja Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Bab III-46
Tabel 3.10	Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Bab III-49
Tabel 3.11	Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pangan Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Bab III-52
Tabel 3.12	Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pertanahan Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Bab III-56
Tabel 3.13	Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Lingkungan Hidup Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Bab III-58
Tabel 3.14	Urusan Pemerintahan wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Bab III-62
Tabel 3.15	Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Bab III-65
Tabel 3.16	Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Bab III-67
Tabel 3.17	Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perhubungan Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Bab III-70
Tabel 3.18	Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Bab III-72



Tabel 3.19	Urusan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Bab III-75
Tabel 3.20	Urusan Pemerintahan wajib Penanaman Modal Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Bab III-77
Tabel 3.21	Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olah raga Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Bab III-82
Tabel 3.22	Urusan Pemerintahan Wajib bidang statistik Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Bab III-86
Tabel 3.23	Urusan Pemerintahan Wajib bidang persandian Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Bab III-88
Tabel 3.24	Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kebudayaan Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Bab III-90
Tabel 3.25	Urusan Pemerintahan wajib Bidang Perpustakaan Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Bab III-92
Tabel 3.26	Urusan Pemerintahan wajib Bidang Kearsipan Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Bab III-94
Tabel 3.27	Urusan Pemerintahan Pilihan Kelautan dan Perikanan Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan Pilihan	Bab III-96
Tabel 3.28	Urusan Pemerintahan Pilihan Pariwisata Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan Pilihan	Bab III-99
Tabel 3.29	Urusan Pertanian Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan Pilihan	Bab III-102
Tabel 3.30	Urusan Perdagangan Capaian dan Kegiatan Pada Urusan Pemerintahan Pilihan	Bab III-108
Tabel 3.31	Urusan Perindustrian Capaian Program dan Kegiatan Pada Urusan Pemerintahan Pilihan	Bab III-111
Tabel 3.32	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Capaian Program dan Kegiatan Pada Urusan	Bab III-113



Tabel 3.33	Pemerintahan Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Perencanaan Capaian Program dan Kegiatan Pada Urusan Pemerintahan	Bab III-119
Tabel 3.34	Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan Capaian Program dan Kegiatan Pada Urusan Pemerintahan	Bab III-122
Tabel 3.35	Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian Capaian Program dan Kegiatan Pada Urusan Pemerintahan	Bab III-126
Tabel 3.36	Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Capaian Program dan Kegiatan Pada Urusan Pemerintahan	Bab III-128
Tabel 3.37	Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Capaian Program dan Kegiatan Pada Urusan Pemerintahan	Bab III-130
Tabel 3.38	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Capaian Program dan Kegiatan Pada Urusan Pemerintahan	Bab III-132
Tabel 3.39	Unsur Kewilayahan Urusan Pemerintahan Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan	Bab III-134
Tabel 3.40	Unsur Pemerintahan Umum Capaian Program dan Kegiatan Pada Urusan Pemerintahan	Bab III-141
Tabel 3.41	Kebijakan Strategis Tahun 2023	Bab III-145
Tabel 3.42	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Anggaran 2022	Bab III-146
Tabel 5.1	Kerjasama Pemerintah Bontang Tahun 2023	Bab V-1
Tabel 5.2	Bantuan Perusahaan Dalam Bentuk Cooprated Social Responsibility 2022	Bab V-5



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Batas Administrasi Kota Bontang	Bab 1-8
Gambar 1.2	Peta Orientasi Lokasi Kota Bontang	Bab 1-9
Gambar 1.3	Peta Ketinggian Kota Bontang	Bab 1-9
Gambar 1.4	Peta Kelerengan Kota Bontang	Bab 1-10
Gambar 1.5	Peta Geologi Kota Bontang	Bab 1-11
Gambar 1.6	Peta DAS Kota Bontang	Bab 1-13
Gambar 1.7	Peta Penggunaan Lahan Tahun 2019	Bab 1-1



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	Bab 1 - 16
Diagram 1.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur	Bab 1 - 17
Diagram 1.3	Penduduk Berdasarkan Pendidikan	Bab 1 - 18



BAB I

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mangamanahkan Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang terdiri dari hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasaan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini menyajikan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023, sebagai bahan evaluasi dan atau koreksi serta bahan masukan untuk dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023 ini antara lain memuat; a) dasar hukum, visi dan misi kepala daerah dan data umum daerah; b) penjabaran APBD; c) hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; d) capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasaan. Keterangan mengenai realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Bontang Tahun 2023, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)



Tahun 2023 dan APBD Kota Bontang Tahun 2023 baik dalam penyelenggaraan Desentralisasi maupun Tugas Pembantuan, sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sehingga LKPJ dapat dikatakan sebagai instrumen untuk mengukur seberapa besar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun Wali kota sudah dapat di realisasikan setiap tahunnya.

Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.

1.1. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LKPJ Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Lembaran Negara Nomor 4817);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan dAerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bontang;
14. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023;
16. Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
17. Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;



1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

Aspek pembangunan yang menjadi sasaran utama dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 mencakup aspek pembangunan tata kelola pemerintahan, aspek pembangunan ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan, aspek pembangunan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan pada masing-masing aspek pembangunan akan memperbesar harapan terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera.

Berdasarkan perspektif aspek utama pembangunan yang merupakan hasil penelaahan terhadap kerangka kebijakan pembangunan jangka panjang, serta isu pembangunan Kota Bontang, maka dengan tujuan untuk memajukan pembanguna Kota Bontang ke depan, melalui proses penelaahan terhadap visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, dan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263, dinyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah maka selanjutnya ditetapkan visi misi RPJMD periode 2021-2026 sebagai berikut:

1.2.1 Visi

Visi Kota Bontang yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu:

“Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab”

Visi pembangunan tersebut pada esensinya adalah cita-cita bersama untuk mewujudkan Kota Bontang lebih berkemajuan pada seluruh aspek pembangunan yang dilaksanakan, sehingga hasil – hasil pembangunan lebih dapat dirasakan dampak dan manfaatnya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang.

Kota Bontang yang Lebih Hebat merupakan suatu harapan dan cita-cita bahwa Kota Bontang dapat menjadi Kota yang lebih meningkat kualitas tata kelola pemerintahannya, lebih meningkat kualitas penataan sarana dan prasarana kotanya, lebih meningkat perekonomian, kehidupan sosial dan budaya kotanya, lebih berkelanjutan daya dukung lingkungannya, lebih unggul SDM-nya dan lebih sejahtera masyarakatnya. Harmonisasi dari pencapaian seluruh cita-cita pembangunan tersebut pada esensinya merupakan tekad untuk mewujudkan Kota Bontang yang Hebat Pemerintahannya, Hebat Kotanya dan Hebat Masyarakatnya. **Hebat Pemerintahannya** merupakan komitmen Pemerintah Kota Bontang untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Keinginan ini akan diwujudkan melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, peningkatan dan pengembangan berbagai inovasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan



pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor. **Hebat Kotanya** ditujukan untuk mewujudkan Kota Bontang dengan penataan sarana dan prasarana kota yang mantap dan berkelanjutan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan seluruh aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kota Bontang yang hebat akan mendorong peningkatan produktivitas kota dan warganya secara berkelanjutan. **Hebat Masyarakatnya** dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Kota Bontang yang harmoni dengan keberagamannya, masyarakat yang aktif dan peduli terhadap pembangunan kotanya, dan masyarakat dengan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Kota Bontang yang Beradab merupakan perwujudan kota dengan masyarakat yang **Beradab**, yaitu ‘maju tingkat penghidupannya’ pada seluruh aspek kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu mewujudkan Kota Bontang yang Beradab akan sangat berkaitan dengan membangun karakter dan budaya masyarakat yang produktif dan berakhlak mulia sebagai pondasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman sesuai dengan nilai-nilai luhur agama dan Pancasila. HEBAT dan BERADAB dalam visi di atas merupakan akronim dari kata **H**armoni, **b**ERkelanjutan, **B**erdaya **s**Aing, **B**ERsih, **A**Dil, **A**manah dan **B**ertanggung jawab yang merupakan nilai-nilai luhur yang diharapkan dapat memberi warna bagi pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan. Selanjutnya Visi dijabarkan menjadi misi Kota Bontang 2021-2026.

1.2.2 Misi

Dalam kerangka untuk mewujudkan Visi Pembangunan “Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab”, maka agenda pembangunan lima tahun mendatang dirumuskan dalam penetapan tiga Misi Pembangunan Kota Bontang sebagai berikut:

- a. Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan.
- b. Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup.
- c. Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah diarahkan ke dalam Visi Pembangunan Daerah, maka dalam rangka pelaksanaannya misi pembangunan sebagai arahan strategik pencapaian visi, harus dapat dipersepsikan secara tepat untuk mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami setiap butir misi pembangunan tersebut. Oleh karena itu, maka penjabaran masing-masing Misi dijelaskan sebagai berikut:



Misi 1 : Kota Bontang yang HARMONI Melalui Pemantapan Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha Dalam Pembangunan.

Arahan strategik dari agenda pembangunan yang menjadi fokus utama misi pembangunan ini adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang diharapkan menjadi **“lebih hebat dan beradab”**. Agenda pembangunan ini harus dapat memastikan kelangsungan pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan filosofisnya yakni ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu upaya yang progresif melalui pembangunan tata kelola pemerintahan yang **harmoni**. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan harus mampu secara harmonis, selaras dan serasi mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha untuk memperkuat sinergi menyatukan potensi dan peran pembangunan serta mempromosikan kolaborasi atau kerjasama agar penyelenggaraan pemerintahan semakin efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam lingkup internal pemerintahan, harmoni dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan elemen penting untuk menyinergikan dan mengharmonisasikan potensi dan peran pemerintahan daerah selaku eksekutif, legislatif dan bersama instansi vertikal sehingga sasaran dan target kinerja pembangunan daerah dapat dicapai secara lebih efektif, efisien dan akuntabel. Semangat dan tekad untuk membangun harmoni dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan pondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan dan peluang pembangunan ke depan dalam rangka melaksanakan amanah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yakni Pemerintahan yang Bersih, Adil, Amanah dan Bertanggung jawab sebagai bagian dari indikator terwujudnya Kota Bontang yang Hebat Pemerintahannya.

Misi 2: Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup.

Arahan strategik dari agenda Misi pembangunan ini adalah bahwa dalam rangka pencapaian Visi, fokus pembangunan juga perlu diarahkan pada upaya untuk wujudnya Kota Bontang yang berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan Kota Bontang yang lebih hebat ke depan dilaksanakan dalam koridor keseimbangan dan keselarasan antara pentingnya mendorong kemajuan dan pertumbuhan kota dengan tetap menjaga keberlanjutan daya dukung lingkungan.

Untuk menuju pada perwujudan Kota Bontang yang Lebih Hebat, agenda pembangunan diarahkan melalui pemantapan pembangunan ekonomi yang merata, pemantapan potensi sosial dan budaya masyarakat



yang produktif, pembangunan infrastruktur yang semakin mantap dan pemantapan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Melalui pemantapan bidang-bidang utama pembangunan tersebut diharapkan Kota Bontang yang berkelanjutan, layak huni, cerdas, dan berwawasan lingkungan dapat diwujudkan.

Misi 3: Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Arahan strategik agenda Misi pembangunan ini dalam mendukung pencapaian Visi adalah dengan mengarahkan fokus pembangunan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih berdaya saing dan unggul. Keberhasilan membangun SDM berdaya saing dan unggul akan menjadi akselerator bagi Kota Bontang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam rangka mewujudkan Kota Bontang yang Berdaya Saing dan Sejahtera, peningkatan kualitas SDM sebagai fokus utama pembangunan akan diintervensi melalui bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ketahanan pangan, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang perlindungan perempuan dan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pariwisata, bidang ketenagakerjaan, bidang perlindungan dan kesejahteraan sosial. SDM yang berdaya saing dan unggul akan dapat diwujudkan dengan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, SDM tenaga kerja mendapatkan akses pembinaan dan pelatihan yang tepat sehingga kompetensi tenaga kerja meningkat dan mendapatkan pekerjaan yang layak, serta masyarakat yang rentan dan kurang mampu mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. Implementasi kebijakan dan program yang tepat pada masing-masing bidang intervensi tersebut akan menjadi sarana utama untuk mewujudkan Kota Bontang yang **Hebat Masyarakatnya**.

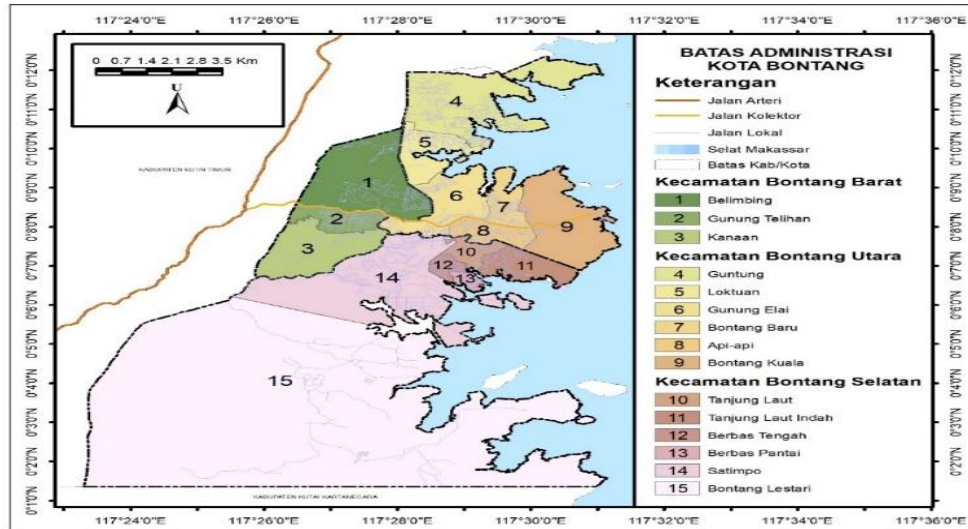
1.3 Data Umum Daerah

1.3.1 Data Geografis Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Bontang merupakan kota dengan luas wilayah paling kecil di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah darat ± 16.188 ha, adapun batas wilayah Kota Bontang meliputi:

- Sebelah utara : Kabupaten Kutai Timur
- Sebelah timur : Selat Makassar
- Sebelah selatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
- Sebelah barat : Kabupaten Kutai Timur



Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 – 2039

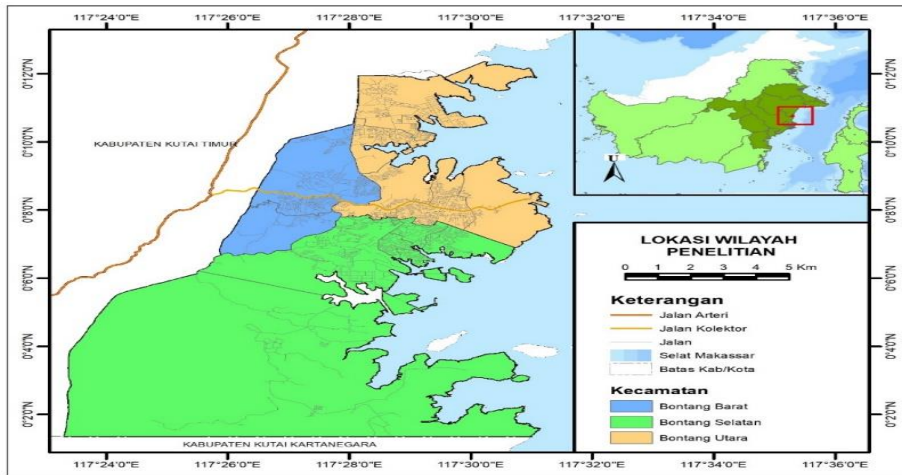
Gambar 1.1 Peta Batas Administrasi Kota Bontang

Pada awalnya Kota Bontang merupakan kota administratif sebagai bagian dari Kabupaten Kutai dan menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang No. 47 Tahun 1999 tentang pemekaran Provinsi dan Kabupaten, bersama-sama dengan Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sejak disahkannya Peraturan Daerah Kota Bontang No. 17 tahun 2002 Kota Bontang terbagi menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara, dan Kecamatan Bontang Barat, yang meliputi 15 (lima belas) kelurahan dan 499 Rukun Tetangga (RT).

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Bontang secara geografis terletak diantara 0°01' Lintang Utara - 0°12' Lintang Utara dan 117°23' Bujur Timur - 117°38' Bujur Timur. Kota Bontang berada pada lokasi yang strategis, dilewati jalan poros trans-kalimantan dan berbatasan langsung dengan Selat Makassar yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. PT. Badak NGL dan PT. Pupuk Kalimantan Timur dibangun di Kota Bontang karena faktor lokasi tersebut dan menjadi salah satu faktor perdorong utama pertumbuhan dan perkembangan Kota Bontang.

Kota Bontang juga memiliki beberapa pulau-pulau kecil, seperti Pulau Beras Basah yang menjadi salah satu objek daya tarik wisata, Pulau Gusung yang terdapat permukiman di atasnya, pulau mangrove yang tersebar dari utara hingga selatan, juga terdapat permukiman di atas laut seperti Melahing dan Tihi-Tihi.



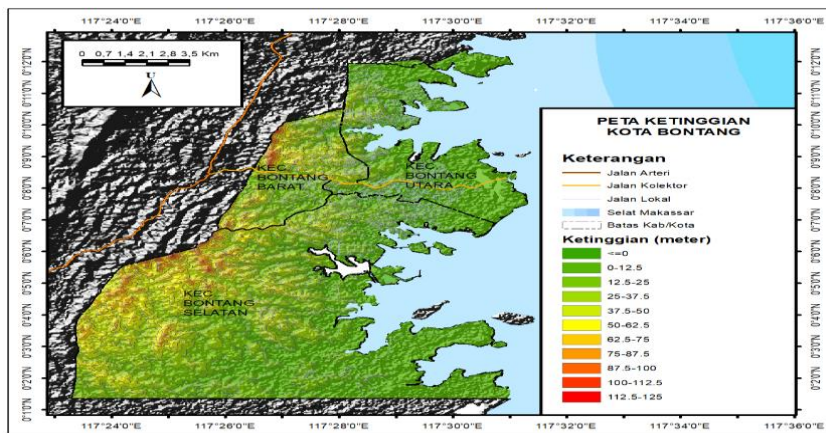
Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 - 2039

Gambar 1.2 Peta Orientasi Lokasi Kota Bontang

c. Topologi

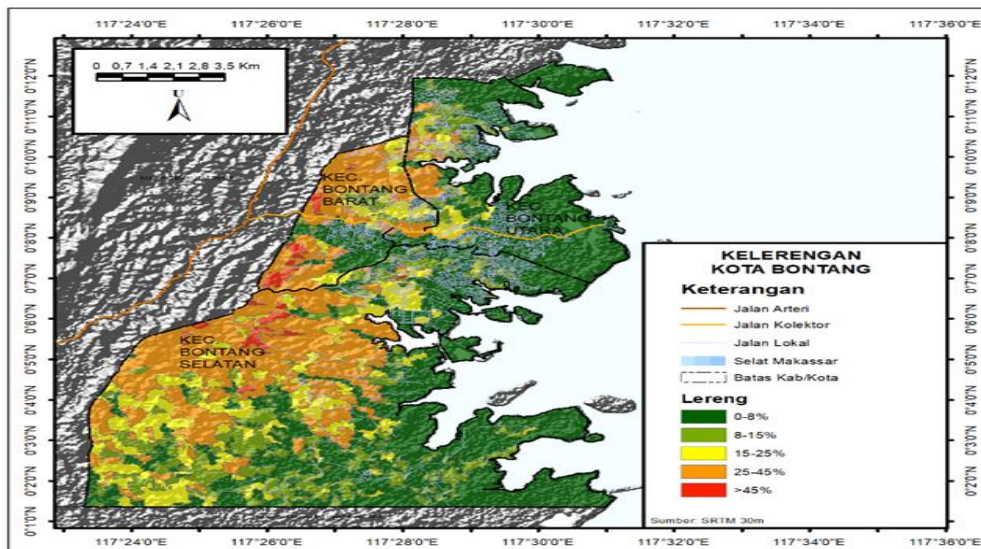
Secara topografis Kota Bontang didominasi oleh permukaan tanah yang datar, landai dan sedikit berbukit dengan ketinggian antara 0 – 125 m di atas permukaan laut. Mayoritas wilayah (64%) menempati kawasan pinggir pantai yang relatif datar, sehingga relief Kota Bontang terlihat mendatar khususnya di wilayah pantai dan bergerak membukit dan bergelombang dari bagian selatan ke barat. Sebaran ketinggian dan kelerenghan dapat dilihat pada Gambar 2.3 dan Gambar 2.4.

Daerah barat merupakan daerah tertinggi, berbukit dan perlahan melandai ke arah timur yang merupakan daerah pesisir. Kawasan perbukitan di daerah barat ini pula yang memiliki kelerenghan relatif curam dibanding daerah timur. Karena itu daerah barat memang memiliki keterbatasan dan idealnya menjadi kawasan yang perlu dijaga dan dihijaukan karena menjadi penyangga bagi wilayah perkotaan.



Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 – 2039

Gambar 1. 3 Peta Ketinggian Kota Bontang



Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 – 2039

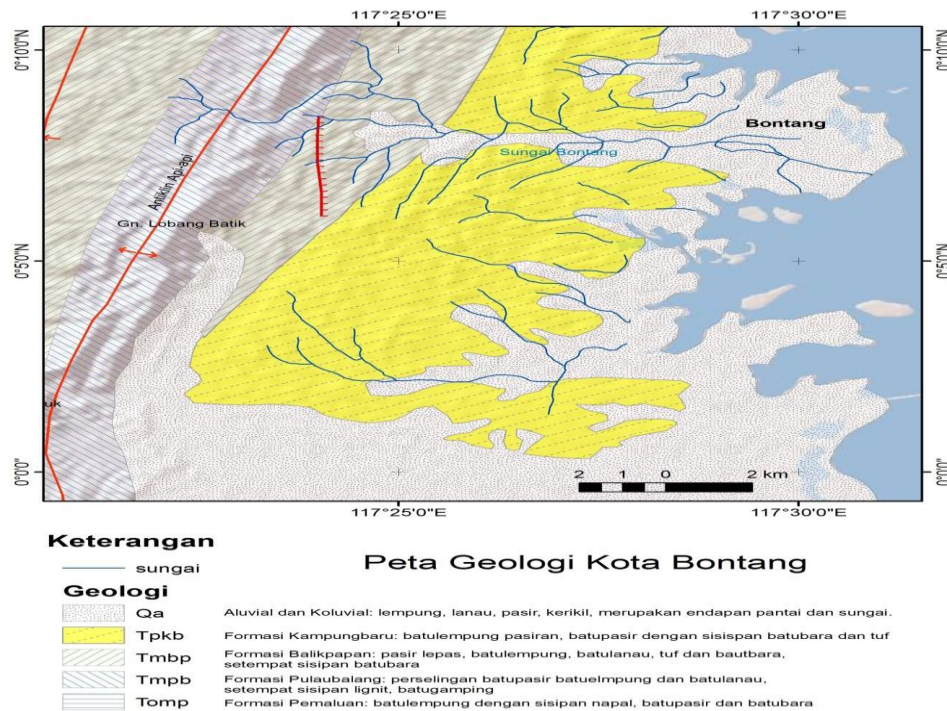
Gambar 1.4 Peta Kelerengan Kota Bontang

d. Struktur Geologi

Ditinjau dari aspek geologi, Kota Bontang termasuk dalam sub bagian cekungan kutai dengan batas fisik di sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan Sungai Santan, sebelah perbukitan sebelah timur Gunung Lobang Batik dan sebelah utara Sungai Temputuk. Dari aspek litologi, formasi batuan di Kota Bontang terdiri dari enam formasi batuan, yaitu:

- 1) Endapan Alluvium, yang tersusun oleh kerakal, kerikil, lempung dan lumpur sebagai endapan sungai, rawa, pantai dan delta.
- 2) Formasi Kampungbaru, yang tersusun atas batu pasir kuarsa dengan sisipan lempung, lanau dan serpih dengan sifat lunak dan mudah hancur. Formasi ini memiliki aquifer potensial di daerah Bontang dengan jenis batuan yang bertindak sebagai akuifer berupa kerikil, pasir kuarsa yang bersifat lepas, batu pasir dan pasir lempung. Formasi ini menindih selaras dan setempat tidak selaras terhadap Formasi Balikpapan.
- 3) Formasi Balikpapan, yang terdiri atas perselingan batu pasir kuarsa, batu lempung lanauan dan serpih dengan sisipan napal, batu gamping dan batubara. Formasi Balikpapan merupakan formasi terbesar di Kawasan Pesisir Bontang dengan arah utara-selatan.
- 4) Formasi Pulaubalang. Merupakan perselingan batu pasir kuarsa, batu pasir dan batu lempung dengan sisipan batubara.
- 5) Formasi Bebulu. Merupakan formasi batuan terkecil di Kawasan Pesisir Bontang yang tersusun atas batu gamping dengan sisipan lempung lanauan dan sedikit napal.

- 6) Formasi Pamaluan. Tersusun atas batu lempung dan serpih dengan sedikit napal, batu pasir dan batu gamping.
- 7) Jenis tanah didominasi oleh podsolik merah kuning, aluvial dan kompleks latosol. Jenis tanah ini memiliki lapisan kuning (top soil) yang tipis, peka erosi dan miskin unsur hara. Untuk pemanfaatan lahan pertanian dan perkebunan dibutuhkan pengolahan awal berupa perbaikan tanah (soil stabilization) dan pengamanan hutan, sehingga kestabilan tanah dan persediaan air tanah tetap terjaga.



Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 – 2039

Gambar 1. 5 Peta Geologi Kota Bontang

e. Kondisi Klimatologi

Proses pergantian panas dan uap air antara bumi dan atmosfer dalam jangka waktu yang lama menghasilkan suatu keadaan yang dinamakan iklim. Iklim merupakan suatu kumpulan dari kondisi atmosfer yang meliputi panas, kelembaban dan gerakan udara.

Kota Bontang berada di wilayah khatulistiwa yang memiliki iklim tropis, sehingga mengalami dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan serta dipengaruhi oleh angin muson, yaitu muson barat pada bulan November-April dan angin Muson Timur pada bulan Mei-Oktober.

Suhu udara rata-rata tertinggi di Kota Bontang sebesar 27,52°C pada bulan Februari dan terendahnya 24,36°C pada bulan November. Kelembaban udara tertinggi 100% pada bulan Juni, terendahnya 63,75% pada bulan September.



Terdapat empat stasiun pengamatan cuaca di Bontang, yaitu Stasiun Pengamatan Bontang Lestari, Tanjung Laut, Gunung Elai, dan Gunung Telihan. Intensitas curah hujan rata-rata tertinggi tercatat pada stasiun pengamatan Gunung Telihan sebesar 166,39 mm³ dengan rata-rata 11 hari hujan per bulan. Sedangkan rata-rata terendah curah hujan di Bontang tercatat pada stasiun pengamatan Bontang Lestari sebesar 119,19 mm³ dengan rata-rata 14 hari hujan perbulan.

f. Hidrologi

Secara hidrologi, wilayah Kota Bontang terdiri atas 3 daerah aliran sungai (DAS), yaitu:

1. DAS Guntung

Luas DAS Guntung kurang lebih 1.195,23 ha. Terletak di wilayah utara Kota Bontang yang meliputi 3 (tiga) kelurahan, yakni Kelurahan Guntung, sebagian Kelurahan Loktuan, dan sebagian Kelurahan Belimbing. Terdapat 2 (dua) aliran sungai yaitu Sungai Guntung dan Sungai Kanibungan. Sungai Guntung memiliki panjang kurang lebih 4 km, sedangkan Sungai Kanibungan memiliki panjang kurang lebih 2 km. Lebar kedua sungai tersebut antara 2-10 meter dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter. Ketinggian air pada saat surut terendah adalah ± 1 meter, sedangkan ketinggian air pada saat pasang tertinggi adalah ± 3,5 meter.

2. DAS Bontang

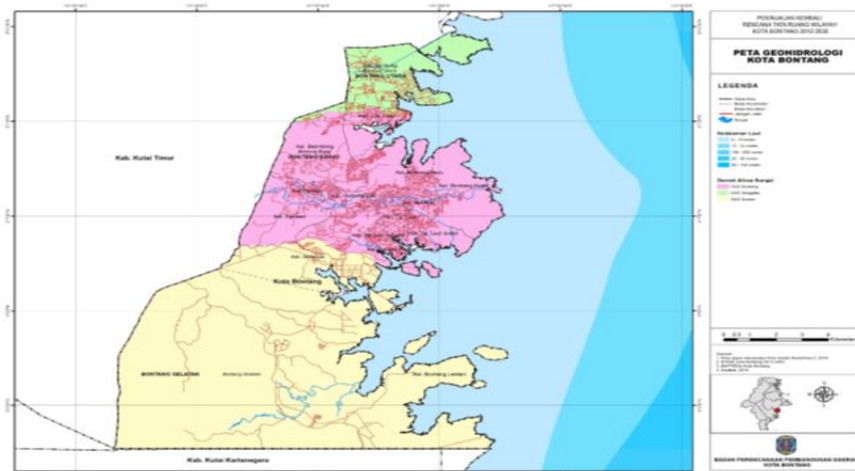
Luas DAS Bontang kurang lebih 4.914 ha. Terletak di wilayah tengah Kota Bontang yang mencakup 13 (tiga belas) kelurahan, yakni sebagian Kelurahan Belimbing, Sebagian Kelurahan Loktuan, Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Bontang Baru, Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Api-Api, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Berebas Tengah, Kelurahan Berbas Pantai, sebagian Kelurahan Satimpo, Kelurahan Kanaan, dan Kelurahan Gunung Telihan. Terdapat aliran Sungai Bontang yang membentang sepanjang kurang lebih 18 km dan lebar antara 4-10 meter dengan kedalaman rata-rata 1-2,5 meter. Ketinggian air pada saat surut terendah adalah 1 meter, sedangkan ketinggian air pada saat pasang tertinggi adalah 3,5 meter.

3. DAS Nyerakat

Luas DAS Nyerakat kurang lebih 9.845,98 km². Terletak di wilayah selatan Kota Bontang yang meliputi 2 (dua) kelurahan, yaitu sebagian Kelurahan Satimpo dan Kelurahan Bontang Lestari. Terdapat Sungai Nyerakat dengan panjang aliran kurang lebih 17 km dan lebar sungai antara 3-10 meter dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter.

Ketiga DAS tersebut merupakan bagian dari Sub DAS Santan Ilir yang semuanya bermuara di Selat Makassar. Sungai-sungai tersebut juga mengalirkan air yang berasal dari mata air, terutama air yang keluar dari

batuan pasir halus, pasir kasar dan lempung pasiran yang berasal dari formasi Balikpapan.



Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 - 2039

Gambar 1. 6 Peta DAS Kota Bontang

Ditinjau dari aspek geohidrologi, cekungan air tanah Kota Bontang termasuk dalam sub bagian cekungan Kutai dengan batas fisik di sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan Sungai Santan, sebelah barat Gunung Lobang Batik dan sebelah utara Sungai Temputuk.

Bagian barat Bontang ke arah perbukitan Gunung Lobang Batik merupakan daerah utama untuk peresapan air tanah tertekan. Air hujan di daerah ini meresap pada batuan formasi Kampung Baru yang didominasi oleh pasir, dibagian paling barat berbatasan dengan formasi Balikpapan, yang terletak memanjang dari utara ke selatan sejajar dengan penyebaran batuan formasi Balikpapan yang menempati sayap antiklin bagian timur, untuk itu perlu untuk menjaga daerah tersebut demi keberlanjutan air tanah dalam yang menjadi air baku utama dan satu-satunya di Kota Bontang.

Secara umum aliran air tanah mengikuti kemiringan lapisan batuan dengan keadaan kemiringan yang lebih tua dari formasi Kampungbaru serta kemiringannya yang lebih terjal (dapat mencapai 40° makin dekat ke arah sumbu antiklin) tidak dapat memberikan imbuan kepada batuan Formasi Kampung Baru, karena di samping mengalir air pada bidang sendiri juga ada bidang pemisah yaitu *unconfirmity* (ketidakselarasan). Bidang kontak tersebut dapat dijumpai sekitar jalur pemipaan PT. Pupuk Kaltim. Maka sebagai batas bawah (lantai dasar) cekungan potensial Bontang adalah dialasi oleh formasi batuan Balikpapan.



g. Penggunaan Lahan

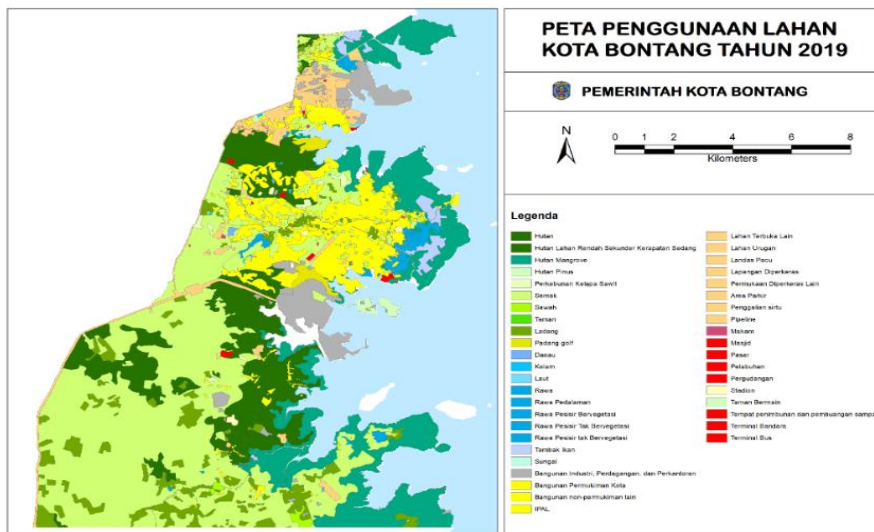
Penggunaan lahan dan tutupan lahan di Kota Bontang pada tahun 2019 secara umum didominasi oleh lima jenis penggunaan, dengan urutan dari yang terluas adalah penggunaan lahan semak, hutan mangrove, hutan lahan rendah, bangunan permukiman kota, serta bangunan industri, perdagangan dan perkantoran. Penggunaan lahan di Kota Bontang didominasi oleh kawasan non terbangun yang mencapai sekitar 82 persen. Hal tersebut menunjukkan potensi Bontang untuk berkembang masih sangat tinggi tentunya dengan memperhatikan keberadaan kawasan kehutanan.

Tabel 1.1 Luasan penggunaan lahan tahun 2019

No	LAND COVER 2019	LUAS (HA)	Persentase
1	Area Parkir	1,11	0,01
2	Bangunan Industri, Perdagangan, dan Perkantoran	735,24	4,63
3	Bangunan non-permukiman lain	2,98	0,02
4	Bangunan Permukiman Kota	1.787,79	11,27
5	Danau	9,40	0,06
6	Hutan	27,96	0,18
7	Hutan Lahan Rendah Sekunder Kerapatan Sedang	2.331,81	14,70
8	Hutan Mangrove	2.622,44	16,53
9	Hutan Pinus	62,81	0,40
10	IPAL	0,03	0,00
11	Kolam	9,41	0,06
12	Ladang	957,31	6,03
13	Lahan Terbuka Lain	112,30	0,71
14	Lahan Urugan	254,46	1,60
15	Landas Pacu	36,50	0,23
16	Lapangan Diperkeras	1,13	0,01
17	Laut	10,25	0,06
18	Makam	6,18	0,04
19	Masjid	3,97	0,03
20	Padang golf	111,55	0,70
21	Pasar	1,26	0,01
22	Pelabuhan	3,76	0,02
23	Penggalian sirtu	26,39	0,17
24	Pergudangan	11,49	0,07
25	Perkebunan Kelapa Sawit	51,07	0,32
26	Permukaan Diperkeras Lain	32,07	0,20
27	Pipeline	167,75	1,06
28	Rawa	54,09	0,34
29	Rawa Pedalaman	4,19	0,03
30	Rawa Pesisir Bervegetasi	50,34	0,32
31	Rawa Pesisir Tak Bervegetasi	120,38	0,76
32	Sawah	40,40	0,25
33	Semak	5.932,92	37,39

No	LAND COVER 2019	LUAS (HA)	Persentase
34	Stadion	27,68	0,17
35	Sungai	47,62	0,30
36	Taman	2,45	0,02
37	Taman Bermain	6,96	0,04
38	Tambak Ikan	184,00	1,16
39	Tempat penimbunan dan pembuangan sampah	13,04	0,08
40	Terminal Bandara	4,42	0,03
41	Terminal Bus	0,80	0,01
	TOTAL	15.867,71	100,00

Sumber : Bapelitbang Kota Bontang, Hasil analisis tahun 2021



Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 - 2039

Gambar 1. 7 Peta Penggunaan lahan tahun 2019

1.3.2 Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Kota Bontang pada tahun 2023 berdasarkan hasil pencatatan di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang di 3 (tiga) wilayah kecamatan. Komposisi berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia dan kelompok dindidikan diuraikan sebagai berikut:

a. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

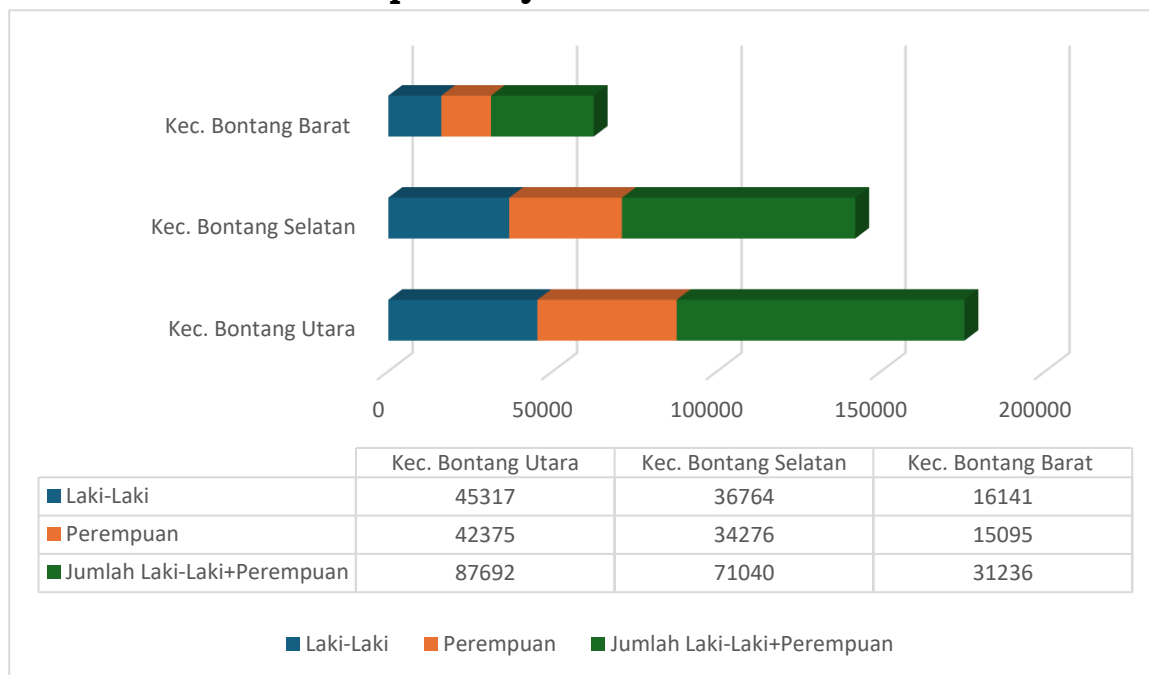
Komposisi penduduk Kota Bontang pada tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin meliputi 92.746 jiwa atau 48,29% penduduk perempuan dan 98.222 jiwa atau 51,70% penduduk laki-laki dari jumlah penduduk 189.968 jiwa. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan persebaran tiap kecamatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bontang Utara yaitu 87.692 jiwa. sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Bontang Barat yaitu 31.236 jiwa. komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin per wilayah disajikan gambar berikut.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan jenis kelamin

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
Bontang Utara	45.317	42.375	87.692
Bontang Selatan	36.764	34.276	71.040
Bontang Barat	16.141	15.095	31.236
Jumlah	98.222	91.746	189.968

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Diagram 1.1 Jumlah Penduduk Kota Bontang berdasarkan jenis kelamin per wilayah tahun 2023



b. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia

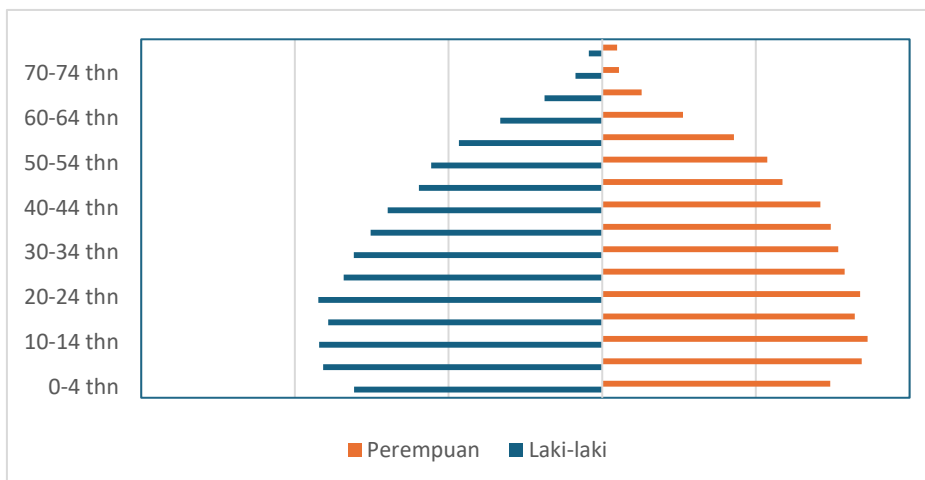
Komposisi penduduk Kota Bontang pada tahun 2023 berdasarkan kelompok usia didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu kelompok usia 15 sampai dengan 65 tahun memiliki jumlah terbesar yaitu 133.609 jiwa atau 70,33 persen, sedangkan kelompok penduduk usia kurang dari 15 tahun adalah sebanyak 50.852 jiwa atau 26,77 persen dan kelompok usia 65 tahun sebanyak 5.507 jiwa atau 2.89 persen. Bagan piramida penduduk berdasarkan kelompok usia sebagaimana gambar di bawah, menggambarkan bentuk piramida penduduk dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bontang pertumbuhan penduduknya kecil disebabkan angka kelahiran dan kematian hampir mendekati seimbang.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia

Kelompok Usia	Laki-laki	Perempuan	laki-laki dan Perempuan
>75 thn	438	484	922
70-74 thn	875	546	1421
65-69 thn	1881	1283	3164
60-64 thn	3314	2624	5938
55-59 thn	4660	4285	8945
50-54 thn	5570	5371	10941
45-49 thn	5962	5866	11828
40-44 thn	6979	7094	14073
35-39 thn	7533	7432	14965
30-34 thn	8083	7681	15764
25-29 thn	8410	7883	16293
20-24 thn	9238	8394	17632
15-19 thn	8917	8213	17130
10-14 thn	9213	8630	17843
5-9 thn	9077	8445	17522
0-4 thn	8072	7415	15487

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Diagram 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

c. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok pendidikan

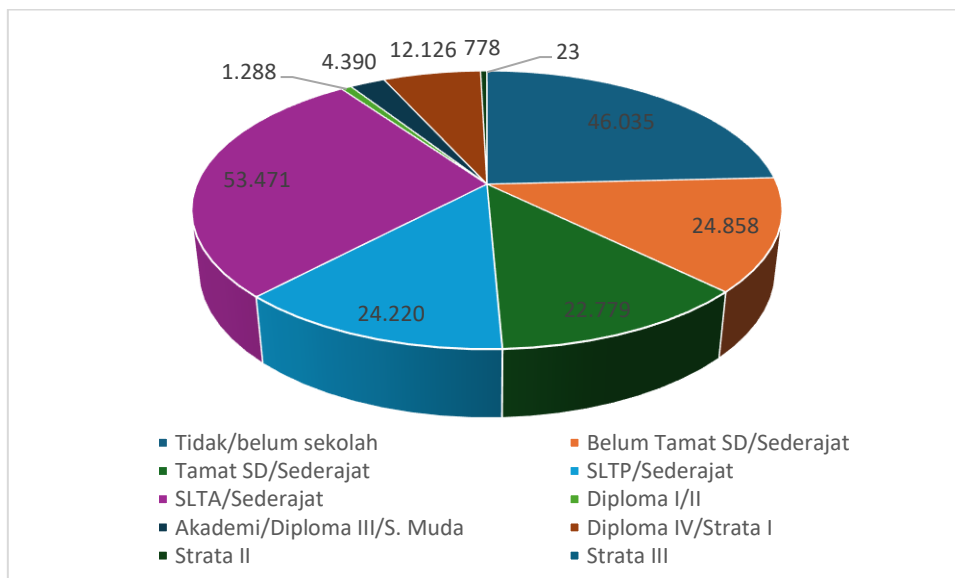
Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan untuk kategori tingkat pendidikan tinggi (diploma dan sarjana), tertinggi didominasi tingkat pendidikan Diploma IV/Sarjan S1 sebanyak 11.016 jiwa. Sedangkan untuk tingkat pendidikan menengah dan dasar, didominasi oleh tingkat pendidikan SMA/ sederajat sebanyak 51.745 jiwa, tidak/belum sekolah sebanyak 52.323 jiwa dan tamat SD/ sederajat sebanyak 21.565 jiwa. komposisi penduduk berdasarkan kelompok pendidikan ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut:

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk berdasarkan pendidikan

Pendidikan	Jumlah
Tidak/belum sekolah	46.035
Belum Tamat SD/Sederajat	24.858
Tamat SD/Sederajat	22.779
SLTP/Sederajat	24.220
SLTA/Sederajat	53.471
Diploma I/II	1.288
Akademi/Diploma III/S. Muda	4.390
Diploma IV/Strata I	12.126
Strata II	778
Strata III	23

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Diagram 1.3 Penduduk berdasarkan pendidikan



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023



1.3.3 Pertumbuhan Penduduk

Jumlah pertambahan penduduk Kota Bontang pada tahun 2017-2023 relatif stabil, akan tetapi pada tahun 2017, dengan diberlakukannya KTP elektronik jumlah penduduk Kota Bontang yang tercatat dan diakui mengalami penyesuaian. Pergerakan jumlah penduduk ini selain karena faktor pertumbuhan penduduk alami (kelahiran dan kematian), mutasi penduduk (pindah masuk dan pindah keluar) juga karena adanya proses pemutakhiran data kependudukan yang terpusat dalam Satu Data Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 2017 telah dilakukan pendataan penduduk dengan proses verifikasi data penduduk pada Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK). Secara detail gambaran persebaran dan perkembangan jumlah penduduk perkecamatan pada tahun 2017-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5 Persebaran dan Perkembangan Jumlah Penduduk Perkecamatan

KECAMATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kecamatan Bontang Utara	79.064	81.169	82.626	84.210	84.956	85.919	87.692
Kecamatan Bontang Selatan	68.033	68.436	69.063	70.297	70.210	69.967	71.040
Kecamatan Bontang Barat	29.418	29.803	29.929	30.277	30.227	30.251	31.236
JUMLAH	176.515	179.408	181.618	100.574	115.183	186.137	189.968

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

1.3.4 Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang untuk jumlah data Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.6 Jumlah Pegawai ASN Kota Bontang

Tahun	Jumlah Pegawai ASN
2020	2.853 Orang
2021	2.777 Orang
2022	2.847 Orang
2023	2.761 Orang

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2023

a. Jumlah PNS dan PPPK pada Perangkat Daerah

Jumlah PNS Pemerintah Kota Bontang pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel. 1.7 Jumlah PNS pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Kota Bontang Tahun 2023

No	Unit Kerja	Jabatan						Total
		Struktural		Fungsional		Fungsional Umum		
		L	P	L	P	L	P	
1	Sekretariat Daerah	14	2	18	16	38	26	114
2	Inspektorat Daerah	4	2	13	23	6	6	54
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4	1	4	-	24	3	36
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4	2	9	8	8	12	43
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4	1	4	1	8	3	21
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	-	-	-	11	1	17
7	Badan Pendapatan Daerah	9	3	-	-	19	11	42
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7	5	4	1	6	22	45
9	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	5	2	7	7	11	3	35
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	3	5	5	11	15	43
11	Dinas Kesehatan	3	3	6	13	9	30	64
	UPT Laboratorium Kesehatan	1	-	1	8	1	1	12
	UPT Puskesmas Bontang Barat	-	-	7	23	-	5	35
	UPT Puskesmas Bontang Lestari	-	-	7	20	2	1	30
	UPT Puskesmas Bontang Selatan I	-	-	6	29	1	5	41
	UPT Puskesmas Bontang Selatan II	-	-	3	33	-	4	40
	UPT Puskesmas Bontang Utara I	-	-	7	33	-	3	43
	UPT Puskesmas Bontang Utara II	-	-	3	33	1	1	38
12	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	4	3	12	10	12	11	52
	UPT Balai Benih Ikan	2	-	-	-	-	-	2
	UPT Rumah Potong Hewan	2	-	-	-	2	-	4
	UPT Tempat Pelelangan Ikan	2	-	-	-	1	-	3
13	Dinas Tenaga Kerja	5	2	7	5	12	10	41
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	2	4	7	7	2	29
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	5	2	7	5	12	10	41
	UPT Pasar	2	-	-	-	-	1	3
16	Dinas Lingkungan Hidup	6	2	5	10	6	12	41
	UPT Laboratorium Lingkungan	2	-	-	-	-	1	3
	UPT Tempat Pemrosesan Akhir	2	-	-	-	2	-	4
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	8	-	12	5	33	20	78
	UPT Air Limbah Domestik	1	1	-	-	-	1	3
18	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9	1	-	-	25	7	42



No	Unit Kerja	Jabatan						Total
		Struktural		Fungsional		Fungsional Umum		
		L	P	L	P	L	P	
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	2	5	3	6	4	10	30
	UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	-	1	-	-	1	1	3
20	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	3	3	3	3	18	9	39
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	1	6	9	7	12	37
22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	4	18	18	25	9	82
	SDN 001 Bontang Barat	-	-	2	10	1	1	14
1	SDN 001 Bontang Selatan	-	-	2	14	1	2	19
1	SDN 001 Bontang Utara	-	-	3	13	-	1	17
-	SDN 002 Bontang Barat	-	-	2	4	2	1	9
2	SDN 002 Bontang Selatan	-	-	1	17	-	-	18
-	SDN 002 Bontang Utara	-	-	3	11	-	2	16
-	SDN 003 Bontang Barat	-	-	5	7	1	1	14
1	SDN 003 Bontang Selatan	-	-	2	11	-	-	13
-	SDN 003 Bontang Utara	-	-	6	13	-	-	19
-	SDN 004 Bontang Barat	-	-	4	16	1	1	22
1	SDN 004 Bontang Selatan	-	-	3	9	1	1	14
1	SDN 004 Bontang Utara	-	-	2	7	-	2	11
-	SDN 005 Bontang Selatan	-	-	1	7	1	1	11
1	SDN 005 Bontang Utara	-	-	3	14	-	1	16
-	SDN 006 Bontang Selatan	-	-	4	9	-	1	13
-	SDN 006 Bontang Utara	-	-	4	6	1	1	12
1	SDN 007 Bontang Selatan	-	-	6	4	-	1	9
-	SDN 007 Bontang Utara	-	-	4	12	-	1	19
-	SDN 008 Bontang Utara	-	-	6	13	-	1	19
-	SDN 009 Bontang Selatan	-	-	4	11	-	1	15
-	SDN 009 Bontang Utara	-	-	3	14	-	1	16
-	SDN 010 Bontang Selatan	-	-	1	9	1	1	13
1	SDN 010 Bontang Utara	-	-	2	10	-	-	14
-	SDN 011 Bontang Selatan	-	-	2	3	-	-	5
-	SDN 011 Bontang Utara	-	-	2	9	-	2	13
-	SDN 012 Bontang Selatan	-	-	2	10	-	-	12
-	SDN 013 Bontang Selatan	-	-	3	-	1	1	4
1	SDN 014 Bontang Selatan	-	-	2	1	-	-	3
-	SDN 015 Bontang Selatan	-	-	2	1	-	-	3
-	SDN 016 Bontang Selatan	-	-	2	-	-	-	1
-	SMPN 1	-	-	8	20	1	-	29
1	SMPN 2	-	-	7	22	1	2	32
1	SMPN 3	-	-	7	23	-	1	31
-	SMPN 4	-	-	8	23	-	1	31
-	SMPN 5	-	-	4	22	2	1	29
2	SMPN 6	-	-	5	4	1	-	10
1	SMPN 7	-	-	2	15	-	2	19
-	SMPN 8	-	-	7	10	-	-	17
-	SMPN 9	-	-	4	10	-	-	17
-	TK Negeri 1 Bontang	-	-	-	10	-	-	10
-	TK Negeri 2 Bontang	-	-	-	2	-	1	3
-	TK Negeri 3 Bontang	-	-	-	3	-	-	3



No	Unit Kerja	Jabatan						Total
		Struktural		Fungsional		Fungsional Umum		
		L	P	L	P	L	P	
-	TK Negeri Bontang Utara	-	-	-	1	-	-	1
-	Dinas Perhubungan	8	2	1	-	23	7	41
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	4	4	10	4	10	32
25	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7	-	4	2	16	9	38
	UPT Rumah Susun Sederhana Sewa	1	1	-	-	1	-	3
26	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2	6	7	6	4	8	33
27	Kecamatan Bontang Barat	5	4	-	1	10	5	25
	Kelurahan Belimbing	2	3	-	-	3	2	10
	Kelurahan Kanaan	2	3	-	-	4	4	13
	Kelurahan Gunung Telihan	3	2	-	-	5	3	13
28	Kecamatan Bontang Selatan	6	3	-	1	8	1	14
	Kelurahan Berbas Pantai	3	1	-	-	2	5	11
	Kelurahan Berebas Tengah	4	1	-	-	5	3	13
	Kelurahan Bontang Lestari	5	-	-	-	8	1	14
	Kelurahan Satimpo	3	2	-	-	7	2	14
	Kelurahan Tanjung Laut	3	1	-	-	5	4	13
	Kelurahan Tanjung Laut Indah	2	3	-	-	8	3	16
29	Kecamatan Bontang Utara	3	5	-	-	11	12	31
	Kelurahan Bontang Baru	4	1	-	-	6	5	15
	Kelurahan Bontang Kuala	2	1	-	-	12	6	22
	Kelurahan Guntung	2	2	-	-	5	2	11
	Kelurahan Gunung Elai	2	3	-	-	6	2	13
	Kelurahan Loktuan	1	3	-	-	4	5	13
	Kelurahan Api-Api	5	-	-	-	3	6	14
30	RSUD Taman Husada	5	4	78	244	24	27	382
31	Satuan Polisi Pamong Praja	9	1	19	2	5	2	38
	Total	226	106	423	1030	531	445	2761

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2023

Jumlah PNS terbanyak terdapat pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan sebesar 741 orang, karena didominasi oleh tenaga pendidik (guru) sedangkan paling sedikit yaitu pada perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan jumlah 17 orang. Sedangkan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemerintah Kota Bontang Sebanyak 646 orang.

Tabel. 1.8 Jumlah Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Kota Bontang Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24
3	Badan Pendapatan Daerah	1
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	2



NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
5	Dinas Kepdnudukan dan Pencatatan Sipil	1
6	Dinas Kesehatan	70
7	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	31
8	Dinas KetenagaKerjaan	4
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	21
10	Dinas Koperasi, usaha kecil, menengah dan perdagangan	10
11	Dinas Lingkungan Hidup	9
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	11
13	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	81
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	2
15	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	243
18	Dinas Perhubungan	6
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3
20	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	1
21	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	11
22	Kecamatan Bontang Barat	1
23	Kecamatan Bontang Selatan	6
24	RSUD Taman Husada	88
25	Satuan Polisi Pamong Praja	2
26	Sekretariat Daerah	7
27	Sekretariat DPRD	3
TOTAL		646

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2023

b. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah PNS Pemerintah kota Bontang menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel. 1.9 Jumlah Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Kota Bontang Tahun 2023

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	SD	14	2	16
2	SMP	31	2	33
3	SMA	306	157	463
4	D - I	5	2	7
5	D - II	4	16	20
6	D - III	164	422	586
7	D - IV	21	21	42
8	S - 1	490	834	1324
9	S - 2	145	125	270
TOTAL		1180	1581	2761

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2023

Jenjang pendidikan Sarjana (S1) dan D IV merupakan tingkat pendidikan yang mendominasi PNS. Lulusan diploma menjad tingkat pendidikan kedua tertinggi, disusul SMA dan Strata dua. Hal ini dipengaruhi juga dengan adanya penerimaan CPNS dari lulusan Strata 1 dan Diploma.

c. Jumlah PNS berdasarkan golongan

Jumlah PNS Pemerintah Kota Bontang menurut golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1.10 Jumlah PNS berdasarkan golongan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2023

NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	I	18	0	18
2	II	254	195	449
3	III	733	1179	1912
4	IV	175	207	382
TOTAL		1180	1581	2761

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2023

Golongan III merupakan golongan dominan dari PNS yaitu sebesar 1912 orang, sedangkan golongan yang paling sedikit ada pada golongan I sebesar 18 orang. Besarnya golongan III ini memiliki kaitan dengan tingkat pendidikan strata 1 yang merupakan tingkat pendidikan terbanyak yang dimiliki oleh PNS.



d. Jumlah PNS berdasarkan Jabatan

Jumlah PNS Pemerintah Kota Bontang menurut jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1.11 Jumlah PNS berdasarkan Jabatan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2023

NO	JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Struktural	226	106	332
2	Fungsional	423	1030	1453
3	Fungsional Umum	531	445	976
TOTAL		1180	1581	2761

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2023

Jabatan fungsional merupakan mayoritas jabatan PNS pada Pemerintahan Kota Bontang sebesar 1453 PNS, kemudian fungsional umum sebesar 976 PNS, sedangkan untuk jumlah struktural sebanyak 332.

1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan daerah Kota Bontang tahun 2023, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2023, Pendapatan Daerah Bersumber Dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Dan Lain-Lain Pendapatan Daeah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi dengan daerah maka PAD sebagai salah satu sumber daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Sedangkan pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik.

Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp2.448.306.492.422,68 atau 113,30 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.160.860.136.071,00,-. Secara keseluruhan rincian realisasi target pendapatan pada tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 1.12 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

NO	URAIAN	TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	208.097.914.195,00	262.783.368.861,61	126,28
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.886.935.481.305,00	2.116.330.370.652,00	111,10
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	65.826.740.571,00	69.192.752.909,07	105,11
JUMLAH		2.160.860.136.071,00	2.448.306.492.422,68	113,30

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah, 2023

1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi belanja daerah Kota Bontang Tahun 2023 sebesar Rp2.214.499.891.671,32 atau 87,45 persen dari target sebesar Rp2.532.272.667.551,00, secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.13 Realisasi Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2023

No	Uraian	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
1	BELANJA OPERASI	1.810.638.123.607,00	1.534.566.799.008,18	85,75
2	BELANJA MODAL	692.437.791.129,00	656.938.935.372,00	94,87
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	29.196.752.815,00	1.532.071.856,00	5,25
JUMLAH		2.532.272.667.551,00	2.214.499.891.671,32	87,45

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

1.3.7 Realisasi Pembiayaan menurut jenis pembiayaan

Pada tahun 2023 pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp25.000.000.000,00, sedangkan penerimaan pembiayaan yang seluruhnya bersumber dari SiLPA tahun 2023 sebesar Rp381.627.410.623,70 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.14 Realisasi pembiayaan daerah Kota Bontang

No	Uraian	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Penerimaan Pembiayaan	396.412.531.480,00	396.412.531.480,00	100
2	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100
JUMLAH		371.412.531.480,00	371.412.531.480,480,00	100

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023



BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah harus dikelola secara bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan APBD tahun 2023 mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2023 kami jabarkan sebagai berikut:

2.1 Penjabaran pengelolaan pendapatan daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan secara bruto tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Dalam menganggarkan rencana pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan disusun secara nasional dengan mempertimbangkan kekayaan daerah yang disertakan serta memperhatikan fungsi penyertaan modal. Dalam hal ini pemerintah daerah selalu mengupayakan pendayagunaan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Dari apa yang telah ditetapkan pada APBD tahun 2023. Dibeberapa sumber penerimaan pendapatan daerah terjadi penambahan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) yaitu berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.



Penganggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan akan ditekankan pada pengoptimalan pencapaian target yang sudah ditetapkan sebelumnya yang dituangkan dalam APBD tahun 2023.

Kebijakan umum dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah kota Bontang mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Meningkatkan target pendapatan bersumber dari pajak dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan pemungutan PBB dan penagihan pajak daerah lainnya.
- d. Mengupayakan pelayanan pajak dan retribusi berbasis teknologi dan pelayanan prima untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi.
- e. Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- f. Meningkatkan kemandirian daerah Kota Bontang dengan meningkatkan proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah.

Sejalan dengan kebijakan di atas, kebijakan Pendapatan Daerah sebagaimana tertuang Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 2.1 Anggaran Perubahan pada Pendapatan

No	Uraian	Anggaran 2023 APBD Murni	Anggaran 2023 Perubahan APBD	BERTAMBAH / BERKURANG
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
3	Pendapatan Pajak Daerah	130,000,000,000.00	106,779,690,000.00	(23,220,310,000.00)
4	Pendapatan Retribusi Daerah	4,146,678,500.00	2,768,551,925.00	(1,378,126,575.00)
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,205,520,097.00	3,591,431,779.00	(614,088,318.00)
6	Lain-lain PAD yang Sah	77,369,774,460.00	94,958,240,491.00	17,588,466,031.00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	215,721,973,057.00	208,097,914,195.00	(7,624,058,862.00)



No	Uraian	Anggaran 2023 APBD Murni	Anggaran 2023 Perubahan APBD	BERTAMBAH / BERKURANG
1	2	3	4	5
8	PENDAPATAN TRANSFER			
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN			
10	Dana Bagi Hasil Pajak	116,838,013,500.00	145,982,334,954.00	29,144,321,454.00
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	817,035,903,900.00	1,136,547,821,331.00	319,511,917,431.00
12	Dana Alokasi Umum	240,568,341,000.00	240,568,341,000.00	-
13	Dana Alokasi Khusus	-	83,856,866,000.00	83,856,866,000.00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1,174,442,258,400.00	1,606,955,363,285.00	432,513,104,885.00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA			
16	Dana Otonomi Khusus	-	-	-
17	Dana Penyesuaian	10,778,299,000.00	10,778,299,000.00	-
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	10,778,299,000.00	10,778,299,000.00	-
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	217,992,066,020.00	269,201,819,020.00	51,209,753,000.00
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	217,992,066,020.00	269,201,819,020.00	51,209,753,000.00
23	Total Pendapatan Transfer	1,403,212,623,420.00	1,886,935,481,305.00	483,722,857,885.00
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
25	Pendapatan Hibah	67,473,651,168.00	69.192.752.909,07	(1,646,910,597.00)
26	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-
27	Pendapatan Lainnya	-	-	-
28	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	67,473,651,168.00	69.192.752.909,07	(1,646,910,597.00)
29	JUMLAH PENDAPATAN	1,686,408,247,645.00	2,160,860,136,071.00	474,451,888,426.00

Pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan Daerah semula Rp1.686.408.247.645,00 menjadi sebesar Rp2.160.860.136.071,00 sehingga selisihnya menjadi Rp474.451.888.426,00 meliputi:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah semula Rp215.721.973.057,00 menjadi sebesar Rp208.097.914.195,00 sehingga setelah selisihnya diperubahan menjadi minus Rp7.624.058.862,00 meliputi:



- 1) Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Asli Daerah semula Rp130.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp106.779.690.000,00 sehingga selisih diperubahan menjadi minus Rp23.220.310.000,00.
 - 2) Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah semula sebesar Rp4.146.678.500,00 menjadi sebesar Rp2.768.551.925,00 sehingga selisih diperubahan menjadi minus Rp1.378.126.575,00.
 - 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula sebesar Rp4.205.520.097,00 menjadi sebesar Rp3.591.431.779,00 sehingga selisih diperubahan menjadi minus Rp614.088.318,00.
 - 4) Lain-lain PAD yang Sah
Lain-lain PAD yang Sah semula sebesar Rp77.369.774.460,00 menjadi sebesar Rp94.958.240,491,00 sehingga selisih diperubahan menjadi Rp17.588.466.031,00.
- b. Pendapatan Transfer
- Pendapatan Transfer semula sebesar Rp1.403.212.623.420,00 menjadi sebesar Rp1.886.935.481.305,00 sehingga selisih diperubahan sebesar Rp483.722.857.885,00.
- 1) Pendapatan Transfer Dana Perimbangan
Pendapatan Transfer Dana Perimbangan semula sebesar Rp1.174.442.258.400,00 menjadi sebesar Rp1.606.955.363.285,00 sehingga selisih diperubahan sebesar Rp.432.513.104.885,00.
 - 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya sebesar Rp10.778.299.000,00, tidak ada perubahan nilai pada anggaran perubahan
 - 3) Transfer Pemerintah Provinsi
Transfer Pemerintah Provinsi semula sebesar Rp217.992.066.020,00 menjadi sebesar Rp269.201.819.020,00 sehingga selisih diperubahan sebesar Rp51.209.753.000,00.
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah yang semula sebesar Rp67.473.651.168,00 menjadi sebesar Rp65.826.740.571,00 atau selisih diperubahan minus Rp1.646.910.597,00.

2.2 Penjabaran pengelolaan Belanja daerah

Berdasarkan pasal 158 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, disebutkan bahwa kapasitas riil keuangan daerah dibagi ke dalam 3 (tiga) prioritas, yaitu:



1. Prioritas pertama, dialokasikan untuk membiayai belanja wajib langsung dan mengikat serta pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar;
2. Prioritas kedua, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah; dan
3. Prioritas ketiga, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Dengan adanya peningkatan target pendapat daerah dalam perubahan RKPD tahun 2023, maka dalam perspektif belanja daerah memberikan ruang untuk peningkatan akomodasi terhadap kebutuhan belanja pembangunan yang sebelumnya belum dapat diakomodir dalam APBD murni tahun 2023, termasuk dalam rangka belanja daerah untuk meningkatkan kinerja program-program prioritas dalam upaya percepatan pencapaian target RPJMD pada tahun 2023, didalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan kebijakan perubahan alokasi belanja daerah yang secara rinci dijabarkan dalam tabel berikut di bawah ini:

Tabel 2.2 Belanja pada Anggaran Perubahan Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran 2023 APBD Murni	Anggaran 2023 Perubahan APBD	BERTAMBAH / BERKURANG
1	2	3	4	5
1	BELANJA			
2	BELANJA OPERASI			
3	Belanja Pegawai	674,440,613,606.00	718,560,112,835.00	44,119,499,229.00
4	Belanja Barang dan Jasa	620,483,999,951.00	962,762,650,715.00	342,278,650,764.00
5	Belanja Bunga	-	-	-
6	Belanja Subsidi	-	-	-
7	Belanja Hibah	51,639,258,747.00	127,635,760,057.00	75,996,501,310.00
8	Belanja Bantuan Sosial	1,680,000,000.00	1,679,600,000.00	(400,000.00)
9	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
10	Jumlah Belanja Operasi	1,348,243,872,304.00	1,810,638,123,607.00	462,394,251,303.00
11	BELANJA MODAL			
12	Belanja Tanah	-	1,520,000,000.00	1,520,000,000.00
13	Belanja Peralatan dan Mesin	59,991,172,496.00	255,449,581,197.00	195,458,408,701.00
15	Belanja Gedung dan Bangunan	102,755,790,659.00	126,433,809,595.00	23,678,018,936.00
16	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	205,825,568,171.00	304,012,237,330.00	98,186,669,159.00
17	Belanja Aset Tetap Lainnya	1,081,576,500.00	2,940,973,807.00	1,859,397,307.00
18	Belanja Aset Lainnya	1,848,807,700.00	2,081,189,200.00	232,381,500.00
19	Jumlah Belanja Modal	371,502,915,526.00	692,437,791,129.00	320,934,875,603.00
21	BELANJA TIDAK TERDUGA			
22	Belanja Tak Terduga	6,661,459,815.00	29,196,752,815.00	22,535,293,000.00
23	Jumlah Belanja Tak Terduga	6,661,459,815.00	29,196,752,815.00	22,535,293,000.00
24	JUMLAH BELANJA	1,726,408,247,645.00	2,532,272,667,551.00	805,864,419,906.00



Pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Daerah semula Rp1.726.408.247.645,00 menjadi sebesar Rp2.535.272.667.551,00 sehingga selisih pada anggaran perubahan sebesar Rp805.864.419.906,00 meliputi:

- a. Belanja Operasi mengalami perubahan dari semula Rp 1.348.243.872.304,00 menjadi Rp1.810.638.123.607,00 bertambah sebesar Rp462394.251.303,00 yang terdiri dari:
 - 1) Belanja pegawai yang semula Rp674.440.613.606,00 menjadi sebesar Rp718.560,112,835,00 sehingga selisih pada anggaran perubahan sebesar Rp44.119.499.229,00.
 - 2) Belanja barang dan jasa yang semula Rp620.483.999.951,00 menjadi sebesar Rp962.762.650.715,00 sehingga selisih pada anggaran perubahan sebesar Rp342.278,650,764,00.
 - 3) Belanj hibah yang semula Rp51.639.258.747,00 menjadi sebesar Rp127.635.760.057,00 sehingga selisih pada anggaran perubahan sebesar Rp75.996.501.310,00.
 - 4) Belanja bantuan sosial yang semula sebesar Rp1.680.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.679.600.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp400.000,00.
- b. Belanja modal yang semula sebesar Rp371.502.915.526,00 menjadi sebesar Rp692.437.791.129,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.320.934.875.603 yang terdiri dari:
 - 1) Belanja tanah semula Rp0 menjadi sebesar Rp1.520.000.000,00
 - 2) Belanja peralatan dan mesin semula sebesar Rp59.991.172.496,00 menjadi sebesar Rp255.449.581.197,00 mengalami kenaikan sebesar Rp195.458.408.701,00.
 - 3) Belanja gedung dan bangunan semula sebesar Rp102.755.790.659,00 menjadi sebesar Rp126.433.809.595,00 mengalami kenaikan sebesar Rp23.678.018.936,00.
 - 4) Belanja jalan, irigasi dan jaringan semula sebesar Rp.205.825.568.171,00 menjadi sebesar Rp.304.012.237.330,00 mengalami kenaikan sebesar Rp98.186.669,159,00.
 - 5) Belanja aset tetap lainnya semula sebesar Rp1.081.576.500,00 menjadi sebesar Rp2.940.973.807,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.859.397.307,00.
 - 6) Belanja aset lainnya semula sebesar Rp1.848.807.700,00 menjadi sebesar Rp2.081.189.200,00 mengalami kenaikan sebesar Rp232.381.500,00.
- c. Belanja tidak terduga semua sebesar Rp6.661.459.815 menjadi sebesar Rp29.196.752.815,00.



Adapun target dan realisasi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.3 Rincian Belanja pada Anggaran Perubahan Tahun 2023

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.360.281.993.562,00	1.160.468.912.647,02	85,31	199.813.080.914,98
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	432.879.161.401,00	298.478.810.313,94	68,95	134.400.351.087,06
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	432.879.161.401,00	298.478.810.313,94	68,95	134.400.351.087,06
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	255.707.662.675,00	152.853.279.092,00	59,78	102.854.383.583,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	215.569.748.400,00	116.568.185.034,00	54,07	99.001.563.366,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	215.569.748.400,00	116.568.185.034,00	54,07	99.001.563.366,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.299.827.000,00	4.107.823.357,00	95,53	192.003.643,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.299.827.000,00	4.107.823.357,00	95,53	192.003.643,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.220.714.840,00	20.574.069.370,00	92,59	1.646.645.470,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.503.048.340,00	18.140.305.485,00	93,01	1.362.742.855,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.621.500,00	117.292.000,00	96,44	4.329.500,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.596.045.000,00	2.316.471.885,00	89,23	279.573.115,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	965.478.035,00	928.927.553,00	96,21	36.550.482,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	965.478.035,00	928.927.553,00	96,21	36.550.482,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.926.201.400,00	10.041.371.433,00	84,20	1.884.829.967,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	673.851.400,00	450.967.925,00	66,92	222.883.475,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.163.898.000,00	924.367.360,00	79,42	239.530.640,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.068.452.000,00	8.646.036.148,00	85,87	1.422.415.852,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	725.693.000,00	632.902.345,00	87,21	92.790.655,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	725.693.000,00	632.902.345,00	87,21	92.790.655,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	149.759.574.272,00	118.760.311.304,94	79,30	30.999.262.967,06
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	65.327.322.331,00	49.301.214.563,46	75,47	16.026.107.767,54
	Penambahan Ruang Kelas Baru	7.163.228.200,00	6.477.055.985,00	90,42	686.172.215,00
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.931.895.600,00	2.834.851.074,00	96,69	97.044.526,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.313.314.400,00	1.281.429.074,00	97,57	31.885.326,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.147.018.320,00	3.081.002.079,00	97,90	66.016.241,00
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	6.446.362.400,00	6.260.802.000,00	97,12	185.560.400,00
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	5.280.900.000,00	2.155.124.950,46	40,81	3.125.775.049,54
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.236.570.000,00	1.682.995.968,00	75,25	553.574.032,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 001 Bontang Utara)	259.997.890,00	247.275.980,00	95,11	12.721.910,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 002 Bontang Utara)	234.995.100,00	221.098.280,00	94,09	13.896.820,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 003 Bontang Utara)	309.999.832,00	293.343.381,00	94,63	16.656.451,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 004 Bontang Utara)	275.999.620,00	245.782.282,00	89,05	30.217.338,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 005 Bontang Utara)	298.999.900,00	297.937.801,00	99,64	1.062.099,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 006 Bontang Utara)	182.000.000,00	92.383.890,00	50,76	89.616.110,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 007 Bontang Utara)	275.000.000,00	243.726.083,00	88,63	31.273.917,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 008 Bontang Utara)	283.481.410,00	251.632.890,00	88,77	31.848.520,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 009 Bontang Utara)	202.999.440,00	152.212.948,00	74,98	50.786.492,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 010 Bontang Utara)	240.995.400,00	220.936.800,00	91,68	20.058.600,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 011 Bontang Utara)	125.998.500,00	99.472.880,00	78,95	26.525.620,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 001 Bontang Selatan)	241.442.000,00	215.512.259,00	89,26	25.929.741,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 002 Bontang Selatan)	291.488.050,00	256.254.265,00	87,91	35.233.785,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 003 Bontang Selatan)	232.999.748,00	227.807.125,00	97,77	5.192.623,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 004 Bontang Selatan)	183.499.000,00	162.924.045,00	88,79	20.574.955,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 005 Bontang Selatan)	178.499.785,00	177.064.615,00	99,20	1.435.170,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 006 Bontang Selatan)	219.499.000,00	200.741.838,00	91,45	18.757.162,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 007 Bontang Selatan)	117.500.000,00	61.885.480,00	52,67	55.614.520,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 009 Bontang Selatan)	262.999.700,00	212.554.394,00	80,82	50.445.306,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 010 Bontang Selatan)	181.497.500,00	177.020.270,00	97,53	4.477.230,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 011 Bontang Selatan)	213.500.000,00	206.706.036,00	96,82	6.793.964,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 012 Bontang Selatan)	208.840.860,00	182.468.345,00	87,37	26.372.515,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 013 Bontang Selatan)	202.000.000,00	170.232.084,00	84,27	31.767.916,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 014 Bontang Selatan)	97.915.900,00	75.502.860,00	77,11	22.413.040,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 015 Bontang Selatan)	41.999.764,00	32.398.312,00	77,14	9.601.452,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 016 Bontang Selatan)	80.000.000,00	79.781.616,00	99,73	218.384,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 001 Bontang Barat)	168.499.875,00	165.572.123,00	98,26	2.927.752,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 002 Bontang Barat)	118.992.138,00	94.775.275,00	79,65	24.216.863,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 003 Bontang Barat)	174.999.880,00	0,00	0,00	174.999.880,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 004 Bontang Barat)	333.999.200,00	325.759.093,00	97,53	8.240.107,00
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	718.766.716,00	644.067.345,00	89,61	74.699.371,00
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.905.039.728,00	6.127.936.743,00	77,52	1.777.102.985,00
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	296.033.756,00	252.958.382,00	85,45	43.075.374,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	6.949.140.000,00	0,00	0,00	6.949.140.000,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 001 Bontang Utara)	486.920.000,00	511.255.419,00	105,00	(24.335.419,00)
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 002 Bontang Utara)	440.860.000,00	450.926.132,00	102,28	(10.066.132,00)
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 003 Bontang Utara)	577.160.000,00	549.262.673,00	95,17	27.897.327,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 004 Bontang Utara)	518.880.000,00	478.356.850,00	92,19	40.523.150,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 005 Bontang Utara)	561.180.000,00	567.848.424,00	101,19	(6.668.424,00)
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 006 Bontang Utara)	342.160.000,00	369.902.381,00	108,11	(27.742.381,00)
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 007 Bontang Utara)	515.120.000,00	562.792.940,00	109,25	(47.672.940,00)
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 008 Bontang Utara)	532.980.000,00	566.436.596,00	106,28	(33.456.596,00)
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 009 Bontang Utara)	380.700.000,00	350.672.875,00	92,11	30.027.125,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 010 Bontang Utara)	454.020.000,00	478.175.519,00	105,32	(24.155.519,00)
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 011 Bontang Utara)	59.220.000,00	59.012.725,00	99,65	207.275,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 001 Bontang Selatan)	453.080.000,00	423.826.901,00	93,54	29.253.099,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 002 Bontang Selatan)	548.020.000,00	557.088.078,00	101,65	(9.068.078,00)
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 003 Bontang Selatan)	436.160.000,00	404.294.062,00	92,69	31.865.938,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 004 Bontang Selatan)	344.980.000,00	339.057.375,00	98,28	5.922.625,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 005 Bontang Selatan)	334.640.000,00	317.192.750,00	94,79	17.447.250,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 006 Bontang Selatan)	409.840.000,00	422.272.025,00	103,03	(12.432.025,00)
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 007 Bontang Selatan)	220.900.000,00	212.467.550,00	96,18	8.432.450,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 009 Bontang Selatan)	493.500.000,00	476.737.112,00	96,60	16.762.888,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 010 Bontang Selatan)	339.340.000,00	321.555.895,00	94,76	17.784.105,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 011 Bontang Selatan)	401.380.000,00	414.804.046,00	103,34	(13.424.046,00)
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 012 Bontang Selatan)	387.280.000,00	420.999.319,00	108,71	(33.719.319,00)
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 013 Bontang Selatan)	378.820.000,00	368.064.445,00	97,16	10.755.555,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 014 Bontang Selatan)	45.120.000,00	45.120.000,00	100,00	0,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 015 Bontang Selatan)	19.740.000,00	19.740.000,00	100,00	0,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 016 Bontang Selatan)	37.600.000,00	37.593.650,00	99,98	6.350,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 001 Bontang Barat)	314.900.000,00	317.461.133,00	100,81	(2.561.133,00)
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 002 Bontang Barat)	222.780.000,00	303.029.753,00	136,02	(80.249.753,00)
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 003 Bontang Barat)	1.896.711.169,00	324.415.370,00	17,10	1.572.295.799,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 004 Bontang Barat)	626.980.000,00	602.466.655,00	96,09	24.513.345,00
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	553.768.350,00	543.316.320,00	98,11	10.452.030,00
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	396.748.200,00	367.282.700,00	92,57	29.465.500,00
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	966.926.000,00	928.800.040,00	96,06	38.125.960,00
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	59.215.984.564,00	46.719.334.493,48	78,90	12.496.650.070,52
	Penambahan Ruang Kelas Baru	17.429.597.592,00	13.966.645.979,00	80,13	3.462.951.613,00
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8.013.609.600,00	7.937.147.355,00	99,05	76.462.245,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	319.327.000,00	299.604.147,00	93,82	19.722.853,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	586.596.200,00	578.535.845,00	98,63	8.060.355,00
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	6.109.894.800,00	5.899.634.900,00	96,56	210.259.900,00
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	2.509.200.000,00	1.919.602.517,54	76,50	589.597.482,46



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	2.221.606.152,00	1.895.956.000,00	85,34	325.650.152,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMPN 1 Bontang)	497.999.756,00	434.331.265,00	87,22	63.668.491,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMPN 2 Bontang)	488.992.888,00	444.839.582,00	90,97	44.153.306,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMPN 3 Bontang)	356.999.868,00	316.893.111,00	88,77	40.106.757,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMPN 4 Bontang)	327.598.810,00	289.481.920,00	88,36	38.116.890,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMPN 5 Bontang)	364.794.610,00	298.661.207,00	81,87	66.133.403,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMPN 6 Bontang)	160.195.500,00	145.521.555,00	90,84	14.673.945,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMPN 7 Bontang)	239.399.916,00	222.694.978,00	93,02	16.704.938,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMPN 8 Bontang)	244.800.000,00	234.168.303,00	95,66	10.631.697,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMPN 9 Bontang)	186.599.912,00	184.487.520,00	98,87	2.112.392,00
	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	100.000.000,00	99.884.600,00	99,88	115.400,00
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.110.000.000,00	1.038.483.899,00	93,56	71.516.101,00
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6.206.079.960,00	3.469.168.478,00	55,90	2.736.911.482,00
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	72.136.000,00	30.389.363,00	42,13	41.746.637,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	4.738.350.000,00	0,00	0,00	4.738.350.000,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 1 Bontang)	954.500.000,00	1.088.755.537,00	114,07	(134.255.537,00)
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 2 Bontang)	937.250.000,00	1.057.749.710,00	112,86	(120.499.710,00)
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 3 Bontang)	684.250.000,00	665.412.736,00	97,25	18.837.264,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 4 Bontang)	627.900.000,00	622.832.397,00	99,19	5.067.603,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 5 Bontang)	699.200.000,00	716.495.335,94	102,47	(17.295.335,94)
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 6 Bontang)	307.050.000,00	326.972.154,00	106,49	(19.922.154,00)
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 7 Bontang)	458.850.000,00	390.017.958,00	85,00	68.832.042,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 8 Bontang)	469.200.000,00	471.746.766,00	100,54	(2.546.766,00)



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 9 Bontang)	357.650.000,00	349.605.672,00	97,75	8.044.328,00
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	451.394.000,00	386.032.002,00	85,52	65.361.998,00
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	177.914.000,00	138.471.840,00	77,83	39.442.160,00
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	807.048.000,00	799.109.861,00	99,02	7.938.139,00
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	22.587.448.693,00	20.326.414.945,00	89,99	2.261.033.748,00
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.116.750.000,00	1.108.514.402,00	99,26	8.235.598,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.653.386.712,00	1.504.182.195,00	90,98	149.204.517,00
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	3.466.000.000,00	3.368.111.890,00	97,18	97.888.110,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD (TK Negeri 1 Bontang)	83.199.910,00	74.847.250,00	89,96	8.352.660,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD (TK Negeri 2 Bontang)	21.199.831,00	20.627.000,00	97,30	572.831,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD (TK Negeri 3 Bontang)	23.200.000,00	22.060.000,00	95,09	1.140.000,00
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	8.899.920.000,00	7.298.615.019,00	82,01	1.601.304.981,00
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.713.900.096,00	1.466.993.874,00	85,59	246.906.222,00
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	668.478.248,00	626.370.699,00	93,70	42.107.549,00
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.450.770.000,00	4.416.748.016,00	99,24	34.021.984,00
	Pengelolaan Dana BOP PAUD (TK Negeri 1 Bontang)	131.040.000,00	131.040.000,00	100,00	0,00
	Pengelolaan Dana BOP PAUD (TK Negeri 2 Bontang)	33.390.000,00	33.390.000,00	100,00	0,00
	Pengelolaan Dana BOP PAUD (TK Negeri 3 Bontang)	35.910.000,00	35.910.000,00	100,00	0,00
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	46.768.000,00	25.595.500,00	54,73	21.172.500,00
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	46.768.000,00	23.567.500,00	50,39	23.200.500,00
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	196.767.896,00	169.841.600,00	86,32	26.926.296,00
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.628.818.684,00	2.413.347.303,00	91,80	215.471.381,00
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	703.933.684,00	662.772.767,00	94,15	41.160.917,00
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.462.770.000,00	1.440.812.698,00	98,50	21.957.302,00
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bontang)	185.160.000,00	185.087.903,00	99,96	72.097,00
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	46.768.000,00	19.539.500,00	41,78	27.228.500,00
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	46.768.000,00	14.257.000,00	30,48	32.511.000,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	183.419.000,00	90.877.435,00	49,55	92.541.565,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	549.993.200,00	511.683.769,00	93,03	38.309.431,00
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	549.993.200,00	511.683.769,00	93,03	38.309.431,00
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	549.993.200,00	511.683.769,00	93,03	38.309.431,00
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	26.761.931.292,00	26.299.063.637,00	98,27	462.867.655,00
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	26.761.931.292,00	26.299.063.637,00	98,27	462.867.655,00
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25.854.986.292,00	25.574.672.830,00	98,92	280.313.462,00
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	906.945.000,00	724.390.807,00	79,87	182.554.193,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	99.999.962,00	54.472.511,00	54,47	45.527.451,00
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	99.999.962,00	54.472.511,00	54,47	45.527.451,00
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	99.999.962,00	54.472.511,00	54,47	45.527.451,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	392.759.927.393,00	362.592.971.079,08	92,32	30.166.956.313,92
	DINAS KESEHATAN	148.969.508.688,00	131.457.341.164,20	88,24	17.512.167.523,80
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.054.178.958,00	67.909.893.711,00	90,48	7.144.285.247,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.040.000,00	56.627.500,00	51,46	53.412.500,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.288.750,00	1.248.750,00	13,44	8.040.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.102.500,00	9.045.000,00	47,35	10.057.500,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41.448.750,00	19.338.750,00	46,66	22.110.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.200.000,00	26.995.000,00	67,15	13.205.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	55.256.258.790,00	49.947.869.310,00	90,39	5.308.389.480,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55.227.143.790,00	49.938.489.310,00	90,42	5.288.654.480,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.308.750,00	1.340.000,00	10,07	11.968.750,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.537.500,00	4.020.000,00	38,15	6.517.500,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.268.750,00	4.020.000,00	76,30	1.248.750,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.757.250,00	28.757.250,00	100,00	0,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.757.250,00	28.757.250,00	100,00	0,00
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	24.120.000,00	2.280.000,00	9,45	21.840.000,00
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	24.120.000,00	2.280.000,00	9,45	21.840.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.268.267.160,00	1.090.681.440,00	86,00	177.585.720,00
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	14.740.000,00	4.854.000,00	32,93	9.886.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.181.831.000,00	1.062.227.440,00	89,88	119.603.560,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	71.696.160,00	23.600.000,00	32,92	48.096.160,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.164.916.930,00	5.973.232.729,00	96,89	191.684.201,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.382.054,00	8.145.000,00	97,17	237.054,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.046.218.156,00	2.970.784.770,00	97,52	75.433.386,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	188.422.203,00	171.973.800,00	91,27	16.448.403,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	199.803.830,00	161.062.798,00	80,61	38.741.032,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.800.000,00	45.947.000,00	92,26	3.853.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.163.331.300,00	2.129.844.361,00	98,45	33.486.939,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	217.290.387,00	209.775.000,00	96,54	7.515.387,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	291.669.000,00	275.700.000,00	94,52	15.969.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	188.447.808,00	168.000.000,00	89,15	20.447.808,00
	Pengadaan Mebel	188.447.808,00	168.000.000,00	89,15	20.447.808,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.271.515.000,00	8.978.435.515,00	87,41	1.293.079.485,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000,00	306.500,00	13,62	1.943.500,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	374.700.000,00	296.388.371,00	79,10	78.311.629,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.894.565.000,00	8.681.740.644,00	87,74	1.212.824.356,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.741.856.020,00	1.664.009.967,00	95,53	77.846.053,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	213.314.100,00	185.809.869,00	87,11	27.504.231,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.028.252.500,00	990.086.000,00	96,29	38.166.500,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.440.000,00	80.826.980,00	89,37	9.613.020,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	409.849.420,00	407.287.118,00	99,37	2.562.302,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	70.414.103.412,00	60.835.101.709,20	86,40	9.579.001.702,80
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	14.191.926.477,00	11.407.044.530,00	80,38	2.784.881.947,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	680.720.860,00	670.678.150,00	98,52	10.042.710,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.160.633.140,00	1.157.844.350,00	99,76	2.788.790,00
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	680.790.000,00	619.597.225,00	91,01	61.192.775,00
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	522.620.339,00	462.947.875,00	88,58	59.672.464,00
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.949.540.609,00	3.535.433.462,00	89,52	414.107.147,00
	Pengadaan Obat, Vaksin	1.702.808.850,00	1.090.340.330,00	64,03	612.468.520,00
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.076.669.880,00	3.609.185.802,00	71,09	1.467.484.078,00
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	418.142.799,00	261.017.336,00	62,42	157.125.463,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.542.403.786,00	49.025.548.577,20	88,27	6.516.855.208,80
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	104.942.460,00	84.921.200,00	80,92	20.021.260,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	114.523.995,00	83.939.100,00	73,29	30.584.895,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	88.851.670,00	83.598.500,00	94,09	5.253.170,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	109.920.000,00	97.354.000,00	88,57	12.566.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	54.289.400,00	44.557.400,00	82,07	9.732.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	98.779.927,00	69.189.752,00	70,04	29.590.175,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	109.988.300,00	100.088.300,00	91,00	9.900.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	289.865.480,00	238.893.704,00	82,42	50.971.776,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	128.475.000,00	119.063.441,00	92,67	9.411.559,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	98.115.760,00	32.260.100,00	32,88	65.855.660,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	310.143.537,00	266.825.040,00	86,03	43.318.497,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	110.072.944,00	42.481.600,00	38,59	67.591.344,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	53.585.000,00	45.056.600,00	84,08	8.528.400,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	384.555.896,00	320.537.569,00	83,35	64.018.327,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	73.267.990,00	64.339.881,00	87,81	8.928.109,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	682.260.011,00	654.628.087,00	95,95	27.631.924,00
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100.319.185,00	84.677.876,00	84,41	15.641.309,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	39.620.000,00	31.396.000,00	79,24	8.224.000,00
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	423.627.320,00	216.976.776,00	51,22	206.650.544,00
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	664.020.456,00	540.719.594,00	81,43	123.300.862,00
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.254.608.937,00	875.769.366,00	69,80	378.839.571,00
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	24.188.716.600,00	23.297.501.900,00	96,32	891.214.700,00
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas Bontang Utara 1)	1.413.636.185,00	1.363.991.073,20	96,49	49.645.111,80
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas Bontang Utara 2)	1.194.678.000,00	1.065.700.170,00	89,20	128.977.830,00
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas Bontang Selatan 1)	1.411.733.332,00	1.209.620.170,00	85,68	202.113.162,00
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas Bontang Selatan 2)	1.183.834.681,00	1.058.128.357,00	89,38	125.706.324,00
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas Bontang Barat)	922.928.537,00	832.945.343,00	90,25	89.983.194,00
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas Bontang Lestari)	386.405.547,00	337.092.613,00	87,24	49.312.934,00
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Klinik PNS)	1.181.112.267,00	1.023.095.427,00	86,62	158.016.840,00
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	326.811.928,00	228.204.419,00	69,83	98.607.509,00
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	42.635.582,00	27.493.166,00	64,48	15.142.416,00
	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bontang Utara 1)	3.041.053.829,00	2.290.780.001,00	75,33	750.273.828,00
	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bontang Utara 2)	2.064.081.704,00	1.549.639.232,00	75,08	514.442.472,00
	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bontang Selatan 1)	3.100.816.017,00	2.371.950.945,00	76,49	728.865.072,00
	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bontang Selatan 2)	1.804.153.264,00	1.382.102.918,00	76,61	422.050.346,00
	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bontang Barat)	2.369.872.290,00	1.857.171.387,00	78,37	512.700.903,00
	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bontang Lestari)	2.746.446.975,00	2.471.518.194,00	89,99	274.928.781,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT Laboratorium Kesehatan)	2.030.454.684,00	1.907.900.132,00	93,96	122.554.552,00
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	563.001.060,00	461.446.760,00	81,96	101.554.300,00
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	132.422.851,00	66.989.820,00	50,59	65.433.031,00
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	143.775.185,00	125.002.664,00	86,94	18.772.521,00
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	221.153.492,00	78.710.270,00	35,59	142.443.222,00
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	21.452.270,00	3.027.270,00	14,11	18.425.000,00
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	123.835.760,00	0,00	0,00	123.835.760,00
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	75.865.462,00	75.683.000,00	99,76	182.462,00
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	458.619.657,00	323.798.332,00	70,60	134.821.325,00
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	408.853.792,00	290.621.332,00	71,08	118.232.460,00
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	49.765.865,00	33.177.000,00	66,67	16.588.865,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.048.668.278,00	1.679.953.367,00	82,00	368.714.911,00
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	199.965.900,00	178.287.220,00	89,16	21.678.680,00
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	199.965.900,00	178.287.220,00	89,16	21.678.680,00
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.848.702.378,00	1.501.666.147,00	81,23	347.036.231,00
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.848.702.378,00	1.501.666.147,00	81,23	347.036.231,00
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	569.652.579,00	340.942.378,00	59,85	228.710.201,00
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	24.993.880,00	17.768.400,00	71,09	7.225.480,00
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	24.993.880,00	17.768.400,00	71,09	7.225.480,00
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	494.415.999,00	280.136.678,00	56,66	214.279.321,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	494.415.999,00	280.136.678,00	56,66	214.279.321,00
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	31.875.000,00	30.192.400,00	94,72	1.682.600,00
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	31.875.000,00	30.192.400,00	94,72	1.682.600,00
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	18.367.700,00	12.844.900,00	69,93	5.522.800,00
	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	18.367.700,00	12.844.900,00	69,93	5.522.800,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	882.905.461,00	691.449.999,00	78,32	191.455.462,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.799.936,00	53.735.158,00	88,38	7.064.778,00
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	60.799.936,00	53.735.158,00	88,38	7.064.778,00
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	427.134.000,00	294.947.814,00	69,05	132.186.186,00
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	427.134.000,00	294.947.814,00	69,05	132.186.186,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	394.971.525,00	342.767.027,00	86,78	52.204.498,00
	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	394.971.525,00	342.767.027,00	86,78	52.204.498,00
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA	243.790.418.705,00	231.135.629.914,88	94,81	12.654.788.790,12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91.962.190.432,00	79.403.433.839,00	86,34	12.558.756.593,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80.332.186.519,00	69.915.110.955,00	87,03	10.417.075.564,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	79.343.535.605,00	69.313.688.446,00	87,36	10.029.847.159,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	988.650.914,00	601.422.509,00	60,83	387.228.405,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.799.475.000,00	1.748.756.162,00	97,18	50.718.838,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.799.475.000,00	1.748.756.162,00	97,18	50.718.838,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	479.466.000,00	431.136.648,00	89,92	48.329.352,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	479.466.000,00	431.136.648,00	89,92	48.329.352,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.440.329.503,00	5.440.502.800,00	73,12	1.999.826.703,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.440.329.503,00	5.440.502.800,00	73,12	1.999.826.703,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.910.733.410,00	1.867.927.274,00	97,76	42.806.136,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.926.000,00	45.570.000,00	65,17	24.356.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	446.619.650,00	444.928.350,00	99,62	1.691.300,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.990.600,00	199.990.600,00	100,00	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.194.197.160,00	1.177.438.324,00	98,60	16.758.836,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	149.514.451.273,00	149.521.989.198,88	100,01	(7.537.925,88)
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	43.758.315.109,00	43.562.357.029,00	99,55	195.958.080,00
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	43.758.315.109,00	43.562.357.029,00	99,55	195.958.080,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	105.756.136.164,00	105.959.632.169,88	100,19	(203.496.005,88)
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	105.756.136.164,00	105.959.632.169,88	100,19	(203.496.005,88)
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.878.953.000,00	1.790.126.877,00	95,27	88.826.123,00
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.878.953.000,00	1.790.126.877,00	95,27	88.826.123,00
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.878.953.000,00	1.790.126.877,00	95,27	88.826.123,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	434.824.000,00	420.080.000,00	96,61	14.744.000,00
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	434.824.000,00	420.080.000,00	96,61	14.744.000,00
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	434.824.000,00	420.080.000,00	96,61	14.744.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	346.158.501.991,00	324.729.694.352,00	93,81	21.428.807.639,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA	346.158.501.991,00	324.729.694.352,00	93,81	21.428.807.639,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.386.479.362,00	25.290.003.528,00	86,06	4.096.475.834,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.125.273.457,00	14.296.702.053,00	83,48	2.828.571.404,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.123.477.957,00	14.294.917.053,00	83,48	2.828.560.904,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.795.500,00	1.785.000,00	99,42	10.500,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.465.532.917,00	2.222.770.753,00	90,15	242.762.164,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	566.154.045,00	541.058.000,00	95,57	25.096.045,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.829.812.000,00	1.615.446.169,00	88,28	214.365.831,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	69.566.872,00	66.266.584,00	95,26	3.300.288,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.464.458.349,00	2.105.656.853,00	85,44	358.801.496,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.226.434,00	6.226.000,00	99,99	434,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	624.056.204,00	516.852.470,00	82,82	107.203.734,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.124.489,00	15.024.405,00	99,34	100.084,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.008.162,00	49.608.750,00	99,20	399.412,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.438.661.000,00	1.191.490.228,00	82,82	247.170.772,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	330.382.060,00	326.455.000,00	98,81	3.927.060,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.603.436.039,00	4.185.407.758,00	90,92	418.028.281,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.864.871.180,00	1.593.132.918,00	85,43	271.738.262,00
	Pengadaan Mebel	782.381.261,00	734.492.040,00	93,88	47.889.221,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.956.183.598,00	1.857.782.800,00	94,97	98.400.798,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.781.502.000,00	1.676.997.118,00	94,13	104.504.882,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	304.000.000,00	222.636.067,00	73,24	81.363.933,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.467.502.000,00	1.444.361.051,00	98,42	23.140.949,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	946.276.600,00	802.468.993,00	84,80	143.807.607,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	829.460.200,00	727.444.991,00	87,70	102.015.209,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.816.400,00	75.024.002,00	64,22	41.792.398,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	75.590.066.763,00	74.584.717.144,00	98,67	1.005.349.619,00
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.590.066.763,00	74.584.717.144,00	98,67	1.005.349.619,00
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	754.550.000,00	706.775.946,00	93,67	47.774.054,00
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	501.445.000,00	486.848.640,00	97,09	14.596.360,00
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	3.925.100.460,00	3.875.077.268,00	98,73	50.023.192,00
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	39.402.119.339,00	39.368.623.232,00	99,91	33.496.107,00
	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1.727.963.971,00	1.709.652.339,00	98,94	18.311.632,00
	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	6.398.203.763,00	6.271.802.061,00	98,02	126.401.702,00
	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	9.875.264.598,00	9.747.161.367,00	98,70	128.103.231,00
	Normalisasi/Restorasi Sungai	12.729.119.632,00	12.143.249.736,00	95,40	585.869.896,00
	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	276.300.000,00	275.526.555,00	99,72	773.445,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	16.924.443.000,00	16.293.966.995,00	96,27	630.476.005,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	16.924.443.000,00	16.293.966.995,00	96,27	630.476.005,00
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1.427.247.000,00	1.367.653.993,00	95,82	59.593.007,00
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	582.200.000,00	546.714.300,00	93,90	35.485.700,00
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	2.001.764.716,00	1.971.094.023,00	98,47	30.670.693,00
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	12.616.636.000,00	12.129.509.958,00	96,14	487.126.042,00
	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	296.595.284,00	278.994.721,00	94,07	17.600.563,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	811.157.000,00	785.233.500,00	96,80	25.923.500,00
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	811.157.000,00	785.233.500,00	96,80	25.923.500,00
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	531.735.000,00	507.838.400,00	95,51	23.896.600,00
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	21.180.000,00	21.051.000,00	99,39	129.000,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	258.242.000,00	256.344.100,00	99,27	1.897.900,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.857.332.561,00	3.717.965.559,00	96,39	139.367.002,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.857.332.561,00	3.717.965.559,00	96,39	139.367.002,00
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	562.492.000,00	560.957.000,00	99,73	1.535.000,00
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	456.000.000,00	452.224.000,00	99,17	3.776.000,00
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1.655.533.561,00	1.598.095.353,00	96,53	57.438.208,00
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	139.110.000,00	138.633.100,00	99,66	476.900,00
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.044.197.000,00	968.056.106,00	92,71	76.140.894,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	29.051.828.759,00	28.669.229.572,00	98,68	382.599.187,00
	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	29.051.828.759,00	28.669.229.572,00	98,68	382.599.187,00
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	7.166.373.680,00	6.975.257.418,00	97,33	191.116.262,00
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	1.943.265.000,00	1.872.265.875,00	96,35	70.999.125,00
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	13.268.377.191,00	13.196.061.422,00	99,45	72.315.769,00
	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	6.026.012.888,00	5.980.881.110,00	99,25	45.131.778,00
	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	647.800.000,00	644.763.747,00	99,53	3.036.253,00
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	72.683.995.918,00	68.312.767.614,00	93,99	4.371.228.304,00
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	72.683.995.918,00	68.312.767.614,00	93,99	4.371.228.304,00
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	699.012.112,00	504.638.023,00	72,19	194.374.089,00
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	56.782.813.860,00	53.860.993.945,00	94,85	2.921.819.915,00
	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	15.202.169.946,00	13.947.135.646,00	91,74	1.255.034.300,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	535.696.000,00	527.738.079,00	98,51	7.957.921,00
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	535.696.000,00	527.738.079,00	98,51	7.957.921,00
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	535.696.000,00	527.738.079,00	98,51	7.957.921,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	114.186.588.965,00	103.639.808.995,00	90,76	10.546.779.970,00
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	114.186.588.965,00	103.639.808.995,00	90,76	10.546.779.970,00
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	8.360.979.000,00	7.060.234.927,00	84,44	1.300.744.073,00
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	502.000.000,00	483.758.740,00	96,37	18.241.260,00
	Pembangunan Jalan	19.860.095.451,00	15.863.626.660,00	79,88	3.996.468.791,00
	Rekonstruksi Jalan	48.172.366.525,00	45.419.643.123,00	94,29	2.752.723.402,00
	Rehabilitasi Jalan	21.776.153.537,00	21.003.767.903,00	96,45	772.385.634,00
	Pemeliharaan Berkala Jalan	890.867.063,00	456.396.478,00	51,23	434.470.585,00
	Pemeliharaan Rutin Jalan	6.205.253.166,00	5.478.532.301,00	88,29	726.720.865,00
	Pembangunan Jembatan	7.750.000.000,00	7.314.172.033,00	94,38	435.827.967,00
	Penggantian Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Berkala Jembatan	224.179.223,00	223.288.555,00	99,60	890.668,00
	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	444.695.000,00	336.388.275,00	75,64	108.306.725,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.881.606.156,00	1.803.441.770,00	95,85	78.164.386,00
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1.010.166.464,00	1.003.531.070,00	99,34	6.635.394,00
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	1.010.166.464,00	1.003.531.070,00	99,34	6.635.394,00
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	115.020.349,00	105.601.400,00	91,81	9.418.949,00
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	79.877.961,00	77.902.000,00	97,53	1.975.961,00
	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	14.268.000,00	6.844.800,00	47,97	7.423.200,00
	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	20.874.388,00	20.854.600,00	99,91	19.788,00
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	756.419.343,00	694.309.300,00	91,79	62.110.043,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1.329.296,00	1.319.000,00	99,23	10.296,00
	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	674.790.308,00	652.259.525,00	96,66	22.530.783,00
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	80.299.739,00	40.730.775,00	50,72	39.568.964,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.249.307.507,00	1.104.821.596,00	88,43	144.485.911,00
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	42.793.840,00	20.100.000,00	46,97	22.693.840,00
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	42.793.840,00	20.100.000,00	46,97	22.693.840,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	723.981.427,00	647.426.034,00	89,43	76.555.393,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota	483.170.897,00	435.997.254,00	90,24	47.173.643,00
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	240.810.530,00	211.428.780,00	87,80	29.381.750,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	111.089.852,00	100.613.950,00	90,57	10.475.902,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	111.089.852,00	100.613.950,00	90,57	10.475.902,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	371.442.388,00	336.681.612,00	90,64	34.760.776,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	119.477.540,00	107.339.000,00	89,84	12.138.540,00
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	251.964.848,00	229.342.612,00	91,02	22.622.236,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	93.560.311.536,00	88.813.770.781,00	94,93	4.746.540.755,00
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	93.560.311.536,00	88.813.770.781,00	94,93	4.746.540.755,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	14.347.019.007,00	13.451.348.472,00	93,76	895.670.535,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.122.875,00	2.122.875,00	100,00	0,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.498.500,00	1.498.500,00	100,00	0,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	624.375,00	624.375,00	100,00	0,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.792.566.209,00	7.151.803.835,00	91,78	640.762.374,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.791.317.459,00	7.150.579.460,00	91,78	640.737.999,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	624.375,00	600.000,00	96,10	24.375,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	624.375,00	624.375,00	100,00	0,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	878.729.000,00	836.478.182,00	95,19	42.250.818,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	202.669.000,00	201.357.000,00	99,35	1.312.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	676.060.000,00	635.121.182,00	93,94	40.938.818,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.923.001.679,00	2.847.030.860,00	97,40	75.970.819,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.767.857.318,00	1.702.457.150,00	96,30	65.400.168,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	221.581.083,00	217.553.950,00	98,18	4.027.133,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.874.110,00	30.107.600,00	91,58	2.766.510,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	900.689.168,00	896.912.160,00	99,58	3.777.008,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	526.040.000,00	523.750.000,00	99,56	2.290.000,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	526.040.000,00	523.750.000,00	99,56	2.290.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.035.006.000,00	1.009.088.958,00	97,50	25.917.042,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.023.006.000,00	997.088.958,00	97,47	25.917.042,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.189.553.244,00	1.081.073.762,00	90,88	108.479.482,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	758.848.575,00	671.989.908,00	88,55	86.858.667,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	191.787.600,00	170.980.000,00	89,15	20.807.600,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	238.917.069,00	238.103.854,00	99,66	813.215,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	8.370.379.635,00	7.736.383.772,00	92,43	633.995.863,00
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	247.968.540,00	152.008.000,00	61,30	95.960.540,00
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	247.968.540,00	152.008.000,00	61,30	95.960.540,00
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	197.160.000,00	38.935.000,00	19,75	158.225.000,00
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	197.160.000,00	38.935.000,00	19,75	158.225.000,00
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	7.925.251.095,00	7.545.440.772,00	95,21	379.810.323,00
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun (UPT Rumah Susun Sederhana Sewa)	5.575.636.088,00	5.438.863.805,00	97,55	136.772.283,00
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (UPT Rumah Susun Sederhana Sewa)	2.349.615.007,00	2.106.576.967,00	89,66	243.038.040,00
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7.001.853.969,00	6.505.012.346,00	92,90	496.841.623,00
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	85.849.000,00	84.418.678,00	98,33	1.430.322,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	85.849.000,00	84.418.678,00	98,33	1.430.322,00
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	373.825.080,00	361.405.723,00	96,68	12.419.357,00
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	122.924.080,00	121.017.000,00	98,45	1.907.080,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	250.901.000,00	240.388.723,00	95,81	10.512.277,00
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	6.542.179.889,00	6.059.187.945,00	92,62	482.991.944,00
	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	3.160.321.682,00	2.989.601.453,00	94,60	170.720.229,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	412.400.000,00	408.620.000,00	99,08	3.780.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	87.900.000,00	83.209.042,00	94,66	4.690.958,00
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	2.881.558.207,00	2.577.757.450,00	89,46	303.800.757,00
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	946.042.000,00	886.460.500,00	93,70	59.581.500,00
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	946.042.000,00	886.460.500,00	93,70	59.581.500,00
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	946.042.000,00	886.460.500,00	93,70	59.581.500,00
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	62.895.016.925,00	60.234.565.691,00	95,77	2.660.451.234,00
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	62.895.016.925,00	60.234.565.691,00	95,77	2.660.451.234,00
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1.761.680.000,00	1.422.792.300,00	80,76	338.887.700,00
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	61.133.336.925,00	58.811.773.391,00	96,20	2.321.563.534,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	71.614.939.895,00	63.792.913.724,00	89,08	7.822.026.171,00
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	17.600.944.604,00	15.757.275.625,00	89,53	1.843.668.979,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.377.660.529,00	14.793.839.547,00	90,33	1.583.820.982,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.499.760,00	1.494.000,00	99,62	5.760,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	499.920,00	498.000,00	99,62	1.920,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	499.920,00	498.000,00	99,62	1.920,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	499.920,00	498.000,00	99,62	1.920,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.392.269.221,00	6.901.302.935,00	93,36	490.966.286,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.391.269.381,00	6.900.306.935,00	93,36	490.962.446,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	499.920,00	498.000,00	99,62	1.920,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	499.920,00	498.000,00	99,62	1.920,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	565.298.375,00	175.523.500,00	31,05	389.774.875,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	438.198.375,00	168.023.500,00	38,34	270.174.875,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	127.100.000,00	7.500.000,00	5,90	119.600.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.963.817.623,00	1.491.713.554,00	75,96	472.104.069,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.468.740,00	8.018.000,00	59,53	5.450.740,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	754.833.553,00	347.773.540,00	46,07	407.060.013,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.349.143,00	37.647.750,00	88,90	4.701.393,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.819.187,00	42.880.689,00	82,75	8.938.498,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.101.347.000,00	1.055.393.575,00	95,83	45.953.425,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.134.490.000,00	1.123.370.000,00	99,02	11.120.000,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.134.490.000,00	1.123.370.000,00	99,02	11.120.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.415.340.000,00	4.360.787.550,00	98,76	54.552.450,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.800.000,00	130.097.175,00	85,14	22.702.825,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.249.540.000,00	4.217.690.375,00	99,25	31.849.625,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	904.945.550,00	739.648.008,00	81,73	165.297.542,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	875.105.550,00	736.823.008,00	84,20	138.282.542,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.840.000,00	2.825.000,00	9,47	27.015.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.223.284.075,00	963.436.078,00	78,76	259.847.997,00
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	372.271.260,00	302.123.300,00	81,16	70.147.960,00
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	149.896.900,00	102.709.900,00	68,52	47.187.000,00
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	15.410.000,00	4.736.000,00	30,73	10.674.000,00
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	123.055.000,00	118.387.700,00	96,21	4.667.300,00
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	72.640.000,00	70.809.700,00	97,48	1.830.300,00
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	11.269.360,00	5.480.000,00	48,63	5.789.360,00
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	808.262.815,00	661.312.778,00	81,82	146.950.037,00
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	231.013.315,00	210.885.000,00	91,29	20.128.315,00
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	203.180.500,00	160.360.000,00	78,92	42.820.500,00
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	374.069.000,00	290.067.778,00	77,54	84.001.222,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	42.750.000,00	0,00	0,00	42.750.000,00
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	42.750.000,00	0,00	0,00	42.750.000,00
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10.299.795.439,00	8.514.806.291,00	82,67	1.784.989.148,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.335.432.629,00	6.911.915.416,00	82,92	1.423.517.213,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.031.845.055,00	3.879.558.418,00	77,10	1.152.286.637,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.031.845.055,00	3.879.558.418,00	77,10	1.152.286.637,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	264.600.710,00	253.163.500,00	95,68	11.437.210,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	264.600.710,00	253.163.500,00	95,68	11.437.210,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	970.048.165,00	844.004.861,00	87,01	126.043.304,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.272.385,00	9.080.000,00	97,93	192.385,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	299.630.763,00	253.264.901,00	84,53	46.365.862,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.970.457,00	78.401.555,00	78,42	21.568.902,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.159.920,00	24.401.000,00	78,31	6.758.920,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	530.014.640,00	478.857.405,00	90,35	51.157.235,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	194.930.000,00	193.820.000,00	99,43	1.110.000,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	194.930.000,00	193.820.000,00	99,43	1.110.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	872.936.000,00	810.842.595,00	92,89	62.093.405,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.300.000,00	112.392.884,00	71,91	43.907.116,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	711.536.000,00	693.349.711,00	97,44	18.186.289,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.001.072.699,00	930.526.042,00	92,95	70.546.657,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	726.496.499,00	660.405.060,00	90,90	66.091.439,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	274.576.200,00	270.120.982,00	98,38	4.455.218,00
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.964.362.810,00	1.602.890.875,00	81,60	361.471.935,00
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	19.107.570,00	15.532.100,00	81,29	3.575.470,00
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	7.134.000,00	4.503.600,00	63,13	2.630.400,00
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	11.973.570,00	11.028.500,00	92,11	945.070,00
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.859.690.160,00	1.504.023.860,00	80,87	355.666.300,00
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1.468.798.280,00	1.205.768.860,00	82,09	263.029.420,00
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	390.891.880,00	298.255.000,00	76,30	92.636.880,00
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	85.565.080,00	83.334.915,00	97,39	2.230.165,00
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	80.015.080,00	79.583.115,00	99,46	431.965,00
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	5.550.000,00	3.751.800,00	67,60	1.798.200,00
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	43.714.199.852,00	39.520.831.808,00	90,41	4.193.368.044,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.728.335.093,00	20.814.214.012,00	84,17	3.914.121.081,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.135.071.754,00	9.562.013.882,00	72,80	3.573.057.872,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.135.071.754,00	9.562.013.882,00	72,80	3.573.057.872,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.187.080.762,00	2.154.741.022,00	98,52	32.339.740,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	809.099.620,00	797.297.200,00	98,54	11.802.420,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	239.815.585,00	235.121.500,00	98,04	4.694.085,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	205.568.557,00	191.892.274,00	93,35	13.676.283,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	932.597.000,00	930.430.048,00	99,77	2.166.952,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	488.041.957,00	421.803.000,00	86,43	66.238.957,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	382.834.800,00	336.527.000,00	87,90	46.307.800,00
	Pengadaan Mebel	105.207.157,00	85.276.000,00	81,06	19.931.157,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.337.213.500,00	7.174.717.368,00	97,79	162.496.132,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	370.968.000,00	323.018.090,00	87,07	47.949.910,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.956.745.500,00	6.842.199.278,00	98,35	114.546.222,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.580.927.120,00	1.500.938.740,00	94,94	79.988.380,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.149.728.700,00	1.088.361.622,00	94,66	61.367.078,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.107.000,00	25.506.798,00	94,10	1.600.202,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	384.499.920,00	367.623.120,00	95,61	16.876.800,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.591.500,00	19.447.200,00	99,26	144.300,00
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	18.985.864.759,00	18.706.617.796,00	98,53	279.246.963,00
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.059.545.580,00	15.859.457.091,00	98,75	200.088.489,00
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	149.435.000,00	126.220.681,00	84,47	23.214.319,00
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.240.928.985,00	1.180.036.656,00	95,09	60.892.329,00
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	929.603.069,00	921.485.013,00	99,13	8.118.056,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.498.500,00	1.485.000,00	99,10	13.500,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	12.626.866.386,00	12.533.368.686,00	99,26	93.497.700,00
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	1.111.213.640,00	1.096.861.055,00	98,71	14.352.585,00
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	59.905.325,00	57.171.019,00	95,44	2.734.306,00
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	19.963.000,00	19.414.000,00	97,25	549.000,00
	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	39.942.325,00	37.757.019,00	94,53	2.185.306,00
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	2.866.413.854,00	2.789.989.686,00	97,33	76.424.168,00
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	2.469.355.459,00	2.395.824.447,00	97,02	73.531.012,00
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	284.419.680,00	283.165.239,00	99,56	1.254.441,00
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	112.638.715,00	111.000.000,00	98,55	1.638.715,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	23.309.151.346,00	22.060.752.397,00	94,64	1.248.398.949,00
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	23.309.151.346,00	22.060.752.397,00	94,64	1.248.398.949,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.891.575.160,00	13.937.948.882,00	93,60	953.626.278,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.366.550.680,00	6.663.053.626,00	90,45	703.497.054,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.366.550.680,00	6.663.053.626,00	90,45	703.497.054,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.177.127.500,00	1.166.355.164,00	99,08	10.772.336,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	337.171.500,00	329.220.000,00	97,64	7.951.500,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	839.956.000,00	837.135.164,00	99,66	2.820.836,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.221.798.939,00	2.131.356.738,00	95,93	90.442.201,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.136.147.977,00	1.072.277.556,00	94,38	63.870.421,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.766.162,00	46.450.840,00	89,73	5.315.322,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.900.800,00	26.908.000,00	77,10	7.992.800,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	998.984.000,00	985.720.342,00	98,67	13.263.658,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	906.213.766,00	898.817.000,00	99,18	7.396.766,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	526.040.000,00	525.360.000,00	99,87	680.000,00
	Pengadaan Mebel	380.173.766,00	373.457.000,00	98,23	6.716.766,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.659.125.000,00	2.588.943.984,00	97,36	70.181.016,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.525.000,00	5.371.000,00	97,21	154.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	141.540.000,00	97.291.384,00	68,74	44.248.616,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.512.060.000,00	2.486.281.600,00	98,97	25.778.400,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	560.759.275,00	489.422.370,00	87,28	71.336.905,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	527.479.275,00	457.084.070,00	86,65	70.395.205,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.280.000,00	32.338.300,00	97,17	941.700,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.237.766.355,00	1.150.584.880,00	92,96	87.181.475,00
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	35.028.800,00	28.056.400,00	80,10	6.972.400,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	35.028.800,00	28.056.400,00	80,10	6.972.400,00
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.202.737.555,00	1.122.528.480,00	93,33	80.209.075,00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	167.254.000,00	159.249.232,00	95,21	8.004.768,00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	282.105.100,00	259.807.235,00	92,10	22.297.865,00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	661.580.000,00	627.761.008,00	94,89	33.818.992,00
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	91.798.455,00	75.711.005,00	82,48	16.087.450,00
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.756.668.323,00	3.696.182.908,00	98,39	60.485.415,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	3.661.668.881,00	3.602.241.526,00	98,38	59.427.355,00
	Penyediaan Permakanan	2.509.300.826,00	2.487.201.227,00	99,12	22.099.599,00
	Penyediaan Sandang	19.999.690,00	19.698.500,00	98,49	301.190,00
	Penyediaan Alat Bantu	170.477.296,00	162.639.100,00	95,40	7.838.196,00
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	102.959.824,00	102.304.271,00	99,36	655.553,00
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	441.332.140,00	436.435.240,00	98,89	4.896.900,00
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	39.561.088,00	38.215.688,00	96,60	1.345.400,00
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	7.453.800,00	6.930.600,00	92,98	523.200,00
	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	49.992.968,00	37.279.000,00	74,57	12.713.968,00
	Pemberian Layanan Rujukan	320.591.249,00	311.537.900,00	97,18	9.053.349,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	94.999.442,00	93.941.382,00	98,89	1.058.060,00
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	44.999.650,00	44.678.950,00	99,29	320.700,00
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	49.999.792,00	49.262.432,00	98,53	737.360,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.673.907.887,00	2.574.886.203,00	96,30	99.021.684,00
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.673.907.887,00	2.574.886.203,00	96,30	99.021.684,00
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	448.442.753,00	417.692.665,00	93,14	30.750.088,00
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	160.005.500,00	158.583.500,00	99,11	1.422.000,00
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.271.681.634,00	1.205.239.954,00	94,78	66.441.680,00
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	793.778.000,00	793.370.084,00	99,95	407.916,00
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	749.233.621,00	701.149.524,00	93,58	48.084.097,00
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	609.893.821,00	568.641.242,00	93,24	41.252.579,00
	Penyediaan Makanan	517.928.446,00	490.888.153,00	94,78	27.040.293,00
	Penyediaan Sandang	91.965.375,00	77.753.089,00	84,55	14.212.286,00
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	139.339.800,00	132.508.282,00	95,10	6.831.518,00
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	139.339.800,00	132.508.282,00	95,10	6.831.518,00
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	402.867.571.804,00	371.049.257.728,00	92,10	31.818.314.076,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	23.289.003.832,00	21.924.975.323,00	94,14	1.364.028.509,00
	DINAS KETENAGAKERJAAN	23.289.003.832,00	21.924.975.323,00	94,14	1.364.028.509,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.738.387.953,00	10.485.544.901,00	89,33	1.252.843.052,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.851.085.004,00	5.722.897.471,00	83,53	1.128.187.533,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.851.085.004,00	5.722.897.471,00	83,53	1.128.187.533,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.241.980.025,00	1.221.804.632,00	98,38	20.175.393,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	389.943.025,00	375.015.000,00	96,17	14.928.025,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	852.037.000,00	846.789.632,00	99,38	5.247.368,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.410.400.290,00	1.385.750.527,00	98,25	24.649.763,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.947.310,00	8.936.610,00	99,88	10.700,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	677.834.307,00	658.180.175,00	97,10	19.654.132,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.469.518,00	12.033.540,00	96,50	435.978,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.989.155,00	33.593.183,00	96,01	1.395.972,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	676.160.000,00	673.007.019,00	99,53	3.152.981,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.677.321.000,00	1.622.123.821,00	96,71	55.197.179,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.317.000,00	4.304.500,00	99,71	12.500,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.000.000,00	46.836.280,00	68,88	21.163.720,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.605.004.000,00	1.570.983.041,00	97,88	34.020.959,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	557.601.634,00	532.968.450,00	95,58	24.633.184,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	247.595.925,00	226.480.500,00	91,47	21.115.425,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	299.849.209,00	296.331.450,00	98,83	3.517.759,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.156.500,00	10.156.500,00	100,00	0,00
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	109.999.500,00	102.924.302,00	93,57	7.075.198,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	109.999.500,00	102.924.302,00	93,57	7.075.198,00
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	109.999.500,00	102.924.302,00	93,57	7.075.198,00
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	8.058.914.620,00	8.039.956.966,00	99,76	18.957.654,00
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	7.712.348.386,00	7.704.153.068,00	99,89	8.195.318,00
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	7.712.348.386,00	7.704.153.068,00	99,89	8.195.318,00
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	199.999.768,00	198.440.000,00	99,22	1.559.768,00
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	199.999.768,00	198.440.000,00	99,22	1.559.768,00
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	146.566.466,00	137.363.898,00	93,72	9.202.568,00
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	146.566.466,00	137.363.898,00	93,72	9.202.568,00
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	347.652.025,00	318.407.825,00	91,59	29.244.200,00
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	92.292.171,00	84.191.265,00	91,22	8.100.906,00
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	92.292.171,00	84.191.265,00	91,22	8.100.906,00
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	255.359.854,00	234.216.560,00	91,72	21.143.294,00
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	49.947.891,00	49.308.420,00	98,72	639.471,00
	Job Fair/Bursa Kerja	205.411.963,00	184.908.140,00	90,02	20.503.823,00
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	3.034.049.734,00	2.978.141.329,00	98,16	55.908.405,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	92.189.160,00	84.320.370,00	91,46	7.868.790,00
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	92.189.160,00	84.320.370,00	91,46	7.868.790,00
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.941.860.574,00	2.893.820.959,00	98,37	48.039.615,00
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	588.999.896,00	566.506.462,00	96,18	22.493.434,00
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17.911.856,00	17.911.856,00	100,00	0,00
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	17.397.561,00	17.397.561,00	100,00	0,00
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	512.536.063,00	497.318.582,00	97,03	15.217.481,00
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1.805.015.198,00	1.794.686.498,00	99,43	10.328.700,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14.134.412.672,00	13.055.328.110,00	92,37	1.079.084.562,00
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	14.134.412.672,00	13.055.328.110,00	92,37	1.079.084.562,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.747.426.224,00	9.938.613.509,00	92,47	808.812.715,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.248.750,00	1.240.000,00	99,30	8.750,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.248.750,00	1.240.000,00	99,30	8.750,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.976.645.013,00	6.349.772.528,00	91,01	626.872.485,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.976.645.013,00	6.349.772.528,00	91,01	626.872.485,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.141.000,00	50.163.700,00	92,65	3.977.300,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54.141.000,00	50.163.700,00	92,65	3.977.300,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.783.463.786,00	1.770.927.883,00	99,30	12.535.903,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	486.150.411,00	483.456.300,00	99,45	2.694.111,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.626.243,00	37.500.930,00	99,67	125.313,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.176.132,00	55.682.464,00	92,53	4.493.668,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.199.511.000,00	1.194.288.189,00	99,56	5.222.811,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.179.990.000,00	1.100.570.868,00	93,27	79.419.132,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.179.990.000,00	1.100.570.868,00	93,27	79.419.132,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	751.937.675,00	665.938.530,00	88,56	85.999.145,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	726.727.675,00	641.089.780,00	88,22	85.637.895,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.210.000,00	24.848.750,00	98,57	361.250,00
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	870.963.781,00	758.860.985,00	87,13	112.102.796,00
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	870.963.781,00	758.860.985,00	87,13	112.102.796,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	870.963.781,00	758.860.985,00	87,13	112.102.796,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.243.001.321,00	1.139.237.182,00	91,65	103.764.139,00
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	146.952.252,00	140.401.075,00	95,54	6.551.177,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	146.952.252,00	140.401.075,00	95,54	6.551.177,00
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.096.049.069,00	998.836.107,00	91,13	97.212.962,00
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (UPT Perlindungan Perempuan dan Anak)	749.223.779,00	734.231.817,00	98,00	14.991.962,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	346.825.290,00	264.604.290,00	76,29	82.221.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	348.378.919,00	318.046.774,00	91,29	30.332.145,00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	250.588.768,00	233.011.763,00	92,99	17.577.005,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.588.768,00	233.011.763,00	92,99	17.577.005,00
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	97.790.151,00	85.035.011,00	86,96	12.755.140,00
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	97.790.151,00	85.035.011,00	86,96	12.755.140,00
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	187.260.545,00	179.586.184,00	95,90	7.674.361,00
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	187.260.545,00	179.586.184,00	95,90	7.674.361,00
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	187.260.545,00	179.586.184,00	95,90	7.674.361,00
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	301.287.866,00	297.816.810,00	98,85	3.471.056,00
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	301.287.866,00	297.816.810,00	98,85	3.471.056,00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	145.939.146,00	143.296.108,00	98,19	2.643.038,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	155.348.720,00	154.520.702,00	99,47	828.018,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	436.094.016,00	423.166.666,00	97,04	12.927.350,00
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	149.482.700,00	144.684.000,00	96,79	4.798.700,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	149.482.700,00	144.684.000,00	96,79	4.798.700,00
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	184.951.452,00	184.761.041,00	99,90	190.411,00
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	184.951.452,00	184.761.041,00	99,90	190.411,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.659.864,00	93.721.625,00	92,19	7.938.239,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.659.864,00	93.721.625,00	92,19	7.938.239,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	28.276.014.854,00	24.084.874.851,00	85,18	4.191.140.003,00
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	28.276.014.854,00	24.084.874.851,00	85,18	4.191.140.003,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.718.594.323,00	21.670.657.556,00	84,26	4.047.936.767,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	450.000,00	450.000,00	100,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	450.000,00	450.000,00	100,00	0,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.680.150.184,00	12.273.998.991,00	78,28	3.406.151.193,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.679.700.184,00	12.273.548.991,00	78,28	3.406.151.193,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	450.000,00	450.000,00	100,00	0,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	557.673.000,00	510.346.724,00	91,51	47.326.276,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	557.673.000,00	510.346.724,00	91,51	47.326.276,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.544.413.264,00	4.218.660.290,00	92,83	325.752.974,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.994.440,00	99,94	5.560,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	917.062.243,00	845.308.900,00	92,18	71.753.343,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.523.309,00	46.232.183,00	89,73	5.291.126,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	113.383.722,00	108.266.510,00	95,49	5.117.212,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.716.000,00	1.715.000,00	99,94	1.000,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.560.000,00	15.700.000,00	54,97	12.860.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.422.167.990,00	3.191.443.257,00	93,26	230.724.733,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.077.862.500,00	1.070.172.500,00	99,29	7.690.000,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.077.862.500,00	1.070.172.500,00	99,29	7.690.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.889.804.000,00	2.701.585.387,00	93,49	188.218.613,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.690.000,00	12.924.822,00	94,41	765.178,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.600.000,00	14.323.875,00	48,39	15.276.125,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.846.514.000,00	2.674.336.690,00	93,95	172.177.310,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	968.241.375,00	895.443.664,00	92,48	72.797.711,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	905.511.375,00	833.355.814,00	92,03	72.155.561,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.730.000,00	62.087.850,00	98,98	642.150,00
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.594.434.573,00	1.508.048.305,00	94,58	86.386.268,00
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	239.937.615,00	230.314.508,00	95,99	9.623.107,00
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	239.937.615,00	230.314.508,00	95,99	9.623.107,00
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	234.994.820,00	179.612.562,00	76,43	55.382.258,00
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	234.994.820,00	179.612.562,00	76,43	55.382.258,00
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1.119.502.138,00	1.098.121.235,00	98,09	21.380.903,00
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	225.084.575,00	217.415.891,00	96,59	7.668.684,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	894.417.563,00	880.705.344,00	98,47	13.712.219,00
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	64.992.310,00	62.917.879,00	96,81	2.074.431,00
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	64.992.310,00	62.917.879,00	96,81	2.074.431,00
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	64.992.310,00	62.917.879,00	96,81	2.074.431,00
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	897.993.648,00	843.251.111,00	93,90	54.742.537,00
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	897.993.648,00	843.251.111,00	93,90	54.742.537,00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	897.993.648,00	843.251.111,00	93,90	54.742.537,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.888.194.073,00	2.713.863.950,00	93,96	174.330.123,00
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2.888.194.073,00	2.713.863.950,00	93,96	174.330.123,00
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	291.477.297,00	277.962.332,00	95,36	13.514.965,00
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	291.477.297,00	277.962.332,00	95,36	13.514.965,00
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	175.570.404,00	165.724.534,00	94,39	9.845.870,00
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	115.906.893,00	112.237.798,00	96,83	3.669.095,00
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1.776.522.485,00	1.767.982.553,00	99,52	8.539.932,00
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.776.522.485,00	1.767.982.553,00	99,52	8.539.932,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.776.522.485,00	1.767.982.553,00	99,52	8.539.932,00
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	394.823.360,00	274.102.461,00	69,42	120.720.899,00
	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	394.823.360,00	274.102.461,00	69,42	120.720.899,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	394.823.360,00	274.102.461,00	69,42	120.720.899,00
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	36.566.638,00	32.310.000,00	88,36	4.256.638,00
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	36.566.638,00	32.310.000,00	88,36	4.256.638,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	36.566.638,00	32.310.000,00	88,36	4.256.638,00
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	388.804.293,00	361.506.604,00	92,98	27.297.689,00
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	388.804.293,00	361.506.604,00	92,98	27.297.689,00
	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	388.804.293,00	361.506.604,00	92,98	27.297.689,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	77.541.377.479,00	68.930.877.740,00	88,90	8.610.499.739,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	77.541.377.479,00	68.930.877.740,00	88,90	8.610.499.739,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.979.416.040,00	19.827.412.965,00	82,69	4.152.003.075,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.035.000,00	1.947.500,00	95,70	87.500,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.035.000,00	1.947.500,00	95,70	87.500,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.946.595.306,00	8.813.129.070,00	88,60	1.133.466.236,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.946.595.306,00	8.813.129.070,00	88,60	1.133.466.236,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	613.455.000,00	496.414.000,00	80,92	117.041.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	553.455.000,00	488.914.000,00	88,34	64.541.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000,00	7.500.000,00	12,50	52.500.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.325.132.240,00	2.941.937.579,00	88,48	383.194.661,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.693.981.102,00	1.511.857.800,00	89,25	182.123.302,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.622.628,00	26.101.000,00	91,19	2.521.628,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	114.670.010,00	86.210.000,00	75,18	28.460.010,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.487.858.500,00	1.317.768.779,00	88,57	170.089.721,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.243.073.334,00	1.115.468.000,00	89,73	127.605.334,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	581.362.500,00	523.750.000,00	90,09	57.612.500,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	546.797.100,00	487.200.000,00	89,10	59.597.100,00
	Pengadaan Mebel	114.913.734,00	104.518.000,00	90,95	10.395.734,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.162.081.000,00	1.085.718.197,00	93,43	76.362.803,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.200.000,00	76.789.473,00	84,20	14.410.527,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.063.381.000,00	1.001.428.724,00	94,17	61.952.276,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.687.044.160,00	5.372.798.619,00	69,89	2.314.245.541,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.248.636.800,00	4.994.439.219,00	68,90	2.254.197.581,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	340.032.830,00	325.342.000,00	95,68	14.690.830,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98.374.530,00	53.017.400,00	53,89	45.357.130,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	634.877.920,00	510.245.850,00	80,37	124.632.070,00
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	587.671.557,00	496.431.900,00	84,47	91.239.657,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	352.381.300,00	294.462.743,00	83,56	57.918.557,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	9.915.000,00	9.385.000,00	94,65	530.000,00
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	225.375.257,00	192.584.157,00	85,45	32.791.100,00
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	47.206.363,00	13.813.950,00	29,26	33.392.413,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	47.206.363,00	13.813.950,00	29,26	33.392.413,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	16.062.317.730,00	14.757.392.348,00	91,88	1.304.925.382,00
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	16.062.317.730,00	14.757.392.348,00	91,88	1.304.925.382,00
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	15.901.525.470,00	14.597.983.988,00	91,80	1.303.541.482,00
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	160.792.260,00	159.408.360,00	99,14	1.383.900,00
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	27.018.500,00	19.058.000,00	70,54	7.960.500,00
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	27.018.500,00	19.058.000,00	70,54	7.960.500,00
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2.000.000,00	1.723.000,00	86,15	277.000,00
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	25.018.500,00	17.335.000,00	69,29	7.683.500,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1.800.000,00	720.000,00	40,00	1.080.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.800.000,00	720.000,00	40,00	1.080.000,00
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	900.000,00	450.000,00	50,00	450.000,00
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	900.000,00	270.000,00	30,00	630.000,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	146.771.728,00	120.833.701,00	82,33	25.938.027,00
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	146.771.728,00	120.833.701,00	82,33	25.938.027,00
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	126.146.228,00	102.633.701,00	81,36	23.512.527,00
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	20.625.500,00	18.200.000,00	88,24	2.425.500,00
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	580.509.880,00	492.438.994,00	84,83	88.070.886,00
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	580.509.880,00	492.438.994,00	84,83	88.070.886,00
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	580.509.880,00	492.438.994,00	84,83	88.070.886,00
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	36.145.500,00	20.690.000,00	57,24	15.455.500,00
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	36.145.500,00	20.690.000,00	57,24	15.455.500,00
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	36.145.500,00	20.690.000,00	57,24	15.455.500,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	36.072.520.181,00	33.182.085.882,00	91,99	2.890.434.299,00
	Pengelolaan Sampah	36.072.520.181,00	33.182.085.882,00	91,99	2.890.434.299,00
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	227.275.560,00	186.683.000,00	82,14	40.592.560,00
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	24.180.641.264,00	22.771.101.712,00	94,17	1.409.539.552,00
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	379.063.200,00	360.270.840,00	95,04	18.792.360,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	9.997.000,00	1.950.000,00	19,51	8.047.000,00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	11.275.543.157,00	9.862.080.330,00	87,46	1.413.462.827,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.533.962.515,00	15.538.808.881,00	93,98	995.153.634,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.533.962.515,00	15.538.808.881,00	93,98	995.153.634,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.623.025.074,00	9.806.472.745,00	92,31	816.552.329,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.529.812.203,00	6.993.662.250,00	92,88	536.149.953,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.529.812.203,00	6.993.662.250,00	92,88	536.149.953,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	548.510.581,00	538.335.300,00	98,14	10.175.281,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	497.199.581,00	491.020.000,00	98,76	6.179.581,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	51.311.000,00	47.315.300,00	92,21	3.995.700,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	860.986.933,00	790.501.427,00	91,81	70.485.506,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.026.190,00	4.971.690,00	82,50	1.054.500,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.610.277,00	177.167.600,00	88,31	23.442.677,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.599.035,00	56.827.000,00	85,33	9.772.035,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	96.318.431,00	60.102.137,00	62,40	36.216.294,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	491.433.000,00	491.433.000,00	100,00	0,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65.504.807,00	59.490.200,00	90,82	6.014.607,00
	Pengadaan Mebel	62.326.167,00	58.025.000,00	93,10	4.301.167,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.178.640,00	1.465.200,00	46,10	1.713.440,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.153.406.000,00	1.031.691.766,00	89,45	121.714.234,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.200.000,00	11.370.500,00	59,22	7.829.500,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	242.400.000,00	212.049.130,00	87,48	30.350.870,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	891.806.000,00	808.272.136,00	90,63	83.533.864,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	464.804.550,00	392.791.802,00	84,51	72.012.748,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	343.745.550,00	307.738.600,00	89,53	36.006.950,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.124.000,00	10.909.727,00	51,65	10.214.273,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.935.000,00	41.391.900,00	61,84	25.543.100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.000.000,00	32.751.575,00	99,25	248.425,00
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.856.648.409,00	1.792.657.854,00	96,55	63.990.555,00
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.613.980.419,00	1.555.188.796,00	96,36	58.791.623,00
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	1.236.660.484,00	1.191.042.500,00	96,31	45.617.984,00
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	377.319.935,00	364.146.296,00	96,51	13.173.639,00
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	242.667.990,00	237.469.058,00	97,86	5.198.932,00
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	242.667.990,00	237.469.058,00	97,86	5.198.932,00
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.935.440.291,00	2.833.628.302,00	96,53	101.811.989,00
	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.935.440.291,00	2.833.628.302,00	96,53	101.811.989,00
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	2.935.440.291,00	2.833.628.302,00	96,53	101.811.989,00
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.103.965.741,00	1.091.409.980,00	98,86	12.555.761,00
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	77.852.546,00	74.656.850,00	95,90	3.195.696,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	77.852.546,00	74.656.850,00	95,90	3.195.696,00
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.026.113.195,00	1.016.753.130,00	99,09	9.360.065,00
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.026.113.195,00	1.016.753.130,00	99,09	9.360.065,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	14.883.000,00	14.640.000,00	98,37	243.000,00
	Penyusunan Profil Kependudukan	14.883.000,00	14.640.000,00	98,37	243.000,00
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	14.883.000,00	14.640.000,00	98,37	243.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.008.088.016,00	2.715.677.620,00	90,28	292.410.396,00
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	3.008.088.016,00	2.715.677.620,00	90,28	292.410.396,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.008.088.016,00	2.715.677.620,00	90,28	292.410.396,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.008.088.016,00	2.715.677.620,00	90,28	292.410.396,00
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	110.681.000,00	83.795.433,00	75,71	26.885.567,00
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	307.686.772,00	259.617.566,00	84,38	48.069.206,00
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	976.081.076,00	933.824.128,00	95,67	42.256.948,00
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	152.809.760,00	139.721.700,00	91,44	13.088.060,00
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.460.829.408,00	1.298.718.793,00	88,90	162.110.615,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.811.609.141,00	5.325.755.319,00	91,64	485.853.822,00
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	5.811.609.141,00	5.325.755.319,00	91,64	485.853.822,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.069.513.709,00	1.045.445.827,00	97,75	24.067.882,00
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	499.962.577,00	493.775.241,00	98,76	6.187.336,00
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	99.999.708,00	98.645.741,00	98,65	1.353.967,00
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	399.962.869,00	395.129.500,00	98,79	4.833.369,00
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	569.551.132,00	551.670.586,00	96,86	17.880.546,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.599.832,00	60.491.616,00	99,82	108.216,00
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	54.600.000,00	50.900.000,00	93,22	3.700.000,00
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00	0,00
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	432.751.300,00	418.678.970,00	96,75	14.072.330,00
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.442.018.752,00	2.275.206.712,00	93,17	166.812.040,00
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.325.646.049,00	1.254.309.445,00	94,62	71.336.604,00
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	73.700.000,00	73.467.000,00	99,68	233.000,00
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	284.994.600,00	281.709.525,00	98,85	3.285.075,00
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	611.926.099,00	603.699.070,00	98,66	8.227.029,00
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	149.985.350,00	105.116.350,00	70,08	44.869.000,00
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	45.390.000,00	44.923.500,00	98,97	466.500,00
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	79.650.000,00	71.994.000,00	90,39	7.656.000,00
	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00	73.400.000,00	91,75	6.600.000,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	904.647.703,00	828.036.407,00	91,53	76.611.296,00
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	20.259.450,00	19.006.000,00	93,81	1.253.450,00
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	405.717.000,00	341.942.604,00	84,28	63.774.396,00
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100.000.000,00	99.272.000,00	99,27	728.000,00
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	11.840.000,00	11.782.500,00	99,51	57.500,00
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	366.831.253,00	356.033.303,00	97,06	10.797.950,00
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	171.725.000,00	152.860.860,00	89,01	18.864.140,00
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	71.000.000,00	64.600.000,00	90,99	6.400.000,00
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	100.725.000,00	88.260.860,00	87,63	12.464.140,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.300.076.680,00	2.005.102.780,00	87,18	294.973.900,00
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.610.079.180,00	1.340.107.640,00	83,23	269.971.540,00
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000,00	349.260.000,00	97,02	10.740.000,00
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	284.892.300,00	263.094.500,00	92,35	21.797.800,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	285.515.000,00	81.847.776,00	28,67	203.667.224,00
	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	447.299.880,00	439.269.480,00	98,20	8.030.400,00
	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	27.115.500,00	22.162.816,00	81,73	4.952.684,00
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	161.838.500,00	143.465.068,00	88,65	18.373.432,00
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	43.418.000,00	41.008.000,00	94,45	2.410.000,00
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	689.997.500,00	664.995.140,00	96,38	25.002.360,00
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	290.943.000,00	281.366.233,00	96,71	9.576.767,00
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	399.054.500,00	383.628.907,00	96,13	15.425.593,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	38.874.749.297,00	36.459.664.906,00	93,79	2.415.084.391,00
	DINAS PERHUBUNGAN	38.874.749.297,00	36.459.664.906,00	93,79	2.415.084.391,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	17.383.052.731,00	15.907.676.401,00	91,51	1.475.376.330,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.483.410,00	50.334.200,00	86,07	8.149.210,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.212.410,00	26.776.000,00	94,91	1.436.410,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.271.000,00	23.558.200,00	77,82	6.712.800,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.932.948.614,00	7.089.701.882,00	89,37	843.246.732,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.931.448.614,00	7.088.234.226,00	89,37	843.214.388,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000,00	483.828,00	96,77	16.172,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	500.000,00	483.828,00	96,77	16.172,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.053.799.901,00	1.891.417.259,00	92,09	162.382.642,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	771.642.504,00	751.710.000,00	97,42	19.932.504,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.282.157.397,00	1.139.707.259,00	88,89	142.450.138,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.512.148.516,00	2.445.358.769,00	97,34	66.789.747,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	985.200,00	98,52	14.800,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	881.430.279,00	837.933.428,00	95,07	43.496.851,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	398.710.479,00	390.226.850,00	97,87	8.483.629,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	197.158.758,00	183.181.700,00	92,91	13.977.058,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.033.849.000,00	1.033.031.591,00	99,92	817.409,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	574.796.020,00	526.140.000,00	91,54	48.656.020,00
	Pengadaan Mebel	574.796.020,00	526.140.000,00	91,54	48.656.020,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.297.264.170,00	2.997.735.694,00	90,92	299.528.476,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.638.170,00	4.351.000,00	93,81	287.170,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	456.900.000,00	237.158.215,00	51,91	219.741.785,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.835.726.000,00	2.756.226.479,00	97,20	79.499.521,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	953.612.100,00	906.988.597,00	95,11	46.623.503,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	860.334.000,00	821.703.397,00	95,51	38.630.603,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.612.900,00	35.730.900,00	83,85	6.882.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.665.200,00	49.554.300,00	97,81	1.110.900,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	21.390.214.236,00	20.451.619.505,00	95,61	938.594.731,00
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	18.756.242.902,00	18.001.892.838,00	95,98	754.350.064,00
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	9.879.477.182,00	9.704.334.331,00	98,23	175.142.851,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	8.876.765.720,00	8.297.558.507,00	93,48	579.207.213,00
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	328.386.700,00	311.599.149,00	94,89	16.787.551,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	328.386.700,00	311.599.149,00	94,89	16.787.551,00
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	410.325.020,00	406.433.518,00	99,05	3.891.502,00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	46.010.920,00	44.400.000,00	96,50	1.610.920,00
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	364.314.100,00	362.033.518,00	99,37	2.280.582,00
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.796.949.614,00	1.635.346.000,00	91,01	161.603.614,00
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.796.949.614,00	1.635.346.000,00	91,01	161.603.614,00
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	98.310.000,00	96.348.000,00	98,00	1.962.000,00
	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	98.310.000,00	96.348.000,00	98,00	1.962.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	101.482.330,00	100.369.000,00	98,90	1.113.330,00
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	101.482.330,00	100.369.000,00	98,90	1.113.330,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	101.482.330,00	100.369.000,00	98,90	1.113.330,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	33.752.213.587,00	31.567.212.809,00	93,53	2.185.000.778,00
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	33.752.213.587,00	31.567.212.809,00	93,53	2.185.000.778,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.247.430.493,00	10.392.963.415,00	92,40	854.467.078,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.430.000,00	36.608.466,00	97,81	821.534,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.430.000,00	36.608.466,00	97,81	821.534,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.514.258.345,00	5.849.010.716,00	89,79	665.247.629,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.476.113.345,00	5.811.767.720,00	89,74	664.345.625,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.875.000,00	19.020.002,00	95,70	854.998,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	18.270.000,00	18.222.994,00	99,74	47.006,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	730.952.000,00	718.338.300,00	98,27	12.613.700,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	352.952.000,00	340.838.300,00	96,57	12.113.700,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	378.000.000,00	377.500.000,00	99,87	500.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.110.229.173,00	2.047.038.626,00	97,01	63.190.547,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.246.800,00	3.243.420,00	99,90	3.380,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	861.986.298,00	834.588.000,00	96,82	27.398.298,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.006.075,00	70.019.426,00	98,61	986.649,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.122.000,00	47.973.000,00	92,04	4.149.000,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.121.868.000,00	1.091.214.780,00	97,27	30.653.220,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.273.903.500,00	1.228.147.923,00	96,41	45.755.577,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.270.000,00	6.270.000,00	100,00	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.332.000,00	0,00	0,00	1.332.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.266.301.500,00	1.221.877.923,00	96,49	44.423.577,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	580.657.475,00	513.819.384,00	88,49	66.838.091,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	476.274.975,00	457.971.980,00	96,16	18.302.995,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.752.000,00	9.694.899,00	76,03	3.057.101,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91.630.500,00	46.152.505,00	50,37	45.477.995,00
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	9.882.046.682,00	9.304.214.764,00	94,15	577.831.918,00
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.882.046.682,00	9.304.214.764,00	94,15	577.831.918,00
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	42.867.000,00	38.549.000,00	89,93	4.318.000,00
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	4.179.464.568,00	3.908.570.747,00	93,52	270.893.821,00
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	547.831.000,00	538.713.300,00	98,34	9.117.700,00
	Pelayanan Informasi Publik	883.445.530,00	819.638.478,00	92,78	63.807.052,00
	Layanan Hubungan Media	3.113.862.080,00	2.981.957.981,00	95,76	131.904.099,00
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	435.870.902,00	400.055.258,00	91,78	35.815.644,00
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	678.705.602,00	616.730.000,00	90,87	61.975.602,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	12.622.736.412,00	11.870.034.630,00	94,04	752.701.782,00
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.622.736.412,00	11.870.034.630,00	94,04	752.701.782,00
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.838.953.632,00	1.818.975.369,00	98,91	19.978.263,00
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	8.297.171.374,00	7.828.029.761,00	94,35	469.141.613,00
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	558.473.326,00	555.674.575,00	99,50	2.798.751,00
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	903.863.700,00	758.418.908,00	83,91	145.444.792,00
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	505.048.380,00	419.937.319,00	83,15	85.111.061,00
	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	519.226.000,00	488.998.698,00	94,18	30.227.302,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	40.329.835.594,00	38.012.775.121,00	94,25	2.317.060.473,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	40.329.835.594,00	38.012.775.121,00	94,25	2.317.060.473,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.742.347.549,00	30.597.557.530,00	93,45	2.144.790.019,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	450.000,00	450.000,00	100,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	450.000,00	450.000,00	100,00	0,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.374.367.951,00	10.467.220.059,00	92,02	907.147.892,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.373.017.951,00	10.465.870.059,00	92,02	907.147.892,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	450.000,00	450.000,00	100,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	450.000,00	450.000,00	100,00	0,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	450.000,00	450.000,00	100,00	0,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.200.129.000,00	4.154.182.521,00	98,91	45.946.479,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.038.230.000,00	1.007.510.000,00	97,04	30.720.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.161.899.000,00	3.146.672.521,00	99,52	15.226.479,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.970.169.498,00	5.528.347.843,00	92,60	441.821.655,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	58.005.000,00	56.250.000,00	96,97	1.755.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.291.991.128,00	3.184.376.007,00	96,73	107.615.121,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	53.394.690,00	51.969.300,00	97,33	1.425.390,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	127.471.200,00	127.037.000,00	99,66	434.200,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.224.000,00	13.000.560,00	98,31	223.440,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT Pasar)	165.944.480,00	165.754.420,00	99,89	190.060,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.320.000,00	12.960.000,00	79,41	3.360.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.243.819.000,00	1.917.000.556,00	85,43	326.818.444,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	933.142.000,00	881.804.968,00	94,50	51.337.032,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	933.142.000,00	881.804.968,00	94,50	51.337.032,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.221.200.000,00	8.564.752.075,00	92,88	656.447.925,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.300.000,00	45.441.150,00	60,35	29.858.850,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT Pasar)	2.742.000.000,00	2.195.978.870,00	80,09	546.021.130,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.387.900.000,00	6.307.332.055,00	98,74	80.567.945,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.042.889.100,00	1.000.800.064,00	95,96	42.089.036,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	755.194.100,00	720.796.690,00	95,45	34.397.410,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.800.000,00	47.758.350,00	87,15	7.041.650,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	232.895.000,00	232.245.024,00	99,72	649.976,00
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	36.819.245,00	36.819.245,00	100,00	0,00
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	36.819.245,00	36.819.245,00	100,00	0,00
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	36.819.245,00	36.819.245,00	100,00	0,00
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	62.998.300,00	60.883.300,00	96,64	2.115.000,00
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	62.998.300,00	60.883.300,00	96,64	2.115.000,00
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	62.998.300,00	60.883.300,00	96,64	2.115.000,00
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	772.501.700,00	720.342.400,00	93,25	52.159.300,00
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	772.501.700,00	720.342.400,00	93,25	52.159.300,00
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	772.501.700,00	720.342.400,00	93,25	52.159.300,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	644.355.000,00	618.937.896,00	96,06	25.417.104,00
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	644.355.000,00	618.937.896,00	96,06	25.417.104,00
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	644.355.000,00	618.937.896,00	96,06	25.417.104,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	6.070.813.800,00	5.978.234.750,00	98,48	92.579.050,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	6.070.813.800,00	5.978.234.750,00	98,48	92.579.050,00
	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	6.070.813.800,00	5.978.234.750,00	98,48	92.579.050,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	18.775.872.408,00	17.864.518.539,00	95,15	911.353.869,00
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	18.775.872.408,00	17.864.518.539,00	95,15	911.353.869,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.109.345.381,00	11.271.337.053,00	93,08	838.008.328,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.973.977.447,00	6.304.360.073,00	90,40	669.617.374,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.973.977.447,00	6.304.360.073,00	90,40	669.617.374,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.671.000,00	57.114.370,00	84,40	10.556.630,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	67.671.000,00	57.114.370,00	84,40	10.556.630,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.112.223.129,00	2.085.934.901,00	98,76	26.288.228,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.150.605.643,00	1.144.944.395,00	99,51	5.661.248,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	164.788.745,00	147.299.940,00	89,39	17.488.805,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.107.216,00	49.268.045,00	94,55	2.839.171,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	594.727.000,00	594.722.021,00	100,00	4.979,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	149.994.525,00	149.700.500,00	99,80	294.025,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.104.334.716,00	1.993.786.603,00	94,75	110.548.113,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.790.000,00	7.790.000,00	100,00	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	405.649.200,00	347.587.008,00	85,69	58.062.192,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.690.895.516,00	1.638.409.595,00	96,90	52.485.921,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	851.139.089,00	830.141.106,00	97,53	20.997.983,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	307.832.000,00	301.691.464,00	98,01	6.140.536,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.860.000,00	97.819.742,00	97,96	2.040.258,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	443.447.089,00	430.629.900,00	97,11	12.817.189,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	448.293.816,00	447.003.200,00	99,71	1.290.616,00
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	62.323.000,00	61.721.200,00	99,03	601.800,00
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	62.323.000,00	61.721.200,00	99,03	601.800,00
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	385.970.816,00	385.282.000,00	99,82	688.816,00
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	385.970.816,00	385.282.000,00	99,82	688.816,00
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.962.230.220,00	1.946.302.078,00	99,19	15.928.142,00
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.962.230.220,00	1.946.302.078,00	99,19	15.928.142,00
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1.962.230.220,00	1.946.302.078,00	99,19	15.928.142,00
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.143.054.623,00	1.131.364.868,00	98,98	11.689.755,00
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.143.054.623,00	1.131.364.868,00	98,98	11.689.755,00
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	545.742.323,00	544.709.549,00	99,81	1.032.774,00
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	283.132.965,00	274.130.354,00	96,82	9.002.611,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	314.179.335,00	312.524.965,00	99,47	1.654.370,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	804.839.013,00	789.042.498,00	98,04	15.796.515,00
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	804.839.013,00	789.042.498,00	98,04	15.796.515,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	99.904.255,00	99.506.650,00	99,60	397.605,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	575.330.610,00	563.100.762,00	97,87	12.229.848,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	129.604.148,00	126.435.086,00	97,55	3.169.062,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	2.308.109.355,00	2.279.468.842,00	98,76	28.640.513,00
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.308.109.355,00	2.279.468.842,00	98,76	28.640.513,00
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2.308.109.355,00	2.279.468.842,00	98,76	28.640.513,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	66.138.850.000,00	61.841.007.348,00	93,50	4.297.842.652,00
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	66.138.850.000,00	61.841.007.348,00	93,50	4.297.842.652,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.469.550.845,00	18.411.635.148,00	94,57	1.057.915.697,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.520.000,00	36.941.660,00	95,90	1.578.340,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.520.000,00	36.941.660,00	95,90	1.578.340,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.853.091.118,00	6.402.819.669,00	93,43	450.271.449,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.852.091.118,00	6.401.819.669,00	93,43	450.271.449,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.376.293.180,00	1.366.629.403,00	99,30	9.663.777,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	615.760.180,00	609.992.600,00	99,06	5.767.580,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	760.533.000,00	756.636.803,00	99,49	3.896.197,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.402.752.247,00	3.389.132.746,00	99,60	13.619.501,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.342.416.566,00	2.330.773.975,00	99,50	11.642.591,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.928.987,00	71.681.840,00	99,66	247.147,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	104.888.694,00	104.197.500,00	99,34	691.194,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.280.000,00	19.480.000,00	96,06	800.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	863.238.000,00	862.999.431,00	99,97	238.569,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.241.340.000,00	1.146.060.000,00	92,32	95.280.000,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	525.440.000,00	502.590.000,00	95,65	22.850.000,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	715.900.000,00	643.470.000,00	89,88	72.430.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.986.131.100,00	3.567.077.220,00	89,49	419.053.880,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.500.000,00	30.500.000,00	100,00	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.101.600.000,00	845.603.154,00	76,76	255.996.846,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.854.031.100,00	2.690.974.066,00	94,29	163.057.034,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.571.423.200,00	2.502.974.450,00	97,34	68.448.750,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	635.557.100,00	579.728.875,00	91,22	55.828.225,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	275.145.000,00	266.543.575,00	96,87	8.601.425,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.660.721.100,00	1.656.702.000,00	99,76	4.019.100,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	5.150.206.120,00	5.036.479.064,00	97,79	113.727.056,00
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	4.950.402.120,00	4.842.221.364,00	97,81	108.180.756,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	406.032.000,00	395.938.745,00	97,51	10.093.255,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	2.908.153.976,00	2.822.026.799,00	97,04	86.127.177,00
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1.636.216.144,00	1.624.255.820,00	99,27	11.960.324,00
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	199.804.000,00	194.257.700,00	97,22	5.546.300,00
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	199.804.000,00	194.257.700,00	97,22	5.546.300,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	39.131.774.021,00	36.078.713.142,00	92,20	3.053.060.879,00
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.422.241.000,00	6.091.194.296,00	82,07	1.331.046.704,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	7.422.241.000,00	6.091.194.296,00	82,07	1.331.046.704,00
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.300.153.549,00	12.417.005.773,00	93,36	883.147.776,00
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	8.704.739.271,00	8.165.558.463,00	93,81	539.180.808,00
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	4.595.414.278,00	4.251.447.310,00	92,51	343.966.968,00
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	12.610.227.800,00	12.422.688.957,00	98,51	187.538.843,00
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	1.423.670.800,00	1.330.149.371,00	93,43	93.521.429,00
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	11.186.557.000,00	11.092.539.586,00	99,16	94.017.414,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	4.193.706.436,00	3.639.217.547,00	86,78	554.488.889,00
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	4.193.706.436,00	3.639.217.547,00	86,78	554.488.889,00
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1.605.445.236,00	1.508.606.569,00	93,97	96.838.667,00
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1.605.445.236,00	1.508.606.569,00	93,97	96.838.667,00
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.387.319.014,00	2.314.179.994,00	96,94	73.139.020,00
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.387.319.014,00	2.314.179.994,00	96,94	73.139.020,00
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	2.387.319.014,00	2.314.179.994,00	96,94	73.139.020,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	374.256.000,00	347.428.197,00	92,83	26.827.803,00
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	374.256.000,00	347.428.197,00	92,83	26.827.803,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	374.256.000,00	347.428.197,00	92,83	26.827.803,00
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	374.256.000,00	347.428.197,00	92,83	26.827.803,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	329.846.000,00	303.305.697,00	91,95	26.540.303,00
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	44.410.000,00	44.122.500,00	99,35	287.500,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	464.869.010,00	439.125.350,00	94,46	25.743.660,00
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	464.869.010,00	439.125.350,00	94,46	25.743.660,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	464.869.010,00	439.125.350,00	94,46	25.743.660,00
	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	464.869.010,00	439.125.350,00	94,46	25.743.660,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	332.350.010,00	315.365.297,00	94,89	16.984.713,00
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	132.519.000,00	123.760.053,00	93,39	8.758.947,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	16.342.518.998,00	14.993.576.500,00	91,75	1.348.942.498,00
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	16.342.518.998,00	14.993.576.500,00	91,75	1.348.942.498,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	12.312.795.190,00	11.290.526.328,00	91,70	1.022.268.862,00
	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.370.738.300,00	2.183.048.949,00	92,08	187.689.351,00
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	2.370.738.300,00	2.183.048.949,00	92,08	187.689.351,00
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.942.056.890,00	9.107.477.379,00	91,61	834.579.511,00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	9.942.056.890,00	9.107.477.379,00	91,61	834.579.511,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	3.355.619.000,00	3.106.008.172,00	92,56	249.610.828,00
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.355.619.000,00	3.106.008.172,00	92,56	249.610.828,00
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	3.355.619.000,00	3.106.008.172,00	92,56	249.610.828,00
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	674.104.808,00	597.042.000,00	88,57	77.062.808,00
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	674.104.808,00	597.042.000,00	88,57	77.062.808,00
	Pelindungan Cagar Budaya	674.104.808,00	597.042.000,00	88,57	77.062.808,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	14.665.658.121,00	13.684.202.632,00	93,31	981.455.489,00
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	14.665.658.121,00	13.684.202.632,00	93,31	981.455.489,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.616.549.374,00	11.799.690.315,00	93,53	816.859.059,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.456.068.763,00	5.805.305.467,00	89,92	650.763.296,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.456.068.763,00	5.805.305.467,00	89,92	650.763.296,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88.692.000,00	80.190.000,00	90,41	8.502.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	88.692.000,00	80.190.000,00	90,41	8.502.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.871.610.723,00	1.837.137.379,00	98,16	34.473.344,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.410.243,00	13.080.880,00	97,54	329.363,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	927.167.528,00	898.501.950,00	96,91	28.665.578,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.017.034,00	77.942.553,00	98,64	1.074.481,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	112.537.407,00	108.805.412,00	96,68	3.731.995,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	739.478.511,00	738.806.584,00	99,91	671.927,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.020.000,00	4.823.600,00	96,09	196.400,00
	Pengadaan Mebel	5.020.000,00	4.823.600,00	96,09	196.400,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.574.383.800,00	2.505.693.015,00	97,33	68.690.785,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.780.000,00	10.780.000,00	100,00	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	505.160.800,00	466.971.615,00	92,44	38.189.185,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.058.443.000,00	2.027.941.400,00	98,52	30.501.600,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.620.774.088,00	1.566.540.854,00	96,65	54.233.234,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	435.260.500,00	400.930.829,00	92,11	34.329.671,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.122.500,00	43.202.734,00	97,92	919.766,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.141.391.088,00	1.122.407.291,00	98,34	18.983.797,00
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.049.108.747,00	1.884.512.317,00	91,97	164.596.430,00
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.382.961.267,00	1.297.911.647,00	93,85	85.049.620,00
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	154.999.983,00	150.069.700,00	96,82	4.930.283,00
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	269.999.944,00	254.243.720,00	94,16	15.756.224,00
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	95.890.000,00	95,89	4.110.000,00
	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	132.963.650,00	109.628.500,00	82,45	23.335.150,00
	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000,00	96.529.826,00	96,53	3.470.174,00
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	95.822.081,00	95,82	4.177.919,00
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	289.999.461,00	275.055.000,00	94,85	14.944.461,00
	Pengembangan Bahan Pustaka	99.999.200,00	94.258.400,00	94,26	5.740.800,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	109.999.118,00	105.357.820,00	95,78	4.641.298,00
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.999.911,00	21.056.600,00	84,23	3.943.311,00
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	666.147.480,00	586.600.670,00	88,06	79.546.810,00
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	289.148.000,00	258.275.989,00	89,32	30.872.011,00
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	198.999.880,00	174.347.900,00	87,61	24.651.980,00
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	104.000.000,00	94.047.500,00	90,43	9.952.500,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	73.999.600,00	59.929.281,00	80,99	14.070.319,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1.666.086.207,00	1.549.584.532,00	93,01	116.501.675,00
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.666.086.207,00	1.549.584.532,00	93,01	116.501.675,00
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.633.972.985,00	1.527.527.532,00	93,49	106.445.453,00
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	426.308.780,00	365.399.790,00	85,71	60.908.990,00
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	26.329.912,00	25.132.400,00	95,45	1.197.512,00
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	149.978.880,00	142.532.000,00	95,03	7.446.880,00
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	249.999.988,00	197.735.390,00	79,09	52.264.598,00
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	352.206.148,00	321.042.600,00	91,15	31.163.548,00
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	352.206.148,00	321.042.600,00	91,15	31.163.548,00
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	855.458.057,00	841.085.142,00	98,32	14.372.915,00
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	150.909.596,00	146.413.880,00	97,02	4.495.716,00
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	704.548.461,00	694.671.262,00	98,60	9.877.199,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	29.121.246,00	20.237.000,00	69,49	8.884.246,00
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	9.999.696,00	9.702.000,00	97,02	297.696,00
	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	9.999.696,00	9.702.000,00	97,02	297.696,00
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	9.129.632,00	5.785.000,00	63,37	3.344.632,00
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	9.029.792,00	5.785.000,00	64,07	3.244.792,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	99.840,00	0,00	0,00	99.840,00
	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	9.991.918,00	4.750.000,00	47,54	5.241.918,00
	penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	9.991.918,00	4.750.000,00	47,54	5.241.918,00
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	2.991.976,00	1.820.000,00	60,83	1.171.976,00
	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	2.991.976,00	1.820.000,00	60,83	1.171.976,00
	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	1.992.064,00	1.820.000,00	91,36	172.064,00
	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	999.912,00	0,00	0,00	999.912,00
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	51.265.603.500,00	48.011.958.307,00	93,65	3.253.645.193,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	9.229.315.557,00	8.552.512.755,00	92,67	676.802.802,00
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	9.229.315.557,00	8.552.512.755,00	92,67	676.802.802,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4.549.369.537,00	4.268.041.725,00	93,82	281.327.812,00
	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.748.613.773,00	3.523.899.320,00	94,01	224.714.453,00
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	3.600.555.713,00	3.382.065.795,00	93,93	218.489.918,00
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	148.058.060,00	141.833.525,00	95,80	6.224.535,00
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	800.755.764,00	744.142.405,00	92,93	56.613.359,00
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (UPT Tempat Pelelangan Ikan)	800.755.764,00	744.142.405,00	92,93	56.613.359,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.278.456.698,00	3.040.269.475,00	92,73	238.187.223,00
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	2.128.423.998,00	2.062.275.348,00	96,89	66.148.650,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil (UPT Balai Benih Ikan)	1.449.133.858,00	1.412.831.781,00	97,49	36.302.077,00
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	679.290.140,00	649.443.567,00	95,61	29.846.573,00
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.150.032.700,00	977.994.127,00	85,04	172.038.573,00
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.047.280,00	45.605.880,00	91,13	4.441.400,00
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.050.000.385,00	885.107.847,00	84,30	164.892.538,00
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	49.985.035,00	47.280.400,00	94,59	2.704.635,00
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.401.489.322,00	1.244.201.555,00	88,78	157.287.767,00
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	798.759.290,00	684.232.855,00	85,66	114.526.435,00
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	798.759.290,00	684.232.855,00	85,66	114.526.435,00
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	602.730.032,00	559.968.700,00	92,91	42.761.332,00
	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	324.339.180,00	297.722.500,00	91,79	26.616.680,00
	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	278.390.852,00	262.246.200,00	94,20	16.144.652,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	10.354.806.110,00	9.240.255.849,00	89,24	1.114.550.261,00
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	10.354.806.110,00	9.240.255.849,00	89,24	1.114.550.261,00
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.650.984.390,00	2.460.024.990,00	92,80	190.959.400,00
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	118.040.584,00	98.739.600,00	83,65	19.300.984,00
	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	118.040.584,00	98.739.600,00	83,65	19.300.984,00
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	855.241.372,00	834.017.200,00	97,52	21.224.172,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	855.241.372,00	834.017.200,00	97,52	21.224.172,00
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.534.589.434,00	1.448.717.390,00	94,40	85.872.044,00
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.449.449.434,00	1.376.182.390,00	94,95	73.267.044,00
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	85.140.000,00	72.535.000,00	85,19	12.605.000,00
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	143.113.000,00	78.550.800,00	54,89	64.562.200,00
	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	143.113.000,00	78.550.800,00	54,89	64.562.200,00
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.794.034.568,00	4.129.136.377,00	86,13	664.898.191,00
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4.794.034.568,00	4.129.136.377,00	86,13	664.898.191,00
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	916.728.388,00	829.549.000,00	90,49	87.179.388,00
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	3.076.963.620,00	2.732.654.277,00	88,81	344.309.343,00
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	49.902.000,00	49.515.700,00	99,23	386.300,00
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	750.440.560,00	517.417.400,00	68,95	233.023.160,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	749.750.750,00	650.664.185,00	86,78	99.086.565,00
	Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	508.070.150,00	466.389.550,00	91,80	41.680.600,00
	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	508.070.150,00	466.389.550,00	91,80	41.680.600,00
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	241.680.600,00	184.274.635,00	76,25	57.405.965,00
	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	60.510.600,00	36.615.235,00	60,51	23.895.365,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	181.170.000,00	147.659.400,00	81,50	33.510.600,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.160.036.402,00	2.000.430.297,00	92,61	159.606.105,00
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	2.017.479.402,00	1.860.266.297,00	92,21	157.213.105,00
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	581.676.762,00	499.993.107,00	85,96	81.683.655,00
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1.269.283.000,00	1.214.777.940,00	95,71	54.505.060,00
	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	148.571.640,00	133.275.250,00	89,70	15.296.390,00
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	17.948.000,00	12.220.000,00	68,09	5.728.000,00
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	142.557.000,00	140.164.000,00	98,32	2.393.000,00
	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	142.557.000,00	140.164.000,00	98,32	2.393.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6.253.519.053,00	5.581.538.813,00	89,25	671.980.240,00
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	6.253.519.053,00	5.581.538.813,00	89,25	671.980.240,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.339.641.818,00	2.042.044.490,00	87,28	297.597.328,00
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.319.642.396,00	1.058.057.600,00	80,18	261.584.796,00
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	68.702.832,00	66.568.100,00	96,89	2.134.732,00
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.250.939.564,00	991.489.500,00	79,26	259.450.064,00
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota	119.999.634,00	108.216.990,00	90,18	11.782.644,00
	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	119.999.634,00	108.216.990,00	90,18	11.782.644,00
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	899.999.788,00	875.769.900,00	97,31	24.229.888,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	899.999.788,00	875.769.900,00	97,31	24.229.888,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	787.854.681,00	769.449.378,00	97,66	18.405.303,00
	Pembangunan Prasarana Pertanian	787.854.681,00	769.449.378,00	97,66	18.405.303,00
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (UPT Rumah Potong Hewan)	287.854.961,00	276.824.728,00	96,17	11.030.233,00
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	499.999.720,00	492.624.650,00	98,52	7.375.070,00
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.197.219.441,00	1.057.749.122,00	88,35	139.470.319,00
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	896.659.989,00	841.028.917,00	93,80	55.631.072,00
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	896.659.989,00	841.028.917,00	93,80	55.631.072,00
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.544.100,00	99,54	455.900,00
	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	100.000.000,00	99.544.100,00	99,54	455.900,00
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.559.452,00	117.176.105,00	58,42	83.383.347,00
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	200.559.452,00	117.176.105,00	58,42	83.383.347,00
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	99.271.688,00	93.524.488,00	94,21	5.747.200,00
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	99.271.688,00	93.524.488,00	94,21	5.747.200,00
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	99.271.688,00	93.524.488,00	94,21	5.747.200,00
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.829.531.425,00	1.618.771.335,00	88,48	210.760.090,00
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.829.531.425,00	1.618.771.335,00	88,48	210.760.090,00
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.506.867.416,00	1.350.536.780,00	89,63	156.330.636,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	322.664.009,00	268.234.555,00	83,13	54.429.454,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	18.726.755.786,00	18.026.273.220,00	96,26	700.482.566,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	18.726.755.786,00	18.026.273.220,00	96,26	700.482.566,00
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	63.690.000,00	58.253.300,00	91,46	5.436.700,00
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	63.690.000,00	58.253.300,00	91,46	5.436.700,00
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	63.690.000,00	58.253.300,00	91,46	5.436.700,00
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	15.408.014.220,00	14.776.415.774,00	95,90	631.598.446,00
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	13.078.874.220,00	12.462.754.454,00	95,29	616.119.766,00
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	10.236.242.730,00	9.784.350.760,00	95,59	451.891.970,00
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPT Pasar)	2.842.631.490,00	2.678.403.694,00	94,22	164.227.796,00
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	2.329.140.000,00	2.313.661.320,00	99,34	15.478.680,00
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (UPT Pasar)	2.329.140.000,00	2.313.661.320,00	99,34	15.478.680,00
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	625.037.740,00	615.015.374,00	98,40	10.022.366,00
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	625.037.740,00	615.015.374,00	98,40	10.022.366,00
	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	625.037.740,00	615.015.374,00	98,40	10.022.366,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.682.988.750,00	1.641.504.815,00	97,54	41.483.935,00
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.682.988.750,00	1.641.504.815,00	97,54	41.483.935,00
	Pameran Dagang Nasional	1.428.628.750,00	1.402.082.365,00	98,14	26.546.385,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	254.360.000,00	239.422.450,00	94,13	14.937.550,00
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	947.025.076,00	935.083.957,00	98,74	11.941.119,00
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	947.025.076,00	935.083.957,00	98,74	11.941.119,00
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	600.400.276,00	591.304.912,00	98,49	9.095.364,00
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	346.624.800,00	343.779.045,00	99,18	2.845.755,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	6.701.206.994,00	6.611.377.670,00	98,66	89.829.324,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	6.701.206.994,00	6.611.377.670,00	98,66	89.829.324,00
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5.132.167.829,00	5.084.432.786,00	99,07	47.735.043,00
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	5.132.167.829,00	5.084.432.786,00	99,07	47.735.043,00
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	249.995.800,00	249.661.700,00	99,87	334.100,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1.339.456.000,00	1.337.292.663,00	99,84	2.163.337,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.542.716.029,00	3.497.478.423,00	98,72	45.237.606,00
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	575.330.665,00	562.489.283,00	97,77	12.841.382,00
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	575.330.665,00	562.489.283,00	97,77	12.841.382,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	575.330.665,00	562.489.283,00	97,77	12.841.382,00
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	993.708.500,00	964.455.601,00	97,06	29.252.899,00
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	993.708.500,00	964.455.601,00	97,06	29.252.899,00
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	993.708.500,00	964.455.601,00	97,06	29.252.899,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	270.590.741.231,00	243.301.899.014,00	89,92	27.288.842.217,00
	SEKRETARIAT DAERAH	182.464.608.378,00	161.164.467.683,00	88,33	21.300.140.695,00
	SEKRETARIAT DAERAH	182.464.608.378,00	161.164.467.683,00	88,33	21.300.140.695,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	113.679.829.760,00	103.023.814.240,00	90,63	10.656.015.520,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	668.257.100,00	643.350.530,00	96,27	24.906.570,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	668.257.100,00	643.350.530,00	96,27	24.906.570,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.357.693.856,00	22.205.945.152,00	91,17	2.151.748.704,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.357.693.856,00	22.205.945.152,00	91,17	2.151.748.704,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.780.060.435,00	1.749.368.315,00	98,28	30.692.120,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	718.426.435,00	707.677.685,00	98,50	10.748.750,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.061.634.000,00	1.041.690.630,00	98,12	19.943.370,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.940.814.739,00	18.641.853.530,00	89,02	2.298.961.209,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	369.105.979,00	365.581.911,00	99,05	3.524.068,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.126.874.040,00	9.397.412.310,00	92,80	729.461.730,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	154.716.720,00	136.831.701,00	88,44	17.885.019,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	488.858.500,00	483.952.000,00	99,00	4.906.500,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	550.961.500,00	453.614.925,00	82,33	97.346.575,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.250.298.000,00	7.804.460.683,00	84,37	1.445.837.317,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.698.859.358,00	12.178.907.849,00	95,91	519.951.509,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.168.733.994,00	10.730.334.312,00	96,07	438.399.682,00
	Pengadaan Mebel	1.530.125.364,00	1.448.573.537,00	94,67	81.551.827,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.268.324.634,00	26.936.373.114,00	88,99	3.331.951.520,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.170.000,00	25.331.700,00	96,80	838.300,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.321.867.434,00	6.849.117.630,00	82,30	1.472.749.804,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.920.287.200,00	20.061.923.784,00	91,52	1.858.363.416,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.079.134.570,00	7.456.937.037,00	92,30	622.197.533,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	942.170.500,00	913.122.800,00	96,92	29.047.700,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.864.004.880,00	2.818.414.656,00	98,41	45.590.224,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.446.482.190,00	915.011.052,00	63,26	531.471.138,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.826.477.000,00	2.810.388.529,00	99,43	16.088.471,00
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	933.709.094,00	917.529.278,00	98,27	16.179.816,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	775.709.094,00	761.529.278,00	98,17	14.179.816,00
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	158.000.000,00	156.000.000,00	98,73	2.000.000,00
	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	3.827.605.990,00	3.482.142.870,00	90,97	345.463.120,00
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.158.579.674,00	1.964.823.214,00	91,02	193.756.460,00
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.669.026.316,00	1.517.319.656,00	90,91	151.706.660,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penataan Organisasi	907.413.070,00	842.088.181,00	92,80	65.324.889,00
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	122.022.640,00	114.653.404,00	93,96	7.369.236,00
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	506.786.718,00	486.968.739,00	96,09	19.817.979,00
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	278.603.712,00	240.466.038,00	86,31	38.137.674,00
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	9.217.956.914,00	7.969.318.384,00	86,45	1.248.638.530,00
	Fasilitasi Keprotokolan	6.885.349.874,00	5.994.352.817,00	87,06	890.997.057,00
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	569.830.094,00	506.851.787,00	88,95	62.978.307,00
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.762.776.946,00	1.468.113.780,00	83,28	294.663.166,00
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	63.873.642.634,00	53.668.348.847,00	84,02	10.205.293.787,00
	Administrasi Tata Pemerintahan	2.240.701.818,00	2.015.907.095,00	89,97	224.794.723,00
	Penataan Administrasi Pemerintahan	489.487.800,00	428.154.296,00	87,47	61.333.504,00
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1.524.764.018,00	1.383.413.257,00	90,73	141.350.761,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	226.450.000,00	204.339.542,00	90,24	22.110.458,00
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	54.830.940.816,00	45.944.300.762,00	83,79	8.886.640.054,00
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	47.805.237.830,00	41.954.892.519,00	87,76	5.850.345.311,00
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1.315.391.894,00	1.035.610.691,00	78,73	279.781.203,00
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	5.710.311.092,00	2.953.797.552,00	51,73	2.756.513.540,00
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	6.052.464.000,00	4.995.632.593,00	82,54	1.056.831.407,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	572.831.000,00	563.131.800,00	98,31	9.699.200,00
	Fasilitasi Bantuan Hukum	5.055.106.000,00	4.010.439.675,00	79,33	1.044.666.325,00
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	424.527.000,00	422.061.118,00	99,42	2.465.882,00
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	749.536.000,00	712.508.397,00	95,06	37.027.603,00
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	549.622.000,00	524.838.798,00	95,49	24.783.202,00
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	199.914.000,00	187.669.599,00	93,88	12.244.401,00
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.911.135.984,00	4.472.304.596,00	91,06	438.831.388,00
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	548.479.733,00	533.690.646,00	97,30	14.789.087,00
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	99.993.317,00	99.801.370,00	99,81	191.947,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	448.486.416,00	433.889.276,00	96,75	14.597.140,00
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	938.708.836,00	857.652.244,00	91,37	81.056.592,00
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	333.413.296,00	318.005.832,00	95,38	15.407.464,00
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	155.909.050,00	148.615.288,00	95,32	7.293.762,00
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	449.386.490,00	391.031.124,00	87,01	58.355.366,00
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.993.567.475,00	2.672.032.905,00	89,26	321.534.570,00
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.293.908.875,00	2.007.723.237,00	87,52	286.185.638,00
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	399.969.800,00	392.396.008,00	98,11	7.573.792,00
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	299.688.800,00	271.913.660,00	90,73	27.775.140,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	430.379.940,00	408.928.801,00	95,02	21.451.139,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	53.255.000,00	52.326.441,00	98,26	928.559,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	268.897.600,00	251.345.050,00	93,47	17.552.550,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	108.227.340,00	105.257.310,00	97,26	2.970.030,00
	SEKRETARIAT DPRD	88.126.132.853,00	82.137.431.331,00	93,20	5.988.701.522,00
	SEKRETARIAT DPRD	88.126.132.853,00	82.137.431.331,00	93,20	5.988.701.522,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	63.312.432.253,00	58.807.233.698,00	92,88	4.505.198.555,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	438.715.095,00	231.878.400,00	52,85	206.836.695,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.226.000,00	17.978.600,00	68,55	8.247.400,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.701.000,00	7.312.400,00	62,49	4.388.600,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.788.095,00	206.587.400,00	51,55	194.200.695,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.350.718.593,00	5.876.058.594,00	92,53	474.659.999,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.315.615.593,00	5.854.500.994,00	92,70	461.114.599,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	11.701.000,00	6.753.600,00	57,72	4.947.400,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.701.000,00	6.616.600,00	56,55	5.084.400,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11.701.000,00	8.187.400,00	69,97	3.513.600,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.026.931.320,00	3.380.856.669,00	83,96	646.074.651,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.667.636.320,00	1.471.256.279,00	88,22	196.380.041,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.269.085.000,00	1.909.600.390,00	84,16	359.484.610,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90.210.000,00	0,00	0,00	90.210.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.500.254.148,00	12.921.043.041,00	89,11	1.579.211.107,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	88.141.018,00	82.530.745,00	93,63	5.610.273,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.299.256.353,00	6.469.173.263,00	88,63	830.083.090,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	287.048.647,00	252.493.000,00	87,96	34.555.647,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	266.691.058,00	254.830.000,00	95,55	11.861.058,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	917.035.872,00	849.149.075,00	92,60	67.886.797,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	121.678.200,00	44.171.400,00	36,30	77.506.800,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.520.403.000,00	4.968.695.558,00	90,01	551.707.442,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.500.531.592,00	1.089.984.950,00	72,64	410.546.642,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	583.452.500,00	312.490.000,00	53,56	270.962.500,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	390.850.000,00	290.070.000,00	74,22	100.780.000,00
	Pengadaan Mebel	500.498.737,00	462.638.650,00	92,44	37.860.087,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.730.355,00	24.786.300,00	96,33	944.055,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.920.246.840,00	9.582.148.542,00	96,59	338.098.298,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.995.000,00	16.870.000,00	93,75	1.125.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.741.650.000,00	1.737.547.124,00	99,76	4.102.876,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	514.954.580,00	412.407.710,00	80,09	102.546.870,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.645.647.260,00	7.415.323.708,00	96,99	230.323.552,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.518.847.441,00	6.289.247.577,00	96,48	229.599.864,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	196.639.182,00	193.845.876,00	98,58	2.793.306,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	689.542.644,00	581.130.019,00	84,28	108.412.625,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.095.518.455,00	4.079.176.392,00	99,60	16.342.063,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.225.160,00	372.881.714,00	93,17	27.343.446,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.136.922.000,00	1.062.213.576,00	93,43	74.708.424,00
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	17.351.802.122,00	17.207.630.275,00	99,17	144.171.847,00
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	16.916.202.122,00	16.865.342.675,00	99,70	50.859.447,00
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	359.590.000,00	340.209.600,00	94,61	19.380.400,00
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	76.010.000,00	2.078.000,00	2,73	73.932.000,00
	Layanan Administrasi DPRD	2.704.385.102,00	2.228.385.650,00	82,40	475.999.452,00
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	2.602.950,00	0,00	0,00	2.602.950,00
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.683.790.000,00	1.286.948.250,00	76,43	396.841.750,00
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.017.992.152,00	941.437.400,00	92,48	76.554.752,00
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	24.813.700.600,00	23.330.197.633,00	94,02	1.483.502.967,00
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.561.744.200,00	1.245.829.343,00	79,77	315.914.857,00



No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	141.910.000,00	85.357.275,00	60,15	56.552.725,00
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	519.037.000,00	268.459.318,00	51,72	250.577.682,00
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	16.750.000,00	8.640.000,00	51,58	8.110.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	872.322.200,00	872.077.950,00	99,97	244.250,00
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	11.725.000,00	11.294.800,00	96,33	430.200,00
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	515.663.400,00	360.523.450,00	69,91	155.139.950,00
	Pembahasan KUA dan PPAS	88.379.800,00	71.525.600,00	80,93	16.854.200,00
	Pembahasan APBD	145.527.800,00	99.257.750,00	68,21	46.270.050,00
	Pembahasan APBD Perubahan	145.527.800,00	80.342.500,00	55,21	65.185.300,00
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	136.228.000,00	109.397.600,00	80,30	26.830.400,00
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	206.657.000,00	138.955.750,00	67,24	67.701.250,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	21.027.000,00	18.270.000,00	86,89	2.757.000,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	76.905.000,00	66.736.200,00	86,78	10.168.800,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	30.100.000,00	22.666.100,00	75,30	7.433.900,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	30.100.000,00	7.247.450,00	24,08	22.852.550,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	30.100.000,00	11.781.000,00	39,14	18.319.000,00
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5.695.000,00	0,00	0,00	5.695.000,00
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	12.730.000,00	12.255.000,00	96,27	475.000,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Peningkatan Kapasitas DPRD	8.085.702.500,00	7.489.786.175,00	92,63	595.916.325,00
	Pendalaman Tugas DPRD	650.060.000,00	393.810.000,00	60,58	256.250.000,00
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	6.405.197.500,00	6.186.456.175,00	96,58	218.741.325,00
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	612.235.000,00	531.110.000,00	86,75	81.125.000,00
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	418.210.000,00	378.410.000,00	90,48	39.800.000,00
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.188.756.500,00	1.854.984.040,00	84,75	333.772.460,00
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	21.730.000,00	21.129.000,00	97,23	601.000,00
	Pelaksanaan Reses	2.167.026.500,00	1.833.855.040,00	84,63	333.171.460,00
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	2.680.000,00	2.095.500,00	78,19	584.500,00
	Pengawasan Kode Etik DPRD	2.680.000,00	2.095.500,00	78,19	584.500,00
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	19.076.000,00	9.889.600,00	51,84	9.186.400,00
	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	15.056.000,00	9.889.600,00	65,69	5.166.400,00
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	4.020.000,00	0,00	0,00	4.020.000,00
	Fasilitasi Tugas DPRD	12.233.421.000,00	12.228.133.775,00	99,96	5.287.225,00
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12.233.421.000,00	12.228.133.775,00	99,96	5.287.225,00
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	139.324.679.031,00	97.993.805.770,00	70,33	41.330.873.261,00
	PERENCANAAN	21.131.743.828,00	18.823.819.745,00	89,08	2.307.924.083,00
	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	21.131.743.828,00	18.823.819.745,00	89,08	2.307.924.083,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.749.984.894,00	14.131.911.601,00	89,73	1.618.073.293,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.300.443.321,00	6.717.459.159,00	92,01	582.984.162,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.300.443.321,00	6.717.459.159,00	92,01	582.984.162,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.548.165.500,00	1.282.642.575,00	82,85	265.522.925,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	376.798.500,00	363.992.000,00	96,60	12.806.500,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.171.367.000,00	918.650.575,00	78,43	252.716.425,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.295.382.263,00	3.739.208.450,00	87,05	556.173.813,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.187.030,00	5.187.030,00	100,00	0,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.411.211.673,00	1.273.120.750,00	90,21	138.090.923,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.484.360,00	44.484.360,00	100,00	0,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.949.200,00	40.861.800,00	74,36	14.087.400,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.250.000,00	21.325.000,00	66,12	10.925.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.747.300.000,00	2.354.229.510,00	85,69	393.070.490,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	509.748.825,00	430.172.500,00	84,39	79.576.325,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	110.171.460,00	100.440.000,00	91,17	9.731.460,00
	Pengadaan Mebel	399.577.365,00	329.732.500,00	82,52	69.844.865,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	632.347.000,00	587.716.560,00	92,94	44.630.440,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	0,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	622.847.000,00	578.216.560,00	92,83	44.630.440,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.463.897.985,00	1.374.712.357,00	93,91	89.185.628,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	501.233.000,00	467.654.657,00	93,30	33.578.343,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.820.000,00	7.120.000,00	27,58	18.700.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	936.844.985,00	899.937.700,00	96,06	36.907.285,00
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.903.447.408,00	2.383.107.912,00	82,08	520.339.496,00
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.205.784.204,00	1.860.268.640,00	84,34	345.515.564,00
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	15.075.000,00	15.008.000,00	99,56	67.000,00
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	75.119.000,00	56.464.600,00	75,17	18.654.400,00
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	11.926.000,00	11.917.100,00	99,93	8.900,00
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	113.792.725,00	105.397.760,00	92,62	8.394.965,00
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	7.705.000,00	4.017.000,00	52,13	3.688.000,00
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.982.166.479,00	1.667.464.180,00	84,12	314.702.299,00
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	258.206.808,00	157.634.948,00	61,05	100.571.860,00
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	47.157.000,00	28.043.700,00	59,47	19.113.300,00
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	62.364.368,00	29.875.568,00	47,90	32.488.800,00
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	148.685.440,00	99.715.680,00	67,06	48.969.760,00
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	439.456.396,00	365.204.324,00	83,10	74.252.072,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	60.018.852,00	60.018.852,00	100,00	0,00
	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	39.280.244,00	19.637.365,00	49,99	19.642.879,00
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	340.157.300,00	285.548.107,00	83,95	54.609.193,00
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.478.311.526,00	2.308.800.232,00	93,16	169.511.294,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	421.036.076,00	393.001.080,00	93,34	28.034.996,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63.149.000,00	53.444.742,00	84,63	9.704.258,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8.174.000,00	7.035.000,00	86,07	1.139.000,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	15.426.560,00	13.282.560,00	86,10	2.144.000,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	143.427.004,00	134.876.362,00	94,04	8.550.642,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	58.813.408,00	56.737.172,00	96,47	2.076.236,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14.126.472,00	12.451.472,00	88,14	1.675.000,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	19.056.400,00	16.376.400,00	85,94	2.680.000,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	98.863.232,00	98.797.372,00	99,93	65.860,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	464.790.460,00	401.747.387,00	86,44	63.043.073,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63.254.000,00	58.961.282,00	93,21	4.292.718,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	11.055.000,00	10.720.000,00	96,97	335.000,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	27.603.344,00	26.110.000,00	94,59	1.493.344,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	119.536.092,00	96.933.186,00	81,09	22.602.906,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6.825.572,00	5.984.000,00	87,67	841.572,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4.746.628,00	4.319.500,00	91,00	427.128,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	22.595.204,00	19.501.004,00	86,31	3.094.200,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	209.174.620,00	179.218.415,00	85,68	29.956.205,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.592.484.990,00	1.514.051.765,00	95,07	78.433.225,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24.463.500,00	23.738.800,00	97,04	724.700,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4.119.500,00	4.119.500,00	100,00	0,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	54.131.500,00	45.096.900,00	83,31	9.034.600,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	303.952.300,00	278.190.574,00	91,52	25.761.726,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7.702.000,00	6.362.000,00	82,60	1.340.000,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3.818.000,00	3.282.000,00	85,96	536.000,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5.649.000,00	5.582.000,00	98,81	67.000,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1.188.649.190,00	1.147.679.991,00	96,55	40.969.199,00
	KEUANGAN	91.792.978.407,00	54.451.229.256,00	59,32	37.341.749.151,00
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	28.059.030.838,00	23.742.904.496,00	84,62	4.316.126.342,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.041.042.642,00	17.845.026.028,00	93,72	1.196.016.614,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.690.000,00	23.036.011,00	70,47	9.653.989,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.462.500,00	1.300.000,00	88,89	162.500,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.125.000,00	1.125.000,00	100,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.102.500,00	20.611.011,00	68,47	9.491.489,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.291.670.157,00	10.601.982.461,00	93,89	689.687.696,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.272.013.657,00	10.583.284.561,00	93,89	688.729.096,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.419.000,00	17.460.400,00	94,80	958.600,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.237.500,00	1.237.500,00	100,00	0,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	706.621.500,00	592.757.942,00	83,89	113.863.558,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	457.068.500,00	445.593.000,00	97,49	11.475.500,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	249.553.000,00	147.164.942,00	58,97	102.388.058,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.287.482.058,00	3.032.501.611,00	92,24	254.980.447,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.437.500,00	30.010.000,00	98,60	427.500,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	780.750.771,00	761.161.400,00	97,49	19.589.371,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	258.716.921,00	173.755.300,00	67,16	84.961.621,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	762.612.866,00	696.393.050,00	91,32	66.219.816,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.990.000,00	0,00	0,00	3.990.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.450.974.000,00	1.371.181.861,00	94,50	79.792.139,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	217.335.006,00	214.140.000,00	98,53	3.195.006,00
	Pengadaan Mebel	217.335.006,00	214.140.000,00	98,53	3.195.006,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.524.639.000,00	2.424.810.000,00	96,05	99.829.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	335.100.000,00	311.196.500,00	92,87	23.903.500,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.181.539.000,00	2.105.613.500,00	96,52	75.925.500,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	980.604.921,00	955.798.003,00	97,47	24.806.918,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	286.539.000,00	283.302.620,00	98,87	3.236.380,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	398.192.400,00	382.535.010,00	96,07	15.657.390,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.020.000,00	79.179.630,00	97,73	1.840.370,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	214.853.521,00	210.780.743,00	98,10	4.072.778,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	9.017.988.196,00	5.897.878.468,00	65,40	3.120.109.728,00
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.017.988.196,00	5.897.878.468,00	65,40	3.120.109.728,00
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1.330.258.160,00	1.125.653.014,00	84,62	204.605.146,00
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	377.812.016,00	295.763.250,00	78,28	82.048.766,00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2.013.321.260,00	1.910.715.000,00	94,90	102.606.260,00
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.089.868.670,00	597.130.385,00	54,79	492.738.285,00
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.852.059.670,00	82.012.000,00	4,43	1.770.047.670,00
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	673.915.390,00	581.418.100,00	86,27	92.497.290,00
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	941.188.915,00	836.684.440,00	88,90	104.504.475,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penagihan Pajak Daerah	245.136.995,00	213.144.440,00	86,95	31.992.555,00
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	291.470.000,00	96.232.000,00	33,02	195.238.000,00
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	202.957.120,00	159.125.839,00	78,40	43.831.281,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	63.733.947.569,00	30.708.324.760,00	48,18	33.025.622.809,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.649.329.727,00	18.492.352.647,00	89,55	2.156.977.080,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.886.350,00	19.250.000,00	96,80	636.350,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.745.450,00	7.500.000,00	96,83	245.450,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.395.450,00	4.200.000,00	95,55	195.450,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.745.450,00	7.550.000,00	97,48	195.450,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.809.226.150,00	8.187.162.088,00	92,94	622.064.062,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.473.594.750,00	7.885.559.089,00	93,06	588.035.661,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	326.720.500,00	293.085.499,00	89,71	33.635.001,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.395.450,00	4.200.000,00	95,55	195.450,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.515.450,00	4.317.500,00	95,62	197.950,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.720.450,00	2.550.000,00	93,73	170.450,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.720.450,00	2.550.000,00	93,73	170.450,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.134.039.000,00	1.813.368.399,00	84,97	320.670.601,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	331.236.000,00	326.552.000,00	98,59	4.684.000,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.802.803.000,00	1.486.816.399,00	82,47	315.986.601,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.935.567.526,00	4.238.850.062,00	85,88	696.717.464,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	69.209.968,00	64.826.800,00	93,67	4.383.168,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	807.482.597,00	787.760.700,00	97,56	19.721.897,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	128.669.010,00	126.744.410,00	98,50	1.924.600,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	190.228.707,00	184.927.200,00	97,21	5.301.507,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	215.875.399,00	141.800.688,00	65,69	74.074.711,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38.987.000,00	28.777.000,00	73,81	10.210.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.649.609.000,00	2.077.056.264,00	78,39	572.552.736,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	835.505.845,00	826.957.000,00	98,98	8.548.845,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	769.152.151,00	737.384.650,00	95,87	31.767.501,00
	Pengadaan Mebel	90.139.226,00	87.817.650,00	97,42	2.321.576,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	630.623.685,00	602.667.000,00	95,57	27.956.685,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.389.240,00	46.900.000,00	96,92	1.489.240,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.956.983.000,00	2.718.152.791,00	91,92	238.830.209,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.014.000,00	9.500.000,00	94,87	514.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000,00	342.706.321,00	68,54	157.293.679,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.446.969.000,00	2.365.946.470,00	96,69	81.022.530,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.021.755.100,00	775.634.657,00	75,91	246.120.443,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.430.500,00	39.878.745,00	98,64	551.755,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	510.402.600,00	432.710.012,00	84,78	77.692.588,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	244.140.000,00	102.810.000,00	42,11	141.330.000,00
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	201.782.000,00	200.235.900,00	99,23	1.546.100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	39.261.692.433,00	8.710.015.974,00	22,18	30.551.676.459,00
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	4.587.639.525,00	2.742.393.783,00	59,78	1.845.245.742,00
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	358.525.000,00	125.203.633,00	34,92	233.321.367,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	216.803.000,00	102.878.940,00	47,45	113.924.060,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	50.008.590,00	32.440.000,00	64,87	17.568.590,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	189.200.000,00	108.135.000,00	57,15	81.065.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.446.605.125,00	956.458.641,00	66,12	490.146.484,00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.163.426.475,00	653.430.528,00	56,16	509.995.947,00
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	448.937.755,00	273.869.875,00	61,00	175.067.880,00
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	231.191.500,00	197.100.490,00	85,25	34.091.010,00
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	343.999.000,00	255.542.586,00	74,29	88.456.414,00
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	35.081.080,00	9.980.000,00	28,45	25.101.080,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	103.862.000,00	27.354.090,00	26,34	76.507.910,00
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.236.196.352,00	856.700.551,00	69,30	379.495.801,00
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	91.880.000,00	68.974.320,00	75,07	22.905.680,00
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	38.637.363,00	26.023.900,00	67,35	12.613.463,00
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	141.199.000,00	57.127.071,00	40,46	84.071.929,00
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	109.890.024,00	107.546.202,00	97,87	2.343.822,00
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	310.653.965,00	67.318.943,00	21,67	243.335.022,00
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	543.936.000,00	529.710.115,00	97,38	14.225.885,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.575.013.632,00	2.093.321.269,00	81,29	481.692.363,00
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	52.501.400,00	47.047.950,00	89,61	5.453.450,00
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	337.956.184,00	297.143.658,00	87,92	40.812.526,00
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	152.142.468,00	130.328.257,00	85,66	21.814.211,00
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	195.202.680,00	127.148.873,00	65,14	68.053.807,00
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	184.063.000,00	148.770.600,00	80,83	35.292.400,00
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	505.841.800,00	440.546.292,00	87,09	65.295.508,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	11.700.000,00	6.600.000,00	56,41	5.100.000,00
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	204.581.100,00	108.799.360,00	53,18	95.781.740,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	131.193.000,00	118.933.614,00	90,66	12.259.386,00
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	28.004.000,00	15.575.000,00	55,62	12.429.000,00
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	714.547.000,00	614.016.545,00	85,93	100.530.455,00
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	8.410.000,00	3.360.000,00	39,95	5.050.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	48.871.000,00	35.051.120,00	71,72	13.819.880,00
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	29.199.272.815,00	1.534.591.856,00	5,26	27.664.680.959,00
	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	29.199.272.815,00	1.534.591.856,00	5,26	27.664.680.959,00
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1.663.570.109,00	1.483.008.515,00	89,15	180.561.594,00
	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	237.879.645,00	227.451.400,00	95,62	10.428.245,00
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	784.847.576,00	782.252.347,00	99,67	2.595.229,00
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	640.842.888,00	473.304.768,00	73,86	167.538.120,00
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.822.925.409,00	3.505.956.139,00	91,71	316.969.270,00
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.822.925.409,00	3.505.956.139,00	91,71	316.969.270,00
	Penyusunan Standar Harga	768.007.735,00	722.223.019,00	94,04	45.784.716,00
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	231.983.000,00	196.697.592,00	84,79	35.285.408,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	238.852.303,00	225.595.975,00	94,45	13.256.328,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pengamanan Barang Milik Daerah	247.212.460,00	230.280.818,00	93,15	16.931.642,00
	Penilaian Barang Milik Daerah	402.785.559,00	397.880.164,00	98,78	4.905.395,00
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	50.000.000,00	48.353.500,00	96,71	1.646.500,00
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	479.496.092,00	337.912.834,00	70,47	141.583.258,00
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	202.706.060,00	169.753.339,00	83,74	32.952.721,00
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	306.464.200,00	289.556.716,00	94,48	16.907.484,00
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	895.418.000,00	887.702.182,00	99,14	7.715.818,00
	KEPEGAWAIAN	16.925.935.915,00	15.888.493.543,00	93,87	1.037.442.372,00
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	16.925.935.915,00	15.888.493.543,00	93,87	1.037.442.372,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.513.412.363,00	12.645.713.756,00	93,58	867.698.607,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.208.000,00	480.000,00	7,73	5.728.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.208.000,00	480.000,00	7,73	5.728.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.205.024.286,00	7.530.762.522,00	91,78	674.261.764,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.205.024.286,00	7.530.762.522,00	91,78	674.261.764,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	979.880.400,00	960.563.800,00	98,03	19.316.600,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	551.268.400,00	551.164.000,00	99,98	104.400,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	316.632.000,00	298.883.200,00	94,39	17.748.800,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	111.980.000,00	110.516.600,00	98,69	1.463.400,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.906.365.741,00	2.847.162.008,00	97,96	59.203.733,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.445.757.252,00	1.404.980.413,00	97,18	40.776.839,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.100.480,00	57.756.339,00	99,41	344.141,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	101.541.009,00	98.848.280,00	97,35	2.692.729,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.300.967.000,00	1.285.576.976,00	98,82	15.390.024,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	176.131.240,00	170.453.960,00	96,78	5.677.280,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.757.640,00	67.270.000,00	93,75	4.487.640,00
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	101.590.000,00	101.506.750,00	99,92	83.250,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.783.600,00	1.677.210,00	60,25	1.106.390,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.158.000,00	522.466.501,00	92,77	40.691.499,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.000.000,00	10.234.501,00	93,04	765.499,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.500.000,00	53.280.000,00	91,08	5.220.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	493.658.000,00	458.952.000,00	92,97	34.706.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	676.644.696,00	613.824.965,00	90,72	62.819.731,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	319.766.650,00	286.138.533,00	89,48	33.628.117,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.712.500,00	43.667.100,00	64,49	24.045.400,00
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	150.161.000,00	149.865.000,00	99,80	296.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	139.004.546,00	134.154.332,00	96,51	4.850.214,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.412.523.552,00	3.242.779.787,00	95,03	169.743.765,00
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	905.053.352,00	874.565.498,00	96,63	30.487.854,00
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1.008.000,00	1.008.000,00	100,00	0,00
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	509.096.232,00	497.951.013,00	97,81	11.145.219,00
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	180.837.000,00	173.431.670,00	95,90	7.405.330,00
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	174.330.120,00	163.733.970,00	93,92	10.596.150,00
	Pengelolaan Data Kepegawaian	39.782.000,00	38.440.845,00	96,63	1.341.155,00
	Mutasi dan Promosi ASN	1.366.641.000,00	1.283.830.336,00	93,94	82.810.664,00
	Pengelolaan Mutasi ASN	15.648.000,00	15.648.000,00	100,00	0,00
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	194.201.000,00	193.268.129,00	99,52	932.871,00
	Pengelolaan Promosi ASN	1.156.792.000,00	1.074.914.207,00	92,92	81.877.793,00
	Pengembangan Kompetensi ASN	432.725.000,00	392.799.703,00	90,77	39.925.297,00
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	384.989.000,00	348.314.367,00	90,47	36.674.633,00
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	47.736.000,00	44.485.336,00	93,19	3.250.664,00
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	708.104.200,00	691.584.250,00	97,67	16.519.950,00
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	254.485.000,00	247.010.000,00	97,06	7.475.000,00
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	356.391.000,00	354.602.077,00	99,50	1.788.923,00
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	33.141.000,00	33.130.600,00	99,97	10.400,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pembinaan Disiplin ASN	33.241.200,00	31.037.258,00	93,37	2.203.942,00
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	30.846.000,00	25.804.315,00	83,66	5.041.685,00
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	6.259.829.235,00	6.061.590.220,00	96,83	198.239.015,00
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.259.829.235,00	6.061.590.220,00	96,83	198.239.015,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.259.829.235,00	6.061.590.220,00	96,83	198.239.015,00
	Pengembangan Kompetensi Teknis	5.026.022.235,00	4.887.575.806,00	97,25	138.446.429,00
	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	23.869.500,00	3.350.000,00	14,03	20.519.500,00
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	5.002.152.735,00	4.884.225.806,00	97,64	117.926.929,00
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.233.807.000,00	1.174.014.414,00	95,15	59.792.586,00
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.233.807.000,00	1.174.014.414,00	95,15	59.792.586,00
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.214.191.646,00	2.768.673.006,00	86,14	445.518.640,00
	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.214.191.646,00	2.768.673.006,00	86,14	445.518.640,00
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.214.191.646,00	2.768.673.006,00	86,14	445.518.640,00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.966.413.380,00	1.622.036.596,00	82,49	344.376.784,00
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	141.227.000,00	137.495.500,00	97,36	3.731.500,00
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	178.856.000,00	174.210.500,00	97,40	4.645.500,00
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	14.373.424,00	3.350.000,00	23,31	11.023.424,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	1.631.956.956,00	1.306.980.596,00	80,09	324.976.360,00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	505.577.000,00	494.166.084,00	97,74	11.410.916,00
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	505.577.000,00	494.166.084,00	97,74	11.410.916,00
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	742.201.266,00	652.470.326,00	87,91	89.730.940,00
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	9.201.000,00	9.045.000,00	98,30	156.000,00
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	69.410.504,00	62.663.642,00	90,28	6.746.862,00
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	644.473.690,00	572.946.684,00	88,90	71.527.006,00
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	19.116.072,00	7.815.000,00	40,88	11.301.072,00
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	16.424.590.714,00	15.594.420.332,00	94,95	830.170.382,00
	INSPEKTORAT DAERAH	16.424.590.714,00	15.594.420.332,00	94,95	830.170.382,00
	INSPEKTORAT DAERAH	16.424.590.714,00	15.594.420.332,00	94,95	830.170.382,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.901.535.644,00	13.172.751.313,00	94,76	728.784.331,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.975.255.299,00	9.357.791.854,00	93,81	617.463.445,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.975.255.299,00	9.357.791.854,00	93,81	617.463.445,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.118.074.223,00	1.079.512.319,00	96,55	38.561.904,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	163.713.223,00	149.464.400,00	91,30	14.248.823,00
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	35.900.000,00	14.950.000,00	41,64	20.950.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	918.461.000,00	915.097.919,00	99,63	3.363.081,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.928.013.622,00	1.895.753.530,00	98,33	32.260.092,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	571.895.187,00	543.715.410,00	95,07	28.179.777,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	56.819.684,00	56.692.700,00	99,78	126.984,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.806.524,00	58.662.870,00	99,76	143.654,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.974.183,00	64.798.330,00	99,73	175.853,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.400.000,00	7.900.000,00	94,05	500.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.167.118.044,00	1.163.984.220,00	99,73	3.133.824,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	201.890.000,00	200.025.000,00	99,08	1.865.000,00
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	201.890.000,00	200.025.000,00	99,08	1.865.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.098.500,00	179.547.716,00	85,46	30.550.784,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	3.369.500,00	74,88	1.130.500,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.620.000,00	45.288.000,00	97,14	1.332.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.972.500,00	25.338.000,00	68,53	11.634.500,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122.006.000,00	105.552.216,00	86,51	16.453.784,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	468.204.000,00	460.120.894,00	98,27	8.083.106,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	468.204.000,00	460.120.894,00	98,27	8.083.106,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.168.876.000,00	1.150.068.372,00	98,39	18.807.628,00
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.080.280.000,00	1.078.967.662,00	99,88	1.312.338,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	298.520.000,00	298.478.791,00	99,99	41.209,00
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	647.800.000,00	647.173.179,00	99,90	626.821,00
	Reviu Laporan Kinerja	39.950.000,00	39.684.071,00	99,33	265.929,00
	Reviu Laporan Keuangan	32.810.000,00	32.487.000,00	99,02	323.000,00
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	61.200.000,00	61.144.621,00	99,91	55.379,00
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	88.596.000,00	71.100.710,00	80,25	17.495.290,00
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	88.596.000,00	71.100.710,00	80,25	17.495.290,00
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.354.179.070,00	1.271.600.647,00	93,90	82.578.423,00
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	13.400.000,00	13.384.000,00	99,88	16.000,00
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	13.400.000,00	13.384.000,00	99,88	16.000,00
	Pendampingan dan Asistensi	1.340.779.070,00	1.258.216.647,00	93,84	82.562.423,00
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	275.358.000,00	244.909.259,00	88,94	30.448.741,00
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	134.043.000,00	133.369.520,00	99,50	673.480,00
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	931.378.070,00	879.937.868,00	94,48	51.440.202,00
	UNSUR KEWILAYAHAN	224.550.734.139,00	213.279.415.627,30	94,98	11.271.318.511,70
	KECAMATAN	224.550.734.139,00	213.279.415.627,30	94,98	11.271.318.511,70
	KECAMATAN BONTANG UTARA	90.914.632.443,00	86.913.259.792,30	95,60	4.001.372.650,70
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.443.780.805,00	43.037.652.012,00	94,71	2.406.128.793,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.224.880.994,00	18.746.149.981,00	92,69	1.478.731.013,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.224.880.994,00	18.746.149.981,00	92,69	1.478.731.013,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.494.021.640,00	2.381.517.745,00	95,49	112.503.895,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	527.712.500,00	493.385.000,00	93,50	34.327.500,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Kelurahan Bontang Baru)	354.981.140,00	345.780.000,00	97,41	9.201.140,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	713.919.000,00	652.005.601,00	91,33	61.913.399,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kelurahan Guntung)	398.849.000,00	397.737.144,00	99,72	1.111.856,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kelurahan Loktuan)	157.010.000,00	151.060.000,00	96,21	5.950.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kelurahan Gunung Elai)	341.550.000,00	341.550.000,00	100,00	0,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kelurahan Bontang Kuala)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.642.262.662,00	12.143.679.149,00	96,06	498.583.513,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.020.000,00	5.020.000,00	100,00	0,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.198.364.809,00	1.155.289.460,00	96,41	43.075.349,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Guntung)	1.391.212.473,00	1.316.551.068,00	94,63	74.661.405,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Loktuan)	861.972.953,00	832.615.468,00	96,59	29.357.485,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Gunung Elai)	934.960.591,00	899.074.743,00	96,16	35.885.848,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Bontang Baru)	1.080.815.385,00	1.015.075.077,00	93,92	65.740.308,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Api-Api)	327.488.305,00	316.129.214,00	96,53	11.359.091,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Bontang Kuala)	837.844.014,00	818.079.097,00	97,64	19.764.917,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.227.954,00	48.900.600,00	99,34	327.354,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	91.272.685,00	86.385.400,00	94,65	4.887.285,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Guntung)	110.300.118,00	90.887.000,00	82,40	19.413.118,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Loktuan)	60.628.134,00	60.223.142,00	99,33	404.992,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Gunung Elai)	265.015.032,00	264.079.770,00	99,65	935.262,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Bontang Baru)	56.660.412,00	26.316.500,00	46,45	30.343.912,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Api-Api)	50.763.946,00	45.589.290,00	89,81	5.174.656,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Bontang Kuala)	44.767.731,00	42.823.000,00	95,66	1.944.731,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.860.000,00	1.716.000,00	60,00	1.144.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Loktuan)	184.704.000,00	183.528.800,00	99,36	1.175.200,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Gunung Elai)	159.840.000,00	156.735.000,00	98,06	3.105.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Api-Api)	145.908.000,00	145.498.300,00	99,72	409.700,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Bontang Kuala)	70.596.000,00	67.367.000,00	95,43	3.229.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.140.916.000,00	1.134.857.690,00	99,47	6.058.310,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Guntung)	418.494.000,00	369.923.132,00	88,39	48.570.868,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Loktuan)	622.420.000,00	599.447.404,00	96,31	22.972.596,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Gunung Elai)	434.779.000,00	434.500.303,00	99,94	278.697,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Bontang Baru)	970.580.120,00	928.766.331,00	95,69	41.813.789,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Api-Api)	826.249.000,00	800.159.346,00	96,84	26.089.654,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Bontang Kuala)	298.602.000,00	298.141.014,00	99,85	460.986,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.922.696.369,00	1.887.286.508,00	98,16	35.409.861,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Loktuan)	949.451.483,00	942.671.314,00	99,29	6.780.169,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Gunung Elai)	7.221.000,00	0,00	0,00	7.221.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Bontang Baru)	222.060.780,00	214.614.400,00	96,65	7.446.380,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Api-Api)	743.963.106,00	730.000.794,00	98,12	13.962.312,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.786.920.500,00	5.624.445.947,00	97,19	162.474.553,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	223.699.800,00	205.989.409,00	92,08	17.710.391,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Guntung)	129.000.000,00	123.490.787,00	95,73	5.509.213,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Loktuan)	67.010.000,00	64.652.351,00	96,48	2.357.649,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Gunung Elai)	83.383.000,00	73.919.679,00	88,65	9.463.321,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Bontang Baru)	109.635.000,00	79.697.761,00	72,69	29.937.239,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Api-Api)	65.425.000,00	45.510.668,00	69,56	19.914.332,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Bontang Kuala)	79.399.200,00	63.480.924,00	79,95	15.918.276,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.788.432.500,00	4.732.982.368,00	98,84	55.450.132,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Loktuan)	45.984.000,00	45.984.000,00	100,00	0,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Gunung Elai)	168.240.000,00	164.570.000,00	97,82	3.670.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Bontang Kuala)	26.712.000,00	24.168.000,00	90,48	2.544.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.372.998.640,00	2.254.572.682,00	95,01	118.425.958,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	259.837.800,00	213.013.600,00	81,98	46.824.200,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000,00	5.618.956,00	56,19	4.381.044,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Guntung)	84.918.750,00	81.342.700,00	95,79	3.576.050,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Loktuan)	163.129.000,00	154.249.030,00	94,56	8.879.970,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Gunung Elai)	96.075.200,00	89.369.260,00	93,02	6.705.940,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Bontang Baru)	142.416.640,00	137.836.076,00	96,78	4.580.564,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Api-Api)	100.933.550,00	91.940.250,00	91,09	8.993.300,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Bontang Kuala)	92.528.890,00	90.174.250,00	97,46	2.354.640,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Gunung Elai)	14.640.000,00	14.560.000,00	99,45	80.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Bontang Kuala)	17.250.000,00	16.635.000,00	96,43	615.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	566.980.200,00	560.048.000,00	98,78	6.932.200,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Guntung)	635.057.110,00	617.024.652,00	97,16	18.032.458,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Loktuan)	151.571.500,00	146.134.708,00	96,41	5.436.792,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Gunung Elai)	19.350.000,00	19.092.300,00	98,67	257.700,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Api-Api)	18.310.000,00	17.533.900,00	95,76	776.100,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.737.750.259,00	1.607.177.077,00	92,49	130.573.182,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	642.044.500,00	541.383.900,00	84,32	100.660.600,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	507.920.000,00	410.903.900,00	80,90	97.016.100,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	134.124.500,00	130.480.000,00	97,28	3.644.500,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.008.437.807,00	978.709.977,00	97,05	29.727.830,00
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	45.150.000,00	43.580.100,00	96,52	1.569.900,00
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	144.746.000,00	142.759.260,00	98,63	1.986.740,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	818.541.807,00	792.370.617,00	96,80	26.171.190,00
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	87.267.952,00	87.083.200,00	99,79	184.752,00
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	87.267.952,00	87.083.200,00	99,79	184.752,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40.771.997.884,00	39.358.037.664,30	96,53	1.413.960.219,70
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	22.471.936.760,00	22.018.063.225,00	97,98	453.873.535,00
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Guntung)	13.424.033,00	13.009.500,00	96,91	414.533,00
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Loktuan)	14.179.000,00	13.996.300,00	98,71	182.700,00
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Gunung Elai)	18.399.880,00	16.423.000,00	89,26	1.976.880,00
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Bontang Baru)	13.869.928,00	13.588.928,00	97,97	281.000,00
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Api-Api)	19.741.792,00	18.244.000,00	92,41	1.497.792,00
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Bontang Kuala)	13.042.000,00	11.313.500,00	86,75	1.728.500,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Guntung)	3.058.884.800,00	3.027.569.081,00	98,98	31.315.719,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Loktuan)	2.790.130.965,00	2.760.245.968,00	98,93	29.884.997,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gunung Elai)	3.081.311.612,00	3.040.478.195,00	98,67	40.833.417,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bontang Baru)	1.537.999.333,00	1.523.020.400,00	99,03	14.978.933,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Api-Api)	2.784.608.000,00	2.715.174.527,00	97,51	69.433.473,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bontang Kuala)	1.590.731.785,00	1.527.250.895,00	96,01	63.480.890,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Guntung)	1.227.334.502,00	1.210.731.146,00	98,65	16.603.356,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Loktuan)	2.242.457.622,00	2.193.482.691,00	97,82	48.974.931,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunung Elai)	816.262.134,00	797.759.134,00	97,73	18.503.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bontang Baru)	741.742.081,00	712.726.300,00	96,09	29.015.781,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Api-Api)	1.465.549.215,00	1.431.515.730,00	97,68	34.033.485,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bontang Kuala)	1.042.268.078,00	991.533.930,00	95,13	50.734.148,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	17.700.024.524,00	16.756.481.031,52	94,67	943.543.492,48
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	683.459.842,00	650.617.442,00	95,19	32.842.400,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Guntung)	1.158.137.150,00	1.050.290.800,00	90,69	107.846.350,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Loktuan)	2.636.718.650,00	2.439.686.300,00	92,53	197.032.350,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gunung Elai)	2.955.908.452,00	2.762.254.952,00	93,45	193.653.500,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bontang Baru)	1.588.645.230,00	1.479.025.400,00	93,10	109.619.830,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Api-Api)	2.233.451.651,00	2.074.473.800,00	92,88	158.977.851,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bontang Kuala)	1.200.562.094,00	1.118.048.000,00	93,13	82.514.094,00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Guntung)	450.242.245,00	434.417.038,00	96,49	15.825.207,00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Loktuan)	1.260.508.288,00	1.259.622.979,00	99,93	885.309,00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Gunung Elai)	1.328.516.910,00	1.322.077.750,00	99,52	6.439.160,00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Bontang Baru)	676.202.300,00	651.494.200,00	96,35	24.708.100,00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Api-Api)	1.044.237.712,00	1.036.303.238,00	99,24	7.934.474,00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Bontang Kuala)	483.434.000,00	478.169.132,52	98,91	5.264.867,48
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	600.036.600,00	583.493.407,78	97,24	16.543.192,22
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Guntung)	35.190.000,00	34.388.000,00	97,72	802.000,00
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Loktuan)	140.104.500,00	139.192.500,00	99,35	912.000,00
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Gunung Elai)	103.523.000,00	103.175.000,00	99,66	348.000,00
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Bontang Baru)	75.806.000,00	66.008.500,00	87,08	9.797.500,00
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Api-Api)	99.536.000,00	96.661.598,00	97,11	2.874.402,00
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Bontang Kuala)	145.877.100,00	144.067.809,78	98,76	1.809.290,22
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.036.078.497,00	2.003.568.907,00	98,40	32.509.590,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.725.365.497,00	1.694.142.307,00	98,19	31.223.190,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (Kelurahan Guntung)	105.326.335,00	101.620.500,00	96,48	3.705.835,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (Kelurahan Loktuan)	630.223.330,00	621.613.300,00	98,63	8.610.030,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (Kelurahan Gunung Elai)	162.678.000,00	160.486.500,00	98,65	2.191.500,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (Kelurahan Bontang Baru)	104.033.232,00	98.348.600,00	94,54	5.684.632,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (Kelurahan Api-Api)	686.402.600,00	675.461.407,00	98,41	10.941.193,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (Kelurahan Bontang Kuala)	36.702.000,00	36.612.000,00	99,75	90.000,00
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	310.713.000,00	309.426.600,00	99,59	1.286.400,00
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	310.713.000,00	309.426.600,00	99,59	1.286.400,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	925.024.998,00	906.824.132,00	98,03	18.200.866,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	925.024.998,00	906.824.132,00	98,03	18.200.866,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	230.089.400,00	228.692.000,00	99,39	1.397.400,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Guntung)	118.792.760,00	114.808.000,00	96,65	3.984.760,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Loktuan)	14.027.000,00	13.777.400,00	98,22	249.600,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Gunung Elai)	360.993.134,00	352.486.372,00	97,64	8.506.762,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Bontang Baru)	166.742.776,00	164.612.600,00	98,72	2.130.176,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Api-Api)	13.999.696,00	13.918.960,00	99,42	80.736,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Bontang Kuala)	20.380.232,00	18.528.800,00	90,92	1.851.432,00
	KECAMATAN BONTANG SELATAN	87.622.137.659,00	83.330.202.623,00	95,10	4.291.935.036,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.905.555.362,00	42.281.919.557,00	94,16	2.623.635.805,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.002.462.443,00	17.428.614.455,00	91,72	1.573.847.988,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.002.462.443,00	17.428.614.455,00	91,72	1.573.847.988,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.268.576.609,00	2.235.599.175,00	98,55	32.977.434,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	643.844.832,00	636.655.000,00	98,88	7.189.832,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Kelurahan Satimpo)	329.366.084,00	326.727.800,00	99,20	2.638.284,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Kelurahan Tanjung Laut)	251.105.193,00	245.780.000,00	97,88	5.325.193,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Kelurahan Bontang Lestari)	100.000.000,00	96.205.000,00	96,20	3.795.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Kelurahan Tanjung Laut Indah)	52.200.000,00	52.200.000,00	100,00	0,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Kelurahan Berbas Tengah)	149.688.500,00	149.361.375,00	99,78	327.125,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Kelurahan Berbas Pantai)	81.032.000,00	79.580.000,00	98,21	1.452.000,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	292.500.000,00	282.500.000,00	96,58	10.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kelurahan Tanjung Laut)	108.000.000,00	106.000.000,00	98,15	2.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kelurahan Tanjung Laut Indah)	123.950.000,00	123.700.000,00	99,80	250.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kelurahan Berbas Tengah)	126.000.000,00	126.000.000,00	100,00	0,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kelurahan Berbas Pantai)	10.890.000,00	10.890.000,00	100,00	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.674.043.416,00	13.234.751.060,00	96,79	439.292.356,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.997.298,00	14.996.100,00	99,99	1.198,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.349.270.321,00	1.249.098.750,00	92,58	100.171.571,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Satimpo)	1.293.492.544,00	1.278.276.508,00	98,82	15.216.036,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Tanjung Laut)	768.945.752,00	722.479.090,00	93,96	46.466.662,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Bontang Lestari)	504.765.000,00	495.731.850,00	98,21	9.033.150,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Tanjung Laut Indah)	710.755.608,00	678.246.250,00	95,43	32.509.358,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Berbas Tengah)	1.464.767.443,00	1.450.562.815,00	99,03	14.204.628,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Berbas Pantai)	848.924.041,00	804.919.656,00	94,82	44.004.385,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.996.948,00	19.993.247,00	99,98	3.701,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.070.854,00	42.871.275,00	93,06	3.199.579,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Satimpo)	37.001.039,00	35.873.454,00	96,95	1.127.585,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Tanjung Laut)	38.724.474,00	27.699.004,00	71,53	11.025.470,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Bontang Lestari)	6.012.168,00	4.871.904,00	81,03	1.140.264,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Tanjung Laut Indah)	14.500.000,00	12.842.508,00	88,57	1.657.492,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Berbas Tengah)	35.796.807,00	34.560.667,00	96,55	1.236.140,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Berbas Pantai)	10.286.227,00	6.317.676,00	61,42	3.968.551,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.325.600,00	9.516.000,00	84,02	1.809.600,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Satimpo)	88.880.000,00	84.850.000,00	95,47	4.030.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Tanjung Laut)	132.696.000,00	129.846.000,00	97,85	2.850.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Bontang Lestari)	66.028.800,00	56.354.000,00	85,35	9.674.800,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Tanjung Laut Indah)	114.681.600,00	110.226.000,00	96,11	4.455.600,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Berbas Tengah)	217.282.400,00	210.428.000,00	96,85	6.854.400,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Berbas Pantai)	83.404.800,00	81.456.000,00	97,66	1.948.800,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.737.669.280,00	1.730.235.936,00	99,57	7.433.344,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Satimpo)	702.420.000,00	688.000.464,00	97,95	14.419.536,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Tanjung Laut)	687.554.000,00	655.990.554,00	95,41	31.563.446,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Bontang Lestari)	500.000.000,00	499.975.365,00	100,00	24.635,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Tanjung Laut Indah)	689.692.452,00	643.423.989,00	93,29	46.268.463,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Berbas Tengah)	974.760.960,00	952.374.357,00	97,70	22.386.603,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Berbas Pantai)	503.341.000,00	502.733.641,00	99,88	607.359,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.846.315.927,00	2.622.640.017,00	92,14	223.675.910,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Berbas Tengah)	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	774.838.449,00	740.829.527,00	95,61	34.008.922,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Bontang Lestari)	1.075.969.660,00	1.071.569.582,00	99,59	4.400.078,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Tanjung Laut Indah)	599.999.998,00	596.261.908,00	99,38	3.738.090,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Berbas Pantai)	93.750.000,00	93.750.000,00	100,00	0,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	131.757.820,00	120.229.000,00	91,25	11.528.820,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.122.761.000,00	4.851.311.205,00	94,70	271.449.795,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	301.610.000,00	219.954.875,00	72,93	81.655.125,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Satimpo)	94.600.000,00	81.742.759,00	86,41	12.857.241,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Tanjung Laut)	52.925.000,00	46.995.495,00	88,80	5.929.505,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Bontang Lestari)	63.600.000,00	59.205.847,00	93,09	4.394.153,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Tanjung Laut Indah)	87.600.000,00	73.794.785,00	84,24	13.805.215,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Berbas Tengah)	79.800.000,00	56.899.186,00	71,30	22.900.814,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Berbas Pantai)	72.600.000,00	67.104.826,00	92,43	5.495.174,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.370.026.000,00	4.245.613.432,00	97,15	124.412.568,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.991.395.967,00	1.909.003.645,00	95,86	82.392.322,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	164.915.900,00	164.728.265,00	99,89	187.635,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.229.500,00	3.539.734,00	34,60	6.689.766,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Satimpo)	76.498.650,00	70.329.150,00	91,94	6.169.500,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Tanjung Laut)	133.115.925,00	116.362.740,00	87,41	16.753.185,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Bontang Lestari)	177.432.850,00	167.728.338,00	94,53	9.704.512,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Tanjung Laut Indah)	160.859.550,00	144.107.144,00	89,59	16.752.406,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Berbas Tengah)	116.654.450,00	108.063.450,00	92,64	8.591.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Berbas Pantai)	90.795.250,00	89.397.659,00	98,46	1.397.591,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	386.757.480,00	383.592.212,00	99,18	3.165.268,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	489.276.412,00	483.108.053,00	98,74	6.168.359,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Satimpo)	20.000.000,00	19.690.000,00	98,45	310.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Tanjung Laut)	8.730.000,00	4.820.000,00	55,21	3.910.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Bontang Lestari)	16.500.000,00	16.070.000,00	97,39	430.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Tanjung Laut Indah)	22.480.000,00	20.741.900,00	92,27	1.738.100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Berbas Tengah)	107.150.000,00	107.150.000,00	100,00	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Berbas Pantai)	10.000.000,00	9.575.000,00	95,75	425.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.360.784.760,00	1.233.503.668,00	90,65	127.281.092,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	959.429.893,00	843.796.244,00	87,95	115.633.649,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	832.854.893,00	724.203.369,00	86,95	108.651.524,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	126.575.000,00	119.592.875,00	94,48	6.982.125,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	386.413.867,00	374.811.024,00	97,00	11.602.843,00
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	50.600.000,00	49.149.400,00	97,13	1.450.600,00
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	318.365.864,00	308.238.724,00	96,82	10.127.140,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17.448.003,00	17.422.900,00	99,86	25.103,00
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	14.941.000,00	14.896.400,00	99,70	44.600,00
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	14.941.000,00	14.896.400,00	99,70	44.600,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	39.150.548.495,00	37.721.495.455,00	96,35	1.429.053.040,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	20.973.860.880,00	20.475.427.028,00	97,62	498.433.852,00
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Satimpo)	17.000.000,00	16.953.000,00	99,72	47.000,00
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Tanjung Laut)	18.999.788,00	18.680.000,00	98,32	319.788,00
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Bontang Lestari)	15.000.000,00	14.711.000,00	98,07	289.000,00
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Tanjung Laut Indah)	17.500.000,00	17.438.500,00	99,65	61.500,00
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Berbas Tengah)	23.000.000,00	22.999.792,00	100,00	208,00
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Berbas Pantai)	16.000.000,00	15.903.500,00	99,40	96.500,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Satimpo)	3.281.999.400,00	3.254.018.481,00	99,15	27.980.919,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tanjung Laut)	1.518.481.244,00	1.515.628.553,00	99,81	2.852.691,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bontang Lestari)	1.325.000.000,00	1.289.495.015,00	97,32	35.504.985,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tanjung Laut Indah)	1.606.086.409,00	1.481.895.948,00	92,27	124.190.461,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Berbas Tengah)	2.070.000.000,00	2.057.503.443,00	99,40	12.496.557,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Berbas Pantai)	3.261.525.138,00	3.202.761.007,00	98,20	58.764.131,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Satimpo)	796.601.124,00	790.534.600,00	99,24	6.066.524,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tanjung Laut)	2.482.656.350,00	2.388.800.859,00	96,22	93.855.491,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bontang Lestari)	759.330.108,00	718.021.960,00	94,56	41.308.148,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tanjung Laut Indah)	905.040.074,00	853.730.572,00	94,33	51.309.502,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Berbas Tengah)	940.437.561,00	933.457.847,00	99,26	6.979.714,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Berbas Pantai)	1.919.203.684,00	1.882.892.951,00	98,11	36.310.733,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	17.701.835.292,00	16.787.203.487,00	94,83	914.631.805,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.780.695.117,00	1.733.299.042,00	97,34	47.396.075,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Satimpo)	1.407.027.559,00	1.313.063.200,00	93,32	93.964.359,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tanjung Laut)	1.975.865.200,00	1.826.937.500,00	92,46	148.927.700,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bontang Lestari)	1.047.182.600,00	975.147.672,00	93,12	72.034.928,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tanjung Laut Indah)	1.717.766.700,00	1.585.759.450,00	92,32	132.007.250,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Berbas Tengah)	3.476.024.020,00	3.235.924.371,00	93,09	240.099.649,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Berbas Pantai)	1.296.309.600,00	1.178.338.212,00	90,90	117.971.388,00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Satimpo)	619.599.619,00	619.124.833,00	99,92	474.786,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Tanjung Laut)	989.912.520,00	987.348.000,00	99,74	2.564.520,00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Bontang Lestari)	471.957.000,00	462.644.800,00	98,03	9.312.200,00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Tanjung Laut Indah)	832.996.500,00	810.156.950,00	97,26	22.839.550,00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Berbas Tengah)	1.496.055.500,00	1.473.619.100,00	98,50	22.436.400,00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Berbas Pantai)	590.443.357,00	585.840.357,00	99,22	4.603.000,00
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	474.852.323,00	458.864.940,00	96,63	15.987.383,00
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Satimpo)	64.788.000,00	64.022.540,00	98,82	765.460,00
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Tanjung Laut)	43.473.000,00	42.553.000,00	97,88	920.000,00
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Bontang Lestari)	53.300.000,00	52.657.000,00	98,79	643.000,00
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Tanjung Laut Indah)	73.289.528,00	64.854.000,00	88,49	8.435.528,00
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Berbas Tengah)	169.663.800,00	165.287.800,00	97,42	4.376.000,00
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Berbas Pantai)	70.337.995,00	69.490.600,00	98,80	847.395,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	226.891.450,00	224.445.000,00	98,92	2.446.450,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	176.891.450,00	174.963.000,00	98,91	1.928.450,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (Kelurahan Satimpo)	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (Kelurahan Tanjung Laut)	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (Kelurahan Bontang Lestari)	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (Kelurahan Tanjung Laut Indah)	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (Kelurahan Berbas Tengah)	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (Kelurahan Berbas Pantai)	56.891.450,00	54.963.000,00	96,61	1.928.450,00
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50.000.000,00	49.482.000,00	98,96	518.000,00
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	50.000.000,00	49.482.000,00	98,96	518.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.978.357.592,00	1.868.838.943,00	94,46	109.518.649,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.978.357.592,00	1.868.838.943,00	94,46	109.518.649,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	249.962.000,00	246.603.000,00	98,66	3.359.000,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Satimpo)	429.998.060,00	427.173.940,00	99,34	2.824.120,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Tanjung Laut)	527.723.895,00	524.344.526,00	99,36	3.379.369,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Bontang Lestari)	140.000.000,00	138.106.000,00	98,65	1.894.000,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Tanjung Laut Indah)	488.759.807,00	393.123.400,00	80,43	95.636.407,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	45.835.830,00	44.979.000,00	98,13	856.830,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Berbas Tengah)				
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Berbas Pantai)	96.078.000,00	94.509.077,00	98,37	1.568.923,00
	KECAMATAN BONTANG BARAT	46.013.964.037,00	43.035.953.212,00	93,53	2.978.010.825,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.870.590.123,00	23.658.287.193,00	91,45	2.212.302.930,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.682.998.442,00	10.166.614.216,00	87,02	1.516.384.226,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.682.998.442,00	10.166.614.216,00	87,02	1.516.384.226,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.671.028.758,00	1.402.663.159,00	83,94	268.365.599,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	342.314.282,00	337.934.032,00	98,72	4.380.250,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Kelurahan Kanaan)	219.774.032,00	218.775.000,00	99,55	999.032,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	562.337.000,00	394.247.863,00	70,11	168.089.137,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kelurahan Kanaan)	255.965.900,00	196.767.864,00	76,87	59.198.036,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kelurahan Gunung Telihan)	55.500.000,00	28.000.000,00	50,45	27.500.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kelurahan Belimbing)	235.137.544,00	226.938.400,00	96,51	8.199.144,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.957.890.556,00	4.716.349.642,00	95,13	241.540.914,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.242.300,00	15.161.626,00	99,47	80.674,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	493.679.048,00	471.413.712,00	95,49	22.265.336,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Kanaan)	539.804.276,00	522.941.547,00	96,88	16.862.729,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Gunung Telihan)	713.920.261,00	691.359.315,00	96,84	22.560.946,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Belimbing)	855.429.380,00	812.343.080,00	94,96	43.086.300,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.576.843,00	57.359.038,00	93,15	4.217.805,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.130.238,00	55.096.213,00	85,91	9.034.025,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Kanaan)	24.572.136,00	24.572.000,00	100,00	136,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Gunung Telihan)	48.331.552,00	47.266.552,00	97,80	1.065.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Belimbing)	51.187.150,00	50.207.786,00	98,09	979.364,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.168.500,00	5.325.000,00	86,33	843.500,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Kanaan)	42.624.000,00	42.624.000,00	100,00	0,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Gunung Telihan)	106.560.000,00	81.840.000,00	76,80	24.720.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Belimbing)	149.697.872,00	123.066.000,00	82,21	26.631.872,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	513.641.000,00	492.130.373,00	95,81	21.510.627,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Kanaan)	239.422.000,00	226.110.900,00	94,44	13.311.100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Gunung Telihan)	558.995.000,00	524.789.500,00	93,88	34.205.500,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Belimbing)	472.909.000,00	472.743.000,00	99,96	166.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	428.844.480,00	425.499.814,00	99,22	3.344.666,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Kanaan)	43.679.400,00	41.755.974,00	95,60	1.923.426,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Belimbing)	52.569.947,00	52.312.500,00	99,51	257.447,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	332.595.133,00	331.431.340,00	99,65	1.163.793,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.799.086.797,00	4.672.330.827,00	97,36	126.755.970,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	258.000.000,00	224.828.522,00	87,14	33.171.478,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Kanaan)	83.864.000,00	80.850.807,00	96,41	3.013.193,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Gunung Telihan)	87.675.000,00	82.201.896,00	93,76	5.473.104,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Belimbing)	61.359.768,00	58.510.793,00	95,36	2.848.975,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.307.963.029,00	4.225.938.809,00	98,10	82.024.220,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.330.741.090,00	2.274.829.535,00	97,60	55.911.555,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	236.508.050,00	235.997.050,00	99,78	511.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.720.500,00	6.759.640,00	77,51	1.960.860,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Kanaan)	120.918.000,00	116.195.530,00	96,09	4.722.470,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Gunung Telihan)	93.924.000,00	87.892.103,00	93,58	6.031.897,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Belimbing)	155.999.888,00	134.714.605,00	86,36	21.285.283,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Kanaan)	36.980.000,00	36.775.300,00	99,45	204.700,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Gunung Telihan)	28.807.000,00	25.720.000,00	89,28	3.087.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Belimbing)	34.299.928,00	26.910.580,00	78,46	7.389.348,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	696.881.677,00	692.794.058,00	99,41	4.087.619,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Belimbing)	571.068.400,00	565.460.399,00	99,02	5.608.001,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	346.633.647,00	345.610.270,00	99,70	1.023.377,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.787.508.376,00	1.723.301.971,00	96,41	64.206.405,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	513.415.996,00	470.238.891,00	91,59	43.177.105,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	483.351.896,00	442.974.791,00	91,65	40.377.105,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.064.100,00	27.264.100,00	90,69	2.800.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.186.913.380,00	1.166.314.549,00	98,26	20.598.831,00
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	48.005.700,00	45.743.100,00	95,29	2.262.600,00
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	160.954.959,00	143.836.340,00	89,36	17.118.619,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	977.952.721,00	976.735.109,00	99,88	1.217.612,00
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	87.179.000,00	86.748.531,00	99,51	430.469,00
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	87.179.000,00	86.748.531,00	99,51	430.469,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.639.404.898,00	16.971.479.223,00	96,21	667.925.675,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	8.019.759.116,00	7.825.044.263,00	97,57	194.714.853,00
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Kanaan)	17.093.000,00	16.635.800,00	97,33	457.200,00
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Gunung Telihan)	15.000.000,00	13.915.000,00	92,77	1.085.000,00
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Belimbing)	17.999.864,00	17.954.420,00	99,75	45.444,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kanaan)	1.744.073.650,00	1.627.656.000,00	93,32	116.417.650,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gunung Telihan)	2.011.578.150,00	1.999.623.238,00	99,41	11.954.912,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Belimbing)	2.658.441.443,00	2.641.210.567,00	99,35	17.230.876,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	479.902.435,00	479.691.968,00	99,96	210.467,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kanaan)	168.592.450,00	166.274.700,00	98,63	2.317.750,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunung Telihan)	371.721.000,00	369.925.680,00	99,52	1.795.320,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Belimbing)	535.357.124,00	492.156.890,00	91,93	43.200.234,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	9.468.146.878,00	8.996.913.350,00	95,02	471.233.528,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	706.617.280,00	696.652.380,00	98,59	9.964.900,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kanaan)	890.113.372,00	803.706.360,00	90,29	86.407.012,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gunung Telihan)	1.925.680.000,00	1.810.901.200,00	94,04	114.778.800,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Belimbing)	3.569.202.014,00	3.348.126.880,00	93,81	221.075.134,00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Kanaan)	319.465.600,00	307.126.850,00	96,14	12.338.750,00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Gunung Telihan)	765.823.488,00	743.271.938,00	97,06	22.551.550,00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Belimbing)	1.291.245.124,00	1.287.127.742,00	99,68	4.117.382,00
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	151.498.904,00	149.521.610,00	98,69	1.977.294,00
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Kanaan)	24.010.000,00	24.010.000,00	100,00	0,00
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Gunung Telihan)	44.989.000,00	44.989.000,00	100,00	0,00
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Belimbing)	82.499.904,00	80.522.610,00	97,60	1.977.294,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	448.835.140,00	444.362.050,00	99,00	4.473.090,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	125.722.000,00	123.610.700,00	98,32	2.111.300,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (Kelurahan Kanaan)	38.960.000,00	38.759.700,00	99,49	200.300,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (Kelurahan Gunung Telihan)	39.000.000,00	38.703.000,00	99,24	297.000,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (Kelurahan Belimbing)	47.762.000,00	46.148.000,00	96,62	1.614.000,00
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	323.113.140,00	320.751.350,00	99,27	2.361.790,00
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	323.113.140,00	320.751.350,00	99,27	2.361.790,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	267.625.500,00	238.522.775,00	89,13	29.102.725,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	267.625.500,00	238.522.775,00	89,13	29.102.725,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	169.593.500,00	166.071.665,00	97,92	3.521.835,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Kanaan)	36.130.000,00	19.067.610,00	52,78	17.062.390,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Gunung Telihan)	40.124.000,00	39.873.500,00	99,38	250.500,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Belimbing)	21.778.000,00	13.510.000,00	62,04	8.268.000,00
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	66.966.753.570,00	64.758.441.416,00	96,70	2.208.312.154,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	66.966.753.570,00	64.758.441.416,00	96,70	2.208.312.154,00
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	66.966.753.570,00	64.758.441.416,00	96,70	2.208.312.154,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.951.725.603,00	8.120.298.161,00	90,71	831.427.442,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.200.100,00	27.821.600,00	98,66	378.500,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.869.600,00	18.633.600,00	98,75	236.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.330.500,00	9.188.000,00	98,47	142.500,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.125.631.571,00	4.533.035.506,00	88,44	592.596.065,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.108.594.921,00	4.517.204.506,00	88,42	591.390.415,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.159.575,00	4.011.000,00	96,43	148.575,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.535.575,00	3.387.000,00	95,80	148.575,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.341.500,00	8.433.000,00	90,27	908.500,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.000.000,00	37.000.000,00	58,73	26.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	63.000.000,00	37.000.000,00	58,73	26.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.316.390.892,00	2.197.135.838,00	94,85	119.255.054,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	364.477.197,00	338.307.200,00	92,82	26.169.997,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	146.310.090,00	144.965.510,00	99,08	1.344.580,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.816.605,00	54.225.750,00	97,15	1.590.855,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.749.787.000,00	1.659.637.378,00	94,85	90.149.622,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	276.175.440,00	267.024.600,00	96,69	9.150.840,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	276.175.440,00	267.024.600,00	96,69	9.150.840,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	742.905.600,00	680.959.067,00	91,66	61.946.533,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.510.000,00	5.510.000,00	100,00	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.000.000,00	11.677.851,00	16,22	60.322.149,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	665.395.600,00	663.771.216,00	99,76	1.624.384,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	399.422.000,00	377.321.550,00	94,47	22.100.450,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	347.334.500,00	336.873.850,00	96,99	10.460.650,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.317.500,00	5.194.100,00	31,83	11.123.400,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.770.000,00	35.253.600,00	98,56	516.400,00
	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.719.224.243,00	8.637.536.091,00	99,06	81.688.152,00
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.719.224.243,00	8.637.536.091,00	99,06	81.688.152,00
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4.904.121.519,00	4.862.806.676,00	99,16	41.314.843,00
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3.815.102.724,00	3.774.729.415,00	98,94	40.373.309,00
	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	41.192.584.154,00	40.418.452.611,00	98,12	774.131.543,00
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	41.192.584.154,00	40.418.452.611,00	98,12	774.131.543,00
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	41.192.584.154,00	40.418.452.611,00	98,12	774.131.543,00



Pemerintah Kota Bontang

No	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4
	Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	4.026.007.748,00	3.682.390.015,00	91,47	343.617.733,00
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4.026.007.748,00	3.682.390.015,00	91,47	343.617.733,00
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2.181.309.684,00	1.971.892.394,00	90,40	209.417.290,00
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.844.698.064,00	1.710.497.621,00	92,73	134.200.443,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	830.007.288,00	707.990.622,00	85,30	122.016.666,00
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	830.007.288,00	707.990.622,00	85,30	122.016.666,00
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	830.007.288,00	707.990.622,00	85,30	122.016.666,00
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.247.204.534,00	3.191.773.916,00	98,29	55.430.618,00
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3.247.204.534,00	3.191.773.916,00	98,29	55.430.618,00
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3.247.204.534,00	3.191.773.916,00	98,29	55.430.618,00
	JUMLAH	2.532.272.667.551,00	2.214.458.110.841,32	87,45	317.814.556.709,68



BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah melahirkan desentralisasi yang mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Makna yang terkandung dalam asas desentralisasi bahwa penyelenggaraan urusan umum pemerintahan oleh pemerintah daerah adalah adanya otonomi mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Desentralisasi ini diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan urusan pemerintahan konkruen, yaitu urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah yang dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib, dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

Pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bontang tahun 2023 diukur dari capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta dari pencapaian kinerja masing-masing kegiatan pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Kota Bontang.

3.1 Evaluasi capaian tujuan dan sasaran pembangunan 2023

Evaluasi capaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bontang Tahun 2023 digunakan sebagai refleksi dan pengukur sejauh mana keberhasilan atau capaian dari program yang tertuang pada RPJMD 2021-2026. Adapun hasil capaian RPJMD tahun 2023 masing-masing misi adalah sebagai berikut:



Tabel 3.1
Capaian tujuan dan sasaran Kota Bontang Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2022	2023		Capaian
				Realisasi	Target RKPD-P	Realisasi	
Misi 1: Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan dan sinergi, kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan							
T.1 Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang harmoni, bersih, adil, Amanah, dan Bertanggung Jawab	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah		Indeks				
	S.1. Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B (65,21)	B (68,41)	BB (71,21)	104,09%
		Nilai LPPD	Predikat	Sedang (3,370)	Tinggi (3,90)	Sedang (3,379)	86,64%
		Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP*	100%
	S.2. Meningkatnya kondusifitas wilayah	Jumlah konflik	Kasus	6	8	7	100%
Persentase Penyelesaian Gangguan Kemanan dan Keteriban Umum		Persen	100	100%	100%	100%	
Misi 2: Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup							
T.2. Mewujudkan pembangunan perkotaan yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan	Indeks Kota Berwawasan Lingkungan (IKBL)		Indeks	66,96	68,02	65,49	96,28%
	S.3. Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju tangguh	Indeks Kualitas Perkotaan	Indeks	67,32	70,16	64,16	91,45%
	S.4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,96	65,87	66,81	101,43%
T.3. Mewujudkan inklusivitas dan keseimbangan ekonomi daerah berbasis potensi ekonomi lokal dan keragaman sosial budaya masyarakat	Indeks Gini		Indeks	0,324	0,3	0,299	100,33%
	S.5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Non Migas	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas	Persen	5,36	5,36	4,41**	82%



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2022	2023		Capaian		
				Realisasi	Target RKPD-P	Realisasi			
Misi 3: Kota Bontang yang BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia									
T.4	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Indeks	80,94	81,2	81,56	100,44%	
		S.6	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,18	13,42	13,43	100,07%
				Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,81	10,98	10,92	99,45%
				Usia harapan hidup	Tahun	74,57	74,73	74,81	100,11%
		S.7	Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,81	7,81	7,74	100,90%
S.8	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Angka Kemiskinan	Persen	4,54	4,54	4,11	110,46%		



Terdapat 8 (delapan) sasaran daerah yang tertuang di dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026 yang dijabarkan ke dalam program-program utama sasaran daerah. Keberhasilan sasaran daerah tidak terlepas dari keberhasilan program-program yang mendukung ketercapaian sasaran daerah tersebut. Dengan demikian pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026 tergantung dari pencapaian program-program daerah tersebut. Berikut penjelasan indikator kinerja utama sasaran daerah sampai dengan tahun 2023:

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif

Pada sasaran tersebut terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yaitu

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi ini telah mencapai target dengan capaian 104,09%, pada hasil evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi bahwa Kota Bontang telah berupaya keras untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan dengan ditandai meningkatnya nilai pada area pemenuhan, hasil antara, dan komponen hasil. Namun mengalami penurunan pada komponen reform. Sedangkan pada hasil area perubahan pada Pemerintah Kota Bontang sebanyak 10 hasil antara. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, beberapa nilai antara kota Bontang tahun 2022 mengalami peningkatan, yaitu sistem merit, SPBE, kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kualitas pelayanan publik, dan kualitas pengelolaan arsip. Namun beberapa nilai hasil antara yang mengalami penurunan yaitu ASN profesional, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, dan indeks kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

b. Penilaian LPPD

Penilaian LPPD tercapai 86,41% pada hasil penilaian LPPD Kota Bontang dari 130 (seratus tiga puluh) Indikator kinerja kunci yang terdiri dari 6 IKK makro dan 124 IKK outcome, terdapat 10 IKK yang capaian kinerjanya rendah, 17 IKK yang tidak lengkap data dukungannya.

c. Opini BPK

Selama 10 tahun berturut-turut Kota Bontang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum. Penjelasan laporan keuangan juga telah disajikan secara memadai, informatif dan akuntabel.



2. Meningkatnya kondusifitas wilayah

Pada sasaran diatas terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu

- a. Konflik di Kota Bontang pada tahun 2023 mengalami penurunan jumlah kejadian.
- b. Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum dapat diatasi dengan baik yang dibuktikan dengan terselesaikannya semua gangguan.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa Kota Bontang dapat menjaga kondusifitas wilayah dengan baik.

3. Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju tangguh

Pada sasaran diatas mempunyai indikator kinerja Indeks Kualitas Perkotaan yang merupakan rerata dari Indeks Kualitas Infrastruktur dan Indeks Ketahanan Daerah. Capaian Indeks Kualitas Perkotaan pada tahun 2023 sebesar 64,16 masih belum mencapai target sebesar 70,16. Hal ini disebabkan karena capaian Indeks Ketahanan Daerah hanya mencapai 0,46 dari target sebesar 0,62. Salah satu penyebab tidak terpenuhinya capaian tersebut adalah belum tersedianya Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana. Kedua kegiatan ini, akan dilaksanakan pada tahun 2024.

4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari

Pembangunan merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Dilain pihak pembangunan dapat berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu menjadi tugas semua pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup ditengah berlangsungnya proses pembangunan. Hal ini yang mendasari ditetapkan indikator sasaran indeks kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan meliputi kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018). Untuk mengetahui keadaan kualitas lingkungan itu digunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 adalah sebesar 66,81 adapun capaian IKLH Kota Bontang adalah 100%.

5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan maka dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi non migas. Tingginya dominasi kegiatan Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang utamanya dimotori oleh aktivitas migas dan industri kimia, menyebabkan pengaruh lapangan usaha lain di dalam laju pertumbuhan perekonomian Kota Bontang kurang terlihat. Oleh sebab itu, maka Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas ditetapkan menjadi salah satu indikator sasaran Kota Bontang



dimaksudkan untuk melihat perkembangan aktivitas perekonomian di lapangan usaha selain migas.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi dari jenis jasa maupun barang yang dihasilkan juga meningkat, dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Sehingga pengangguran berkurang dan kemiskinan yang semakin menurun. Pertumbuhan yang positif menunjukkan terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menunjukkan terjadinya penurunan produksi barang dan jasa.

Pada tahun 2023, Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas Kota Bontang mengalami penurunan dari 5,35 menjadi 4,41. Hal ini disebabkan dari Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan tahun 2023 dari beberapa lapangan usaha mengalami penurunan seperti industri perikanan, Transportasi dan Pergudangan. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan geliat kegiatan ekonomi lokal.

6. Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas

Pada sasaran tersebut terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu

a. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Pada dimensi pendidikan, pada tahun 2023 anak-anak di Kota Bontang yang berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah (dapat menjalani pendidikan formal) selama 13,43 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,25 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 13,18 tahun.

b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Bontang masih dibawah angka harapan lama sekolah. Untuk tahun 2023 rata-rata lama sekolah pada angka 10,92 ini artinya masih setara pada jenjang SMA. Apabila dikonversikan pada jenjang pendidikan, penduduk Kota Bontang mengenyam minimal pada tingkat SMA kelas 2. Hal ini masih berada dibawah wajib belajar 12 tahun bagi penduduk usia 15 tahun ke atas. Capaian pada tahun 2023 ini telah meningkat dari realisasi pada tahun 2022 sebesar 0,11 poin tetapi masih perlu upaya lebih untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bontang.

c. Umur Harapan Hidup (UHH)

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur melalui Umur Harapan Hidup saat bayi di Kota Bontang yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,81 tahun, lebih lama 0,24 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup



penduduk. Meningkatnya pelayanan kesehatan, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Dengan demikian keberhasilan program kesehatan terutama dalam pencapaian indeks kesehatan dan usia harapan hidup bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan namun merupakan tanggung jawab bersama antara unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat.

7. Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing

Salah satu ukuran daya saing SDM dapat dilihat dari TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dimana pengukurnya adalah proporsi penduduk yang menganggur dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2022 angka TPT di Kota Bontang adalah sebesar 7,81 persen menjadi pada tahun 2023 sebesar 7,74 persen dengan jumlah pengangguran sebesar 7.348 orang. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka ini mengalami penurunan yang disebabkan oleh meningkatnya tingkat kesempatan kerja di Kota Bontang dan peningkatan kompetensi bagi calon tenaga kerja serta kualitas pendidikan yang semakin baik akan meningkatkan keterampilan dan kompetensi penduduk, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi.

8. Meningkatnya pemberdayaan sosial

Dari tahun 2022 sampai tahun 2023 tingkat kemiskinan Kota Bontang relatif mengalami penurunan, sebesar 0,43 persen poin menjadi 4,11. Penurunan ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk di Kota Bontang yang hidup di atas garis kemiskinan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya tingkat kesempatan kerja di Kota Bontang sehingga penduduk yang sebelumnya berada di bawah kemiskinan dapat terangkat ke atas garis kemiskinan.

3.2 Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan Pada Setiap Urusan

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintah wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, terdiri dari pendidikan dasar, kesehatan, pekerjaan umum



dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, sosial dan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sedangkan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, seperti tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan dan perpustakaan. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang diselenggarakan sesuai dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah seperti kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan dan industri.

Adapun urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pembagian Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	PENDIDIKAN
2	KESEHATAN
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
5	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
6	SOSIAL
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	TENAGA KERJA
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	PANGAN
4	PERTANAHAN
5	LINGKUNGAN HIDUP
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
9	PERHUBUNGAN
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
12	PENANAMAN MODAL
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
14	STATISTIK
15	PERSANDIAN
16	KEBUDAYAAN
17	PERPUSTAKAAN
18	KEARSIPAN



URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN
2	PARIWISATA
3	PERTANIAN
4	PERDAGANGAN
5	PERINDUSTRIAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
1	SEKRETARIAT DAERAH
2	SEKRETARIAT DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
1	PERENCANAAN
2	KEUANGAN
3	KEPEGAWAIAN
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
	INSPEKTORAT DAERAH
UNSUR KEWILAYAHAN	
	KECAMATAN
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Berikut ini diuraikan secara ringkas upaya pencapaian masing-masing melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sebagai berikut:

3.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 merupakan pelayanan publik yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mencakup penyelenggaraan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sosial, serta ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan jenis pelayanan yang wajib diterima oleh setiap orang sebagai warga negara, dimana di dalamnya telah diatur Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin bahwa pelayanan yang diberikan tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dasar di Kota Bontang, dijabarkan kedalam 6 urusan yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan beserta RSUD Taman Husada Kota Bontang
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan serta Satuan Polisi Pamong Praja
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang terdiri 6 urusan sebagai berikut:



1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Tabel 3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1) Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 2) Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 3) Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum	1 Laporan	1 Laporan			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	15 Unit	15 Unit			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	4 Laporan	4 Laporan			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	250 Unit	250 Unit			
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	49.69	81.07			
	APK SD/MI (Paket A setara SD)	103.85	103,49						



Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		4) Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023 perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023		APK SMP/ MTS (Paket B setara SMP)	103.06	105,87			
		5) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	56 Sekolah	56 Sekolah			
		6. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang dikelola	27 sekolah	28 sekolah			
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah satuan PAUD yang dikelola	149 sekolah	146 sekolah	Terdapat PAUD yang tidak diperpanjang izinnya karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan	- Memberikan pembinaan tentang tata cara pengajuan perpanjangan perijinan - Memberikan pembinaan kepada PAUD swasta agar dapat tetap beroperasi	
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang dikelola	50 sekolah	50 sekolah			
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	100%	100%			
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah kurikulum muatan lokal PAUD PNF yang ditetapkan	1 kurikulum	1 Kurikulum			



Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio guru/murid	504 rasio	616,74			
			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Rasio guru/murid per kelas rata- rata	Rasio guru/murid per kelas rata- rata (51.76 %)	61,67			
				2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (83.14%)	98,44			
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pendidikan dasar, PAUD dan non formal yang memiliki ijin	100%	100%			
			Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah izin Operasional Satuan PAUD PNF yang terbit	6 Dokumen	6 Dokumen			



2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Tabel 3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Kesehatan	Dinas Kesehatan	1) Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 2) Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 3) Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 4) Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023 perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 5) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 6) SK Wali kota Nomor 355 tahun 2023 ttg	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah (DINKES)	100 persen	100 persen			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 dokumen	8 dokumen			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	8 laporan	8 laporan			
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan			



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Percepatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan 7) SK Wali Kota Bontang Nomor 188.45/99/Dinkes/2023 ttg Pembentukan Tim Koordinasi Screening Hypotyroid Congenital Bayi Baru Lahir 8) Instruksi Wali Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Sehat Kota Bontang	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 laporan	12 laporan			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	1 laporan	1 laporan			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum	1 laporan	1 laporan			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sumber daya air, listrik, komunikasi dan Tenaga Kontrak Daerah	12 bulan	12 bulan			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aset Barang Milik Daerah terpelihara	12 bulan	12 bulan			
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1) Angka kematian bayi 2) Angka Kematian Ibu 3) Cakupan kepeserataan JKN	1) 11 per 1000 Kelahiran hidup 2) 200 per 100.000 kelahiran hidup 3) 100 persen	1) 13,48 per 1000 Kelahiran hidup 2) 0 per 100.000 kelahiran hidup 3) 100 persen	1. Kurangnya pengetahuan ibu tentang pemeriksaan kesehatan triwulan pertama 2. Rendahnya kesadaran ibu dalam mengikuti kelas ibu hamil yang disediakan	1. Melakukan screening layak hamil dan evaluasinya 2. Melakukan Audit maternal perinatal 3. Melakukan bimbingan penyuluhan dan pemeriksaan	



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				4) Ketersediaan obat esensial	4) 100 persen	4) 100 persen	3. Belum semua catin mendapatkan bimbingan perkawinan di lembaga agama	kesehatan calon pengantin. 4. Melaksanakan monitoring kesehatan ibu hamil 5. Penyediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP Sesuai standar	100 persen	83 Persen	Belum semua fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (6 Puskesmas sudah terakreditasi yaitu 1 klinik pns dan 2 klinik swasta dan 12 klinik swasta pratama belum terakreditasi)	Melakukan pembimbingan dan penilaian akreditasi terhadap semua klinik swasta	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka kesembuhan TB	93 persen	85 Persen	1. Adanya pasien yang tidak melanjutkan pengobatan karena adanya penyakit-penyakit penyerta 2. Putusnya pelacakan pasien TB	1. Melakukan pendampingan minum obat bagi pasien TB 2. Screening dan pelacakan kasus pasien TB	



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							karena perpindahan tempat tinggal		
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Ketersediaan sistem informasi kesehatan terpadu/terintegrasi	90 persen	100 Persen			
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan Rujukan (FKTL) Berizin	100 persen	100 Persen			
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga Kesehatan berizin (Dinkes)	100 persen	100 Persen			
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan SDMK berdasarkan Rencana Kebutuhan Fasyankes	42 persen	92 Persen			
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan SDMK mendapatkan pengembangan kompetensi	100 persen	85 Persen	Belum terpenuhinya kebutuhan dokter spesialis	Pemenuhan kebutuhan dokter spesialis melalui beasiswa pendidikan spesialis (5 orang Dokter)	



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana Produksi Obat, Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Berizin	100 persen	97,08 Persen	Belum optimalnya respon/tindak lanjut pemilik toko obat dan pengolah makanan jajanan	Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada semua sarana distribusi obat dan pengolah makanan jajanan bersama tim BPOM	
			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sarana produksi dan distribusi obat berizin dan memenuhi standar	94 persen	74 Persen	Adanya 11 toko obat yang belum berizin	Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada semua sarana distribusi obat	
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana PIRT yang berizin yang memenuhi standar	60 persen	65 Persen			
			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan	56 persen	96 Persen			



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			dan Depot Air Minum (DAM)						
			Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat kesehatan sesuai standar	96 persen	73 Persen	Belum semua pelaku pengolah makanan jajanan mendapatkan pelatihan laik hygiene	Melakukan pelatihan laik hygiene pada penjamah makanan	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penerapan 5 kluster kebijakan GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)	40 persen	67 Persen			
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PHBS 5 Tatanan (Rumah tangga sekolah institusi kesehatan tempat kerja tempat umum)	60 persen	73 Persen			
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Persentase Posyandu Aktif	80 persen	89 Persen			



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
	Rumah Sakit Umum Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah (RSUD)	100 persen	100 persen			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	100 persen	100 persen			
			Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 persen	100 persen			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum	100 persen	100 persen			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sumber daya air, listrik, komunikasi dan Tenaga Kontrak Daerah	100 persen	100 persen			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aset Barang Milik Daerah terpelihara	100 persen	100 persen			
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga Kesehatan berizin (RSUD)	100 persen	100 persen			



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan SDMK mendapatkan pengembangan kompetensi	100 persen	100 persen			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (RSUD)	Persentase Penerapan 5 kluster kebijakan GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)	100 persen	100 persen			
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PHBS 5 Tatanan (Rumah tangga sekolah institusi kesehatan tempat kerja tempat umum)	5 Dokumen	5 Dokumen			



3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD	
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA	1. Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 2. Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 3. Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 4. Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA							
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%				
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%				
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	100%	100%				
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	100%	100%				
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	100%	100%				
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	100%	100%				
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	100%				



Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023	Pemerintahan Daerah						
		5. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase kapasitas unit air tanah / air baku	87,00%	79,56%	Penyediaan air baku belum mampu mencukupi kebutuhan air baku yang diperlukan	Peningkatan penyediaan air baku dengan pembangunan sumur dalam untuk jangka pendek dan memanfaatkan sumber air permukaan untuk jangka menengah-panjang	
				Persentase kapasitas aliran sungai	68,00%	70,73%			
				Persentase daya tampung danau / folder /kolam retensi	85,13%	85,17%	Daya tampung danau yang ada tidak mampu menampung seluruh limpasan air	Terus melakukan normalisasi danau untuk jangka pendek dan membangun polder pengendali banjir untuk jangka menengah-panjang	
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang turap dan tanggul yang telah dibangun/ panjang keseluruhan sungai	1220 meter	1610 meter			
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum layak	83,12%	85,72%	Kontinuitas distribusi air minum belum mampu dilakukan sesuai SPM (24 jam)	Peningkatan penyediaan air baku	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Presentase rumah tangga berakses air bersih	85.71%	85.71%			



Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			di Daerah Kabupaten/Kota						
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase kapasitas TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS	44,00%	41,88%	Umur TPA diperkirakan tinggal 5 tahun	Menyiapkan perluasan TPA dan mengurangi jumlah sampah yang masuk TPA dengan membangun TPS-3R	
			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang terlayani persampahannya	200 rumah tangga	200 rumah tangga			
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	96,00%	96,02%	Masih terdapatnya rumah tangga yang tidak memiliki akses air limbah domestik	Optimalisasi terhadap SPAL-SPAL komunal eksisting dan penyediaan SPAL individual	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah untuk rumah tangga	170 rumah tangga	244 rumah tangga			
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	92,52%	97,92%			
			Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara	53590 meter	5233,62 meter			



Pemerintah Kota Bontang

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yg memenuhi persyaratan teknis	63,93%	57,35%			
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Cakupan bangunan gedung daerah dan cakupan bangunan ber IMB	0.48%	0.48%			
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase sempadan sungai yang tertata	12,46%	15,61%			
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Sempadan Sungai yang tertata	2 kawasan	2 kawasan			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi mantap	90,01%	88,46%			
				Persentase drainase jalan dalam kondisi baik	92,81%	94,11%			
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	8045 meter	17291,59 meter			
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	79,50%	80,42%			



Pemerintah Kota Bontang

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga kerja terampil konstruksi yang telah tersertifikasi	1011 orang	1388 orang			
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data dan Informasi SIPJAKI	100%	100%			
			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan	100%	100%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian tata ruang	88,90%	94,17%			
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan dokumen tata ruang	50%	50%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan dokumen tata ruang	25%	25%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pemahaman Pedoman pemanfaatan Ruang Kota Bontang	100%	100%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi	Terpenuhinya pemahaman	100%	100%			



Pemerintah Kota Bontang

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pedoman pengendalian Ruang Kota Bontang					



4) **Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Tabel 3.6 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1. Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 2. Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 3. Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Fasilitas Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana kabupaten/kota	16%	100%			
				Persentase fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	20.50%	44.44%			
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dan jenis data rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi rumah program pemerintah	1 dokumen	1 dokumen			
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah rehabilitasi korban bencana atau relokasi	9 unit	4 unit	Kurangnya koordinasi terkait program relokasi rumah	Diperlukannya koordinasi lebih baik guna sinkronisasi program kegiatan khususnya pada tahapan kebijakan	



Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		4. Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023 perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023		program pemerintah yang dibangun				maupun penganggaran, terutama pada OPD lain bersinggungan dan memerlukan program relokasi rumah.	
		5. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah RT, KK & Jiwa penghuni rumah susun umum & rumah khusus yang dibina	406 Jiwa	317 Jiwa	Rusunawa Loktuan dari 70 unit hanya terisi 56 unit dan Rusunawa Guntung dari 90 unit terisi 17 unit. Rusun Guntung tidak di dukung oleh fasilitas dapur pribadi, yang tersedia hanya dapur umum.	Mempromosikan kembali rusunawa dengan membuat brosur maupun promosi melalui media sosial serta mendorong Kementerian PUPR untuk segera menyerahkan aset Rusunawa Loktuan dan Guntung agar Pemerintah Kota Bontang dapat memperbaiki rusunawa.	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yg ditangani	56.81%	68.42%			
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang diterbitkan	1 dokumen	1 dokumen			
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen penataan	2 dokumen	2 dokumen			



Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha					
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditangani	4,21 Ha	5,07 Ha			
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh	2.63%	0.79%			
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas	18 unit rumah	18 unit			



Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	92.80%	94.76%			
				Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	92.86%	93.48%			
				Persentase ketersediaan sarana prasarana TPU	60%	60%			
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah sarana dan prasarana TPU	10.276,64 meter	10.276,64 meter			
				Panjang drainase yang dibangun/dir ehab	7.401,03 meter	7.401,03 meter			
				Panjang jalan yang dibangun/dir ehab	30 jenis	30 jenis			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran	100%	100%			



Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				n, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun					
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan perangkat daerah	100%	100%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	100%	100%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan layanan administrasi umum yang disediakan	100%	100%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100%	100%			



5) **Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

Tabel 3.7 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah Pelaksanaan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut DPRD
Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban	SATPOL PP	1. Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 2. Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 3. Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 4. Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023 perubahan Rencana Kerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah (Satpol PP)	100%	100%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah Pelaksanaan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut DPRD
		5. Pemerintah Daerah tahun 2023 6. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100% (1294 / 1294 * 100)			
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	75%	93,33% (14 / 15 * 100)			
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupataen/Kota	Persentase Peningkatan Penanganan Gangguan Ketenraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Daerah	100%	100%	Masih terbatasnya kualitas SDM teknis Satpol PP Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan Diklat Dasar untuk SDM Satpol PP Penambahan Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan dilapangan Sesuai Ketentuan didalam Permendagri 17 Tahun 2019	
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/WaliKota	75%	93,33%	Masih belum terjalannya koordinasi terhadap pemangku PERDA dan PERWALI sehingga pelaksanaan dilapangan belum berjalan dengan baik	Mengundang OPD terkait untuk melakukan rapat koordinasi terkait PERDA dan PERWALI yang akan di tegakkan sehingga pelaksanaan	



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah Pelaksanaan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut DPRD
								dilapangan berjalan sesuai dengan aturan	
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	100%	0%	Belum adanya surat panggilan dari Kemendagri terkait dengan diklat PPNS	Melakukan koordinasi ke Mendagri dan Satpol PP Provinsi Kaltim	
Sub Urusan Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%			
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%			
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%			
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100%	100%			
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	100%	100%			
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100%	100%			
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Capaian layanan Pemadaman, penyelamatan dan	100%	95,5%	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan	Untuk mendukung pencapaian target Indikator	



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah Pelaksanaan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut DPRD
				evakuasi korban kebakaran			Penyelamatan Kota Bontang belum memadai untuk mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Yakni : Persentase capaian layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran dan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah	Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang yaitu : Persentase capaian layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran dan amanat Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran maka perlu pengadaan lahan dan bangunan pos-pos pemadam kebakaran beserta sarana dan prasarananya di beberapa titik pada daerah wilayah manajemen kebakaran (WMK) Kota Bontang antara lain: Pos Telihan/Kanaan dan pos-pos mini pada	



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah Pelaksanaan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut DPRD
								pemukiman penduduk di atas air antara lain Bontang kuala, berbas pantai dan selambai.	
							Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas.	Perlu penambahan sumberdaya aparatur dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan melalui pendidikan dan pelatihan sesuai standar kualifikasi yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik	



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah Pelaksanaan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut DPRD
								Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam kebakaran di Daerah	
							Ketersediaan sumber air sebagai media pemadam kebakaran belum memadai.	Dalam rangka memenuhi kebutuhan ketersediaan sumber air sebagai media pemadam kebakaran maka perlu dilakukan pendekatan dan kerjasama dengan pemilik/pengel ola sumber air (PDAM. Kenari Water Park, Surya Raya PT. Badak, PT. Pupuk Kaltim dan lain-lain) dan atau pengadaan sumber air sendiri dengan pengadaan sumur bor dan kolam air di beberapa titik pada WMK	



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah Pelaksanaan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut DPRD
			Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan pemadaman kebakaran dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100%	100%			
			Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase sarana & prasarana proteksi kebakaran yg dinilai sesuai standar	100%	100%			
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase layanan pemadaman kebakaran dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran	100%	100%			
Sub Urusan Bencana	BPBD		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah (BPBD)	100%	100%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah Pelaksanaan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut DPRD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100%	100%			
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana yang	100%	68%			
				memperoleh layanan kebencanaan					
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	95,88% (16436/17142*100)	Pelaksanaan kegiatan KIE tidak terdokumentasi dengan baik	Peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak eksternal	
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	8,20% (1406/17142*100)	1. Belum ada simulasi penanggulangan bencana tingkat kota; 2. Masih terbatasnya kapasitasSDM	1. Koordinasi Pelaksanaan kegiatan simulasi penanggulangan bencana setiap tahun	



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah Pelaksanaan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut DPRD
							BPBD; 3. Masih kurangnya sarana prasarana penanggulangan bencana	dengan kolaborasi para pihak; 2. Peningkatan kapasitas SDM BPBD; 3. Peningkatan sarana prasarana penanggulangan bencana dengan sinergi para pihak	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100% (130/130*100)			



6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Tabel 3.8 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Capaian Program dan Kegiatan pada Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD	
Urusan Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%				
		2. Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan	1 Jenis	1 Jenis			
		3. Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian	2 Jenis	2 Jenis			
		4. Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023 perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum	6 Jenis	6 Jenis			
		5. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Jenis	1 Jenis			
		6. Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/413/DSPM/2023 Tentang Penerima Bantuan Sosial Terencana Berupa Uang Pada Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Jenis	3 Jenis			
		7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	4 Jenis	4 Jenis			



Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		2022 Tentang Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		100%	100%			
		8. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Rantang Kasih.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	4 Lembaga	4 Lembaga			
		9. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Nontunai Daerah.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100%	100%			
		10. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	7 Jenis	7 Jenis			
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah pelayanan rehabilitasi sosial	5 Jenis	5 Jenis			
			PROGRAM PERLINDUNGAN	Persentase Pemerlu Pelayanan	100%	100%			



Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator program/ kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			DAN JAMINAN SOSIAL	Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial; Tingkat validitas data penduduk miskin (indikator daerah)					
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan data fakir miskin	100%	100%			
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam/sosial yang terlayani	100%	100%			
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	5 Jenis	5 Jenis	Belum ada Gudang Logistik kebencanaan dan Fasilitas pendukung pergudangan (peralatan dan Perlengkapan)	Pembangunan Gudang logistik kebencanaan dan penyediaan fasilitas pendukung pergudangan (peralatan dan Perlengkapan)	
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	1 Jenis	1 Jenis			



3.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 merupakan urusan pemerintahan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah selain dari urusan pemerintahan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sosial, serta ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang terdiri 18 urusan sebagai berikut:



1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Tabel 3.9 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Tenaga Kerja

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah Pelaksanaan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Ke	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan	1. Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 2. Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 3. Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 4. Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023 perubahan Rencana Kerja Pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100%	100%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	100%	100%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan yang menunjang layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100%	100%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	100%	100%			
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase implementasi kebijakan bidang ketenagakerjaan	70%	92,31%			
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja yang disusun	100%	100%			



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah Pelaksanaan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Ke	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
		Daerah tahun 2023	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase produktifitas tenaga kerja; Persentase pencari kerja yang dilatih	4,58%	14,13%			
		5. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan unit kompetensi pada tahun n	100%	100%			
		6. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan	Pembinaan Lembaga Pendidikan Kerja Swasta	persentase terlaksananya pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	100%	100%			
			Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	persentase terlaksananya konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil	100%	100%			
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	20%	28,35%			
			Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten /Kota	persentase terpenuhinya pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	100%	100%			
			Pengelolaan Informasi Pasar kerja	persentase data dan informasi pasar kerja yang dikelola	100%	100%			
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	6,21%	2,33%			
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi	Persentase perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan dan	100%	100%			



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah Pelaksanaan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Ke	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota	menyusun pendaftaran perjanjian kerjasama yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota					
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten / Kota	persentase terpenuhinya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	100%	100%			



2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 3.10 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1. Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. 2. Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. 3. Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023. 4. Perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DPPKB	100%	100%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan	100%	100%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	100%	100%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Urusan Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan di DPPKB	100%	100%			
			Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Urusan Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%			
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	- Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah - Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	100%	98,68%	Belum Maksimalny Pemahaman tentang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada OPD di Kota Bontang serta belum adanya monitoring dan evaluasi PUG	Peningkatan pemahaman tentang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada OPD di Kota Bontang serta melakukan monitoring dan evaluasi PUG	
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	98,68%						



Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		5. Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023 perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase tertanganinya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	100%	100%			
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
		6. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	tersedianya layanan UPTD PPA	100%	100%			
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga	100%	100%			
		7. Perwali Bontang Nomor 42 Tahun 2018 Tugas Fungsi dan Pokok DPPKB.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Puspaga, SDM, Jejaring antar lembaga Penyedia Layanan	100%	100%			
		8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)	100%	100%			
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan data gender dan anak terpadu	100%	100%			



Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		9. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Data Gender Anak Terpadu	100%	100%			
		10. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pencegahan Perkawainan Pada Usia Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Predikat Kota Layak Anak	100%	100%			
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang telah mendapatkan Pelembagaan PHA	100%	100%			
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	persentase layanan anak yang melakukan perlindungan khusus	100%	100%			
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananyaPencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
			Penyediaan Layanan pengaduan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase penyelesaian kasus yang masuk	100%	100%			
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananyaPenguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			



3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Tabel 3.11 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pangan

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan lanjut Rekomendasi DPRD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian	1. Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 2. Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 3. Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 4. Peraturan wali kota nomor 15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100			
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100%	100			
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100%	100			
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	100%	100			
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100%	100			
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100%	100			
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100%	100			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	65 Laporan	62			
			Kegiatan Pemeliharaan	Persentase	100%	100			



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjutr Rekomendasi DPRD
		tahun 2023 perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		5. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Nilai Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi) ; Ketersediaan Energi dan Protein	88 Nilai AKE = 2.400 Poin dan AKP 63 AKE/AKP	88,5 2386,65 /99,53			
		6. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 10 tahun 2023 tentang Teknis pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	5 Dokumen	5			
			Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	60 Ton	10.729	Penyaluran Cadangan Pangan belum dapat dilakukan karena data belum terverivasi secara detail	Tahun 2024 akan dilakukan verivasi data calon penerima manfaat	
			Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Tingkat Konsumsi Energi (%TKE) dan Protein (%TKP) terhadap target 2150 kkal/kap/hari dan protein 57 gram/kap/hari	2150 kkal/kap/hari dan protein 57 gram/kap/hari	1952,8 kkal/kap/hari dan 65,68 gram/kap/hari	a. Capaian Angka Kecukupan energi dan skor pola pangan harapan di tingkat konsumsi belum mencapai	a. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM Petugas dalam analisis konsumsi pangan dan ketahanan	



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjutr Rekomendasi DPRD
				WNPG tahun 2012			standar nasional. Pengetahuan dan Keterampilan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan Beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) belum maksimal	pangan masyarakat b. Peningkatan sosialisasi, edukasi dan promosi konsumsi pangan B2SA . mempromosikan, sosialisasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi Pangan; b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan petugas untuk mengonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip Gizi seimbang sejak dini ; c. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan Lokal; dan d. mengembangkan dan teknologi tepat guna untuk pengolahan Pangan Lokal.	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase ketersediaan energi dan protein perkapita	100%	100			



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjuz Rekomendasi DPRD
			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	100%	100			
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	100%	100			
			Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fungsi Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	100%	100	a. Masih kurangnya anggaran untuk pengujian laboratorium keamanan mutu pangan segar untuk sampel pangan segar tingkat/skala Kota b. Masih kurangnya sarana penunjang pada kegiatan pengawasan keamanan mutu pangan segar seperti : test kit uji cepat, dan kendaraan laboratorium keliling	a. Menambah anggaran pengujian laboratorium sampel keamanan mutu pangan segar b. Perlu dianggarkan segera untuk pembelian kendaraan (minimal roda 2 untuk laboratorium keliling serta perlatan test kit uji cepat dalam menunjang pelayanan keamanan mutu pangan ke masyarakat	



4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Tabel 3.12 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pertanahan

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD	
Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1) Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan	100%	100%				
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas penanganan sengketa tanah garapan	10 dokumen	10 dokumen	Ada beberapa kasus sengketa yang masih dalam tahap koordinasi dan konsultasi			
		2) Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi dan Santunan Tanah	50%	100%				
			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen				
			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Tanah Kosong yang Dimanfaatkan	10%	24,72%				
3) Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Persentase Laporan Koordinasi dalam rangka	100%	73.68%						



Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		dan belanja daerah tahun 2023		Penyelesaian Tanah Kosong					
		4) Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023 perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase penyediaan tanah untuk masyarakat	60%	100%			
			Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah fasilitasi penerbitan izin membuka tanah	3 lokasi	3 lokasi			
		5) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penyediaan tanah untuk fasilitas publik	10%	100%			
			Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Peta Zona Nilai Tanah	1 dokumen	1 dokumen			



5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Tabel 3.13 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Lingkungan Hidup

Capaian Program dan Kegiatan pada Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
Urusan Lingkungan Hidup	DLH	1) Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 2) Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 3) Perubahan ketiga atas peraturan wali kota	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi	6 dokumen	6 dokumen			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian	100%	100%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pengelolaan administrasi umum	100%	100%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah	100%	100%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang	100%	100%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%			
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN	Cakupan pengendalian pencemaran	87%	99.41%				



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023	DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	dan/atau kerusakan lingkungan hidup					
		4) Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023 perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan pemantauan kualitas lingkungan hidup	95%	99.41%			
		5) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan	100%	100%			
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan pengelolaan Kehati (%)	64%	55%	Realisasi tahun 2023 tidak tercapai karena anggaran penyusunan dokumen RIP KEHATI pada tahun 2023 tidak mencukupi, sehingga dialokasikan kembali pada tahun anggaran 2024.	Dokumen RIP KEHATI akan disusun pada tahun 2024.	
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas pengelolaan Kehati	48,56 Ha	51,06 Ha			
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	100%	100%			
			Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah laporan pengelolaan limbah B3 dari kantor dan oli bekas	1 laporan	1 laporan			
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan	96%	96.15%			



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	terhadap izin lingkungan atau PPLH					
			Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemda Kab/Kota	Terlaksananya kegiatan pembinaan pengawasan thd pelaku usaha dan/atau kegiatan	100%	100%			
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan kapasitas diklat dan penyuluhan	20%	20%			
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis diklat dan penyuluhan	2 jenis	2 jenis			
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	cakupan penghargaan lingkungan hidup (%)	100%	100%			
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan yang diberikan	3 jenis	4 jenis			
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Pengaduan	100%	100%			
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Persentase pengaduan yg diselesaikan	100%	100%			



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	- Persentase Pengurangan Sampah - Persentase Penanganan Sampah	26 % 73 %	30,11% 69,58%	Persentase penanganan sampah setiap tahunnya diharapkan semakin berkurang dibarengi dengan peningkatan persentase pengurangan sampah.		
			Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang tereduksi	10.479,48 ton	11.690,7 ton			
		Jumlah sampah yang tertangani		29.423 ,16ton	27.016,15 ton				



6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 3.14 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian Program dan Kegiatan pada Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi Dprd
Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1) Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 2) Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 3) Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa	100%	100%			



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi Dprd
		tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
		4) Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
		perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan KTP; Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	99 ; 99 Persen	100% ; 99%			
		5) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase terlaksananya kegiatan pendaftaran kependudukan	100%	100%			
		tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	100%			
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran ; Rasio bayi berakte kelahiran ; Rasio pasangan berakte nikah	100% 100% 100%	100% 100% 100%			



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi Dprd
			Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	100%	100%			
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan pengelolaan informasi Adminduk	100%	100%			
			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100%	100%			
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%			
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Presentase penyampaian data profil kependudukan	100%	100%			
			Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan	100%	100%			



7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 3.15 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Sosial dan Pembebrdayaan Masyarakat	1) Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN HUKUM ADAT	Persentase LKK dan LAK yang aktif	100%	100%			
		2) Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023.							
		3) Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023.							
		4) Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023 perubahan Rencana Kerja							
		5) Pemerintah Daerah tahun 2023.							
		6) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023.							
		7) SK Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/377/DSPM/2023 Tentang Pemberian Insentif Bagi Pengurus Rukun Tetangga, SK Wali Kota Bontang Nomor							



Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		100.3.3.3/378/DSPM/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 500 Tahun 2018 Tentang Pemberian Insentif Bagi Kader Pelayanan Pos Pelayanan Terpadu							



8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 3.16 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1) Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. 2) Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. 3) Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	rata-rata jumlah anak per keluarga	2 anak per keluarga	1 anak per keluarga	-	-	
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	tercapainya pengendalian kuantitas penduduk	100%	100%	-	-	
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	terpetakannya Perkiraan Pengendalian Penduduk	100%	100%	-	-	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase peserta KB aktif	100%	99,61%	Masih kurangnya kesadaran PUS dalam penggunaan kontrasepsi	Meningkatkan kegiatan edukasi bagi masyarakat dalam penggunaan kontrasepsi	
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	pelaksanaan rangkaian kegiatan HARGANAS	100%	100%	-	-	



Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		4) Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023 perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100%	100%			
		5) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	terkendalinya dan terdistribusinya alat obat kontrasepsi dan pelayanan KB	100%	98,42%	Inventarisasi data sasaran khususnya Unmet Need BNBA yang belum tersedia sampai di tingkat Kader RT	Pembuatan data sasaran Unmet Need BNBA	
							Relatif masih kurangnya penjangkaran akseptor MKJP oleh Petugas Lini Lapangan	Peningkatan penjangkaran akseptor MKJP oleh Petugas Lini Lapangan dengan strategi Sosialisasi dan KIE yang tepat sasaran	
							Relatif masih kurangnya animo masyarakat untuk menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang	Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang	
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan	terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta	100%	100%			



Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	persentase kelompok pemberdayaan bangga kencana	100%	100%			
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga	100%	100%			
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	tersedianya kelompok tribina dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor yang dibina dan dibentuk	100%	100%			



9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Tabel 3.17 Urusan Pemerintah Wajib Bidang Perhubungan

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksanaan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Perhubungan	Dinas Perhubungan	1) Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 2) Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 3) Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 4) Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023 perubahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja daerah yang tersusun	100%	100%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan administiras dan laporan keuangan perangkat daerah	100%	100%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Layanan administrasi kepegawaian	100%	100%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang Mendapatkan layanan Administrasi perkantoran	100%	100%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100%	100%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum kantor	100%	100%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam	100%	100%			



Pemerintah Kota Bontang

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksanan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023		kondisi baik					
		5) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan	100%	100%			
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik	100%	100%			
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Cakupan pengelolaan fasilitas parkir	100%	100%			
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan pengelolaan Pengujian kendaraan bermotor	100%	100%			
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100%	100%			
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan angkutan taksi	100%	100%			
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Pengelolaan Pelayaran	100%	100%			
			Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Cakupan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	100%	100%			



10. Komunikasi dan Informatika

Tabel 3.18 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	1) Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 2) Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 3) Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 4) Peraturan wali kota	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen			
			Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas	47,89%	47,89%		Saat ini penyebaran informasi publik sudah dilaksanakan melalui media cetak, media online, media elektronik, baliho, videotron yang berisikan	



Pemerintah Kota Bontang

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		nomor 15 tahun 2023 perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023		pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota				kebijakan dan program prioritas pemerintah	
		5) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemrintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai STRAKOM dan SOP yang telah ditetapkan	80%	80%		Saat ini proses diseminasi dan layanan informasi publik sudah dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM dan SOP yang telah ditetapkan melalui kerjasama dengan media cetak, media online, dan media elektronik, serta pelaksanaan pembinaan PPID pelaksana dan sertifikasi uji kompetensi Wartawan	
				Persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah	80%	80%		Saat ini komunitas masyarakat yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah sudah dilaksanakan melalui pelatihan untuk Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dan keikutsertaan dalam pameran yang dilaksanakan di luar Daerah	
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	34%	60%	Pada saat Target renstra disusun pada tahun 2021 jumlah layanan publik terintegrasi ada 3 dari 9 layanan	Sedangkan Pada saat realisasi tahun 2023 jumlah layanan publik terintegrasi bertambah menjadi 6 dari 10 layanan	
				Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi ;	80,64%	80,64%	Jumlah OPD yang telah terhubung dengan akses internet yang	Di tahun 2023 capaian persentase yang ditargetkan tercapai sebanyak 80,64 %	



Pemerintah Kota Bontang

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			disediakan Dinas Kominfo sebanyak 25 dari 31 OPD		
			Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ruang publik yang memiliki akses internet	80,64	80,64	Jumlah OPD yang telah terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas Kominfo sebanyak 25 dari 31 OPD	Di tahun 2023 capaian persentase yang ditargetkan tercapai sebanyak 80,64 %	



11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 3.19 Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Capaian Program dan Kegiatan pada Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kebijakan	Indikator Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi masalah	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	1) Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 2) Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 3) Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 4) Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023 perubahan	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Kopersi yang patuh terhadap regulasi perkoperasian	73%	47%	Terdapat 16 koperasi yg tidak aktif	akan ditindaklanjuti di tahun 2024 untuk dilakukan monitoring keberlanjutan koperasi	
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat pelaksanaan pemeriksaan dan pengawassan Koperasi, Koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam	100	100			
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Jumlah KSP /USP yang dinilai Kesehatan	47%	66,6%			
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang dilakukan penilaian	100	100			
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Kapasitas SDM Koperasi	100%	51,12%	-Target kinerja tidak tercapai karena setelah pelaksanaan program ternyata	Tahun 2024 akan dilakukan pelatihan lagi kepada pengurus dan	



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kebijakan	Indikator Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi masalah	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
		Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 5) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023					anggaran tidak mencukupi -Diharapkan seluruh pengurus dan pengawas koperasi mendapatkan pendidikan dan pelatihan	pengawas koperasi yang belum mendapatkan pelatihan sebanyak 217 orang	
		6) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 18 tahun 2023 tentang Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksanaan teknis daerah metrologi legal pada Dinas Koperasi, usaha kecil, menengah dan perdagangan	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	100	51,12			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjalin Kemitraan Usaha	2,92%	3,57			
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang di berdayakan melalui pendataan , kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemilik kepentingan	2,09	2,126			
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	0,50%	2,06%			
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Capaian atas peningkatan Aset dan omzet pelaku usaha mikro	0,50	5,23			



12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Tabel 3.20 Urusan Pemerintahan Wajib Penanaman Modal

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1) Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 2) Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 3) Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 dokumen	12 dokumen			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	71 dokumen	71 dokumen			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum	17 dokumen	17 dokumen			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang	100%	100%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang	22 unit	22 unit			
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi	1.450.897.256.291	2.427.547.315.302			
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rancangan Perundang-undangan yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen						



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
		pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 4) Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023 perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 5) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi yang dibuat	2 dokumen	2 dokumen	dok. peta potensi yang dibuat ada 2 yaitu buku peta potensi kawasan peruntukan industri di bontang lestari dan buku potensi investasi umkm di kota bontang		
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Investor	102	285			
			Penyelenggaraan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	3 dokumen	3 dokumen			
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai IKM	88	97,49			
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	500 izin	1.013 izin			
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase ketaatan perusahaan terhadap aturan penanaman modal	44,44	87,65			
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan	40	40	1). Aplikasi yang digunakan untuk mengakses	1) Memberikan informasi secara transparan	



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
			Kewenangan Daerah Kabupten/Kota	pelaksanaan penanaman modal			LKPM saat ini masih menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat, dalam hal ini BKPM	kepada Pelaku Usaha, bahwa prosedur penyampaian LKPM saat ini masih menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat (BKPM)	
							2). Adanya keterlambatan dalam pelaporan LKPM online yang disampaikan oleh pihak Investor kepada BKPM	2). Memberikan surat konfirmasi berupa peringatan kepada Pihak Investor yang belum menyampaika n LKPM-Nya	
							3). Keterlambatan penyampaian LKPM, dalam hal pemberian sanksi masih menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	3). Pemerintah Pusat (BKPM) dapat memberikan Kewenangan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah (DPMPSTP), mengenai sanksi yang diberikan dan untuk selanjutnya akan dilakukan proses validasi data	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM	Persentase ketersediaan Data perizinan	100	100			



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
			INFORMASI PENANAMAN MODAL						
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemenuhan Permintaan Data perizinan dan Non Perizinan	500 izin	1.013 izin	1). Masih terkendalanya jaringan aplikasi OSS-RBA dari Pemerintah Pusat (BKPM)	1). Selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat (BKPM)	
							2). Masih ada masyarakat / pemohon yang belum sepenuhnya mengerti untuk mengisi formulir izin usaha-Nya melalui aplikasi OSS-RBA	2). Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi di setiap Kelurahan dan Kecamatan	
							3). Persyaratan untuk penerbitan PBG masih terlalu berat bagi masyarakat (ada 13 persyaratan)	3). Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi di setiap Kelurahan dan Kecamatan	
							4)Terkait dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB) terlalu memberatkan	4). Masih perlu dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (BKPM) dan instansi teknis	
							5)Untuk Tahun ini belum ada Pembangunan Industri sehingga menurunnya penerimaan Retribusi PBG	5). Perlu dilakukan koordinasi secara intens dengan Pihak Perusahaan di Kota Bontang	



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
							6).Belum adanya revisi perubahan atas PERDA yang berkaitan dengan Retribusi	6). Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum SETDA	
							7)Permohonan masuk PBG 117 ada di DPUPR, yang terbit di DPMPSTP ada 16 Izin PBG	7). Selalu melakukan koordinasi dengan DPUPR	



13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 3.21 Urusan Pemerintahan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjuz Rekomendasi DPRD
Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1) Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 2) Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 3) Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 4) Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023 perubahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan daerah	100%	100%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen OPD	4 Dokumen	4 Dokumen			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100%	100%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Perangkat Daerah yang Terpenuhi	12 Bulan	12 Bulan			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kebutuhan Barang dan Jasa Untuk Menunjang Pelayanan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang	3 Unit	3 Unit			



Pemerintah Kota Bontang

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
		Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023		Urusan Pemerintah Daerah					
		5) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Sarana dan Prasarana OPD Untuk Menunjang Pelayanan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang yang dipelihara Oleh Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase pembinaan dan pengembangan kapasitas daya saing organisasi kepemudaan (OKP)	100%	100%	Kurangnya Kesadaran Pemuda/Pemu di Dalam Mengikuti Program Kapasitas Daya Saing Pemuda	Mengadakan Sosialisasi kepada Pemuda Kota Bontang Terkait Pentingnya Pemuda Dalam Berprestasi	
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang Berprestasi	169 Orang	110 orang	Pemuda Pelopor Tidak Mengikuti Seleksi Di Tingkat Provinsi dan Tidak Mengikuti Jambore Pemuda Daerah (JPD) Tingkat Provinsi	Mengusulkan Anggaran Agar Kegiatan Tersebut Bisa Di Ikuti	



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
							Karena Tidak Ketersediaan Anggaran		
							Terlambatnya Informasi Dari Dispora Provinsi Terkait Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Koordinasi Dengan DISPORA Provinsi Perlu Di Tingkatkan	
							Kurangnya Pelatihan Bagi Wirausaha Muda Pemula	Mengusulkan Anggaran Kegiatan Pemberdayaan Bagi Wirausaha Muda Pemula	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlit yang berprestasi	51,82 %	62,51 %	Belum Adanya Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pelajar	Membuat perencanaan terkait PPLP dan koordinasi Dengan Bapelitbang terkait denngan Pendanaan terkait Pembangunan PPLP	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Prestasi Olahraga	6 Unit	6 Unit	Kurangnya Sarana Dan Prasarana Olahraga Bagi Atlet/Masyara kat	Menambah Sarana Dan Prasarana Olahraga Bagi Atlet	
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Atlet Yang	50 Medali	123 Medali	Belum Adanya Tenaga Teknis Bidang	Mengusulkan Permohonan	



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
			Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Memperoleh Medali			Olahraga (Pengembangan Sarana Dan Prasarana Olahraga)	Tenaga Teknis Ke BPKSDM	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Prestasi Atlet Olahraga Tingkat Provinsi	100%	100%	Kurangnya Pelatihan Bagi Pelaku Olahraga (Wasit, Pelatih DLL)	Mengadakan Pelatihan/Sertifikasi Bagi Pelaku Olahraga Kota Bontang	
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2 Komite	3 Komite	-	-	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	7 Kegiatan	8 Kegiatan	-	-	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	100%	100%	-	-	
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Anggota Organisasi Kepramukaan	2.840 Orang	5.629 Orang	-	-	



14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Tabel 3.22 Urusan Statistik

Capaian Program dan Kegiatan pada Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	1) Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 2) Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 3) Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 4) Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023 perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 5) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%			
				Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%			
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase data statistik sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	100%	100%			



Pemerintah Kota Bontang

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023							



15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Tabel 3.23 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Persandian

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	1) Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	63,02%	27,18% (36,90%)	adanya perubahan metode perhitungan indeks KAMI	Peningkatan SDM persandian diantaranya melalui pelatihan dan bimtek yang diselenggarakan BSSN	
		2) Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 3) Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	100%			



		4) Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023 perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 5) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Tabel 3.24 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kebudayaan

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator program/ kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1) Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 2) Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 3) Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelestarian budaya	100%	100%			
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian tradisional yang dilestarikan	18 Kesenian	18 Kesenian			
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat yang dibina	2 Lembaga	2 Lembaga			
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan kesenian	100%	100%			
			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah yang dibina	35 Kesenian	35 Kesenian			
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya	100%	100%			
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola	3 unit	3 unit			



Pemerintah Kota Bontang

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		daerah tahun 2023 4) Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023 perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 5) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023							



17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Tabel 3.25 Urusan Pemerintahan Wajib Perpustakaan

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1) Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 2) Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 3) Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan	Program penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	gaji dan tunjangan ask yang disediakan	100%	100%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah paket pakaian dinas	100%	100%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	100%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah paket mebel yang disediakan	100%	100%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100%	100%			



Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator program/ kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		4) dan belanja daerah tahun 2023 5) Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023 6) tahun 2023 perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	100%	100%			
		7) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pemustaka perpustakaan	38.500 Org dan 32 perpustakaan	79.462 Orang dan 50 Perpustakaan			
			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat kabupaten/kota melalui peningkatan koleksi	4 layanan	6 layanan			



18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Tabel 3.26 Urusan Pemerintahan Wajib Kearsipan

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator program/ kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1) Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 2) Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 3) Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 4) Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023 perubahan Rencana Kerja	Program Pengelolaan Arsip	persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baik	75 Persen	76,67 Persen			
			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	5 berkas	5 berkas			
			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	2 arsip	2 arsip			
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	250 pengguna	250 pengguna			
			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	13 Persen	16,67 persen			
			Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun yang dimusnahkan	1 berkas	1 berkas			
			Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau	jumlah arsip yang dilakukan pendataan penyusunan dan penilaian serta	5 daftar	5 daftar			



Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator program/ kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		Pemerintah Daerah tahun 2023	Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	penyerahan atau pemusnahan arsip bagi pembubaran perangkat daerah					
		5) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah daftar autentisitas arsip sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip yang dinilai dan ditetapkan	6 arsip	6 arsip			
			Program Perizinan Penggunaan Arsip	Daftar arsip dan SOP arsip	20 Persen	30 Persen			
		6) Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2023 tentang klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klarifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan pemerintah daerah	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	jumlah daftar Arsip hasil penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	1 SOP	3 SOP			



3.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 merupakan pelayanan publik yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Urusan Pemerintahan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang terdiri 5 (lima) urusan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Tabel 3.27 Urusan Pemerintahan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan lanjut Rekomendasi DPRD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian	1) Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 2) Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 3) Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	20.316,00 Ton	21.915,8 Ton			
			Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Produksi perikanan tangkap	20.316 Ton	21915,8 Ton			
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	3.150 Ton	3.562,23 Ton			
			Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Fasilitasi Sarana Prasarana dan Operasional Balai Benih Ikan	3150 Ton	3562,23 Ton	a. Hasil monitoring ke pembudidaya dikeluhkan untuk harga pakan mahal sehingga keuntungan yang didapatkan kecil b. Keterampilan dan pengetahuan pembudidaya masih rendah sehingga hasil yang dicapai belum optimal	a. Memberikan saran untuk membuat pakan alternatif dari bahan-bahan murah (limbah ikan, ampas tahu, ampas kelapa dll) b. Melakukan pembinaan dan monitoring ke pembudidaya ikan secara rutin	



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
		tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 4) Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023 perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 5) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya yang disediakan	3150 Ton	3562,23 Ton	c. Masih kurangnya pelatihan pengembangan perikanan budidaya yang diikuti oleh pelaku usaha budidaya ikan a. Masih kurangnya pengetahuan petugas statistik tentang tata cara pengambilan data b. Pembinaan : Masih kurangnya pembinaan ke kelompok baru usaha budidaya ikan a. Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana perikanan budidaya di Kota Bontang	c. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKP3) menyelenggarakan pelatihan pengembangan perikanan budidaya a. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKP3) menyelenggarakan bimbingan teknis tentang tata cara pengambilan data b. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKP3) melaksanakan pembinaan ke kelompok baru usaha budidaya ikan a. Perlu penambahan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana perikanan budidaya guna meningkatkan produksi di Kota Bontang	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN	Persentase peningkatan	22%	22%			



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanj Rekomendasi DPRD
			PEMASARAN HASIL PERIKANAN	produktifitas pengelolaan hasil perikanan					
			Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah usaha mikro dan kecil sektor perikanan	26%	26%			
			Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan produktifitas pengelolaan hasil perikanan	26%	26%			



2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Tabel 3.28 Urusan Pemerintahan Pemilihan Pariwisata
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1) Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase objek daya tarik wisata yang representatif	75%	75%	-	-	
		2) Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah obyek daya tarikwisata kabupaten / Kota	4 ODTW	1 ODTW	-Review Riparda yang tidak dilaksanakan karena pihak ketiga mengajukan anggaran yang lebih tinggi dari anggaran yang ada (anggaran perubahan 2023)	- Review riparda akan di anggarkan di anggaran tahun 2024 - tindak lanjut perencanaan odtw yang lainnya (tithi, selang dan malahing) sudah di anggarkan di tahun 2024	
		3) Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan Strategis yang di kelola oleh kab / kota	1 ODTW	2 ODTW	- pengembangan odtw di laksanakan secara bertahap dan untuk tahun 2023 prioritas perencanaan pulau gusung	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Aset Pariwisata Yang Ada	Akan Diadakan Sosialisasi Terkait Peran Masyarakat Dalam Peningkatan
		4) Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023 perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023							
		5) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan							



Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		belanja daerah tahun anggaran 2023						Pariwisata Kota Bontang	
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi yang Dikelola Kabupaten / Kota	3 ODTW	3 ODTW	Penataan Destinasi Wisata Yang Belum Optimal	Menambah Fasilitas Pada Objek Wisata Yang Telah Ada	
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang Ditetapkan Oleh Kab/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	-	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisata	353.514 Orang	346,647	Dari Target Ripparda Tahun 2020-2025 untuk Kunjungan Wisata dari target Optimis tidak tercapai, tetapi melebihi target Pesimis sebesar 296.333	Menyesuaikan Dengan Tindak Lanjut RIPPARDA terkait dengan Kunjungan Wisata	
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan	351491 Orang	346,647	-	-	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pengembangan dan perlindungan pelaku ekonomi kreatif	0.4%	0.4%	-	-	



Pemerintah Kota Bontang

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Prasarana dan Sarana Rumah Kreasi Melenial	50%	50%	-	-	
			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kratif	1 Dokumen	2 Dokumen	Kurangnya Pelatihan Dan Pendampingan Lanjutan pasca dilakukan pelatihan bagi Pelaku EKRAF	Perlu Dilakukan Tindak lanjut Kegiatan Bagi Pelaku Ekraf Dapat Dibimbing Hingga Produk Dapat Diluncurkan Ke Pasaran	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase Sumber daya pariwisata yang di kembangkan ; Presentase Sumber daya Ekraf yang di kembangkan	40;44%	40;30%	kurangnya kesadaran pelaku EKRAF untuk mendaftarkan produknya memperoleh HAKI	Sosialisasi dan fasilitasi terhadap pelaku EKRAF akan pentingnya HAKI	
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang di tingkatkan kapasitasnya	390 orang	518 Orang	-	-	



3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Tabel 3.29 Urusan Pertanian

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian	1) Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 2) Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 3) Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 4) Peraturan wali kota nomor 15	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan sarana pertanian	60%	60%			
			Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	60%	60%	a. Perlunya pengawasan penggunaan sarana pertanian b. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh petani	a. Monitoring kelompok tani b. Perlunya pengadaan sarana dan prasarana pertanian	
			Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok	60%	60%	Bantuan pakan yg diberikan masih terbatas.	Perlu penambahan anggaran sehingga bantuan yg diberikan lebih banyak sasaran/kelompok yg menerima.	
			Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Penambahan jumlah populasi ternak di kelompok	60%	60%	perlunya penambahan anggaran	perlunya peningkatan keterampilan sdm baik petani maupun petugas	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	Persentase pemenuhan prasarana	100%	100%			



Pemerintah Kota Bontang

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD	
		tahun 2023 perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 5) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023	PRASARANA PERTANIAN	pertanian unit pelayanan						
			Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian dan peternakan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	100%%	100				
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Cakupan wilayah pengendalian kesehatan hewan	100%	100%			
					Cakupan pembinaan pelaku usaha olahan peternakan	67%	67%			
				Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penjaminan kesehatan hewan	100 %	100%	kegiatan gerakan makan telur dan minum susu belum maksimal dalam pelaksanaannya	diperlukan item uraian tersendiri dalam penganggaran dalam mendukung gerakan bontang bebas stunting (gerakan makan telur dan minum susu)	
				Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Olahan Produk Peternakan	100 %	100%	1. Kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang cara produksi pangan yang baik	1. Diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan kepada pelaku usaha tentang cara produksi pangan	



Pemerintah Kota Bontang

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
				Pangan dan Non Pangan			2. Kurangnya pendataan terhadap hasil produksi oleh pelaku usaha produk olahan asal hewan 3. Kurangnya minat pengolahan produk non pangan asal hewan oleh peternak 4. Sarana prasarana, higiene sanitasi, dan penerapan kesejahteraan hewan di tempat pemotongan hewan kurban masih kurang	yang baik 2. Dilakukan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada pelaku usaha agar dapat menerapkan pendataan hasil produksi 3. Perlu adanya pelatihan terkait pengolahan produk non pangan asal hewan dan bantuan sarana dan prasarana pendukungnya 4. Diperlukan pelatihan dan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait proses pemotongan hewan kurban (takmir mesjid dan juru sembelih) terkait penerapan hygiene sanitasi dan penerapan kesejahteraan hewan yang baik 5. Perlu adanya bantuan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pemotongan hewan kurban	



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya operasional pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas, jumlah pelayanan kesehatan hewan	100 %	100%	operasional pelayanan kesehatan hewan tidak bisa dilaksanakan	diperlukan payung hukum aturan terkait perjalanan dalam kota untuk operasional pelayanan kesehatan hewan	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan wilayah yang terkendali dari bencana pertanian	100%	100%			
			Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100%	100%	1. Minim alat pengendalian OPT2. Petani masih menerapkan pengendalian OPT menggunakan pestisida kimia3. Kompetensi petugas pengamat masih kurang	1. Pengadaan alat pengendali OPT (perangkap hama, hand sprayer, mist blower, bor dan injeksi tanaman) dan sarana penunjang hasil pengamatan OPT (bahan alat pengamatan OPT di lapangan)2. bimtek petani dan petugas dalam penerapan pengendalian OPT ramah lingkungan3. perlu magang, bimtek maupun pelatihan terkait pengamatan, pengendalian OPT	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kapasitas	100%	100%			



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
				kelembagaan pertanian					
			Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100%	100%	a. Perlunya data kelompok tani dan anggota kelompok yang masih aktif b. Kurangnya Sarana dan Prasarana di Balai Penyuluh Pertanian	a. Monitoring kelompok tani b. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Balai Penyuluh Pertanian	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	20.315,7 Ton	21.915,80 Ton			
			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terpenuhinya Pelayanan Penyelenggaraan TPI	100%	100%	Belum adanya Perjanjian Kerjasama Pinjam Pakai Aset di TPI Tanjung Laut, sehingga proses penganggaran baik penganggaran untuk pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan di TPI tidak dapat dilaksanakan..	Perlu percepatan proses PKS Pinjam Pakai Aset antara Pemprov Kaltim dengan Pemkot Bontang	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan prasarana pertanian unit pelayanan	100%	100%			



Pemerintah Kota Bontang

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanj Rekomendas i DPRD
			Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian dan peternakan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	100%	100%	perisiapan sertifikasi halal 2027, di UPT RPH belum adanya penyelia halal internal	pada tahun 2025, pengadaan bimtek sertifikasi penyelia halal	



4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Tabel 3.30 Urusan Perdagangan

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kebijakan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi masalah	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	1) Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 2) Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 3) Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 4) Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023 perubahan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perusahaan yang terdaftar dan memenuhi regulasi perijinan	100	-			
			Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan	100	-	tidak memerlukan lagi Rekomendasi teknis dari DKUKMP, sudah dialihkan Keurusan PTSP	Berdasarkan tingkat Resiko Swalayan merupakan kegiatan usaha dengan tingkat Resiko Rendah, sehingga Perizinan berusahnya adalah berupa NIB (Nomor Induk Berusaha), dimana hal ini merupakan identitas pelaku usaha sekaligus Legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha, hal ini tertuang dalam Pasal 12 Ayat 1 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS).	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA	Persentase penataan sarana	100%	100%			



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kebijakan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi masalah	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
		Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 5) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023	DISTRIBUSI PERDAGANGAN	distribusi perdagangan					
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelolah	100	100			
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang mengikuti pembinaan	100	100			
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan informasi dan barang kebutuhan pokok/barang penting	100%	100%			
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jenis komoditi bahan pokok dan barang penting yang dipantau stabilitasnya	23	23			
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor migas dan non migas	0,5	0,5			
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor (orang)	3 pelaku usaha	3 pelaku usaha			



Pemerintah Kota Bontang

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kebijakan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi masalah	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
			Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penerapan standardisasi dan perlindungan konsumen	51%	69,83%	1. untuk mencapai target pasar dan daerah tertib ukur masih diperlukan alat standar berupa timbangan sebanyak 40 unit sebagai pola pelayanan tera jemput bola 2. UPT metrologi legal masih memerlukan sarana dan prasarana mengingat unit metrologi legal belum memiliki gedung sendiri 3. Pengembangan SDM Khusus nya pengamat tera dan pranata lab belum mempunyai kompetensi sehingga diperlukan pelatihan teknis terkait tupoksi masing-masing		
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Cakupan pengawasan alat UTPP	51%	69,83%			



5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Tabel 3.31 Urusan Perindustrian

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kebijakan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi masalah	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
BIDANG INDUSTRI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	1) Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 2) Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 3) Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan Industri kecil menengah ; Pesentase IKM yang menerapkan sistem manajemen produk	1,18	5,58	Jumlah staf bidang Perindustrian yang terbatas dengan jumlah tugas beragam termasuk Pendampingan IKM	Bekerjasama dengan pihak ketiga (Tenag Ahli) dalam melakukan pendampingan dan pembinaan bagi IKM	Memfasilitasi Pelatihan Pelaku IKM di Kota Bontang
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Industri	7 dokumen	7 dokumen			
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang memiliki izin usaha	1	0,47			
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang memiliki izin Industri	15	7	1. Penerbitan Izin lebih lanjut (Sertifikat Standar) dilakukan melalui OSS, bukan langsung melalui bidang Perindustrian dan sistem nya masih belum terintegrasi dengan SIINas secara sempurna. 2. IKM kesulitan dan enggan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapat rekomendasi yang dibutuhkan dalam	1. Bekerjasama dengan PTSP dalam menerbitkan Sertifikat Standar 2. Mensyaratkan memiliki Sertifikat Standar bagi IKM yang akan difasilitasi oleh DKUKMP. 3. Mensosialisasikan pentingnya memiliki Izin Usaha yang lengkap dan sesuai aturan.	



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kebijakan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi masalah	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
		pendapatan dan belanja daerah tahun 2023					menerbitkan Sertifikat Standar.		
		4) Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023 perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang memanfaatkan SIINAS	2,28	0,74	Pelaku IKM kesulitan dalam menggunakan aplikasi SIINAS kesadaran pelaku IKM dalam memanfaatkan SIINAS masih rendah	1.Mengadakan Workshop tentang SIINAS	
		5) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Industri yang memanfaatkan SIINas	34	11	2. NIB Pelaku usaha bermasalah (NIB Merupakan Persyaratan dalam membuat aplikasi SIINAS) Karena antara OSS dan SIINAS belum terintegrasi secara sempurna	2.Melakukan Pendampingan Intensif pada pelaku IKM yang mengikuti workshop SIINAS	
								3. Mensyaratkan Pemanfaatan SIINAS bagi pelaku IKM yang mendapatkan fasilitas dari DKUKMP	



3.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan tugas unsur pendukung urusan Pemerintah dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah, meningkatnya harmonisasi penataan produk hukum daerah, meningkatnya harmonisasi kebijakan perekonomian daerah, terwujudnya pelayanan administrasi pengadaan barang dan jasa. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sebagai unsur pendukung urusan Pemerintah, Sekretariat Daerah berupaya meningkatkan kinerja secara terus menerus dengan menggali potensi sumber daya yang dimiliki untuk memberikan pelayanan terbaik dan memenuhi ekspektasi masyarakat. Potensi tersebut perlu dikaji dan dikembangkan secara optimal sehingga menjadi modal dasar bagi Pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Sedangkan tugas dari Sekretariat DPRD adalah meningkatkan kualitas pelayanan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Tabel 3.32 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tiindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Sekretariat Daerah	1) Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai IKM Perangkat Daerah 2. Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	A (86,20) 100%	A (88,20) 100%			
		2) Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	proses Penyusunan Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100 persen	100 persen			



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tiindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 3) Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 4) Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023 perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 5) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	100 persen	100 persen			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100 persen	100 persen			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100 persen	100 persen			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 persen	100 persen			
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah KDH/WKDH yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	2 Orang	2 Orang			
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	30 Jenis	30 Jenis			
			Penataan Organisasi	Jumlah kegiatan penataan organisasi	13 Kegiatan	13 Kegiatan			
		Pelaksanaan Protokol dan	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Protokol	776 Kegiatan	776 Kegiatan				



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tiindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Komunikasi Pimpinan	dan Komunikasi Pimpinan					
		Terdapat hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase implementasi kebijakan bidang pemerintahan	100%	100%			
			Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Kebijakan Tata Pemerintahan	5 Kebijakan	5 Kebijakan			
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5 Kebijakan	5 Kebijakan			
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah kebijakan produk hukum yang diharmonisasi	50 Kebijakan	50 Kebijakan			
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah kerjasama daerah	10 MoU	10 MoU			
		Terdapat hasil monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Pemerintah Daerah serta penyelenggaraan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1. Persentase implementasi kebijakan bidang perekonomian 2. Implementasi kebijakan bidang pembangunan	100% 3 Kebijakan	100% 3 Kebijakan			
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah kebijakan yang dikoordinasikan dan dilaksanakan	16 Laporan	16 Laporan			
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Implementasi Program Prioritas Pembangunan	16 Program Prioritas	16 Program Prioritas			
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah layanan pengadaan barang dan jasa	-	-			
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Penyusunan dan Pemantauan	3 Kebijakan	3 Kebijakan			



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tiindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Kebijakan dibidang SDA					

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1) Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 2) Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 3) Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	99,55%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Sesuai Dengan Tahapan dan Waktu	100%	82,45%	Terdapat sub kegiatan belum mencapai target		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	-		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	100%	93,7%	Terdapat sub kegiatan belum mencapai target karena pernah menjadi temuan BPK		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah	Tingkat Pemenuhan	100%	100%			



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		daerah tahun 2023	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah					
		4) Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023 perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023	Penunjang Urusan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Layanan Umum Perkantoran	100%	100%	-		
		5) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	100%	-		
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tingkat Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	99,61%	-Pada sub kegiatan pelaksanaan pelaksanaan Medikal Check up DPRD hanya beberapa orang yang melakukan Medikal Check up		
			Layanan Administrasi DPRD	Terpenuhinya Layanan Administrasi DPRD	100%	100%			
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan layanan tugas fungsi anggaran	100%	100%			
				Cakupan layanan tugas fungsi legislasi	100%	100%			
				Cakupan layanan tugas fungsi pengawasan	100%	100%			
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	100%			



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Dibahas	100%	100%			
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terpenuhinya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%			
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Terpenuhinya Kebutuhan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	100%	-	-	
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terpenuhinya Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	100%			
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	100%			
			Pembahasan Kerja Sama Daerah	Terpenuhinya Fasilitasi Pembahasan Kerja Sama Daerah	100%	100%			
			Fasilitasi Tugas DPRD	Terpenuhinya Tugas DPRD yang Difasilitasi	100%	100%			



3.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Unsur penunjang urusan pemerintahan dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah Kota Bontang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang meliputi pelaksanaan fungsi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur penunjang pemerintahan dilaksanakan melalui:

1. Bidang perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
2. Bidang Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah
3. Bidang kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Sumber daya Manusia
5. Bidang penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan di Kota Bontang pada tahun 2023 telah berjalan dengan baik sesuai dengan target yang ditentukan. Pencapaian pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan Kota Bontang tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

Tabel 3.33 Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Perencanaan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
Perencanaan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	1) Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 2) Perubahan Kedua atas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan adm keuangan daerah	35 Orang	37 Orang			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi	2 Layanan	2 Layanan			



Pemerintah Kota Bontang

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 3) Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 4) Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023 perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 5) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan		Kepegawaian yang Dilaksanakan					
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum yang disediakan	6 Layanan	6 Layanan			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	6 Unit	6 Unit			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	2 Layanan	2 Layanan			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	38 Unit	38 Unit			
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah	84 Persen	84 Persen			
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 dokumen	3 dokumen			
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi	3200 data	3200 data			
			Pengendalian, Evaluasi dan	Jumlah dokumen yang dievaluasi	5 dokumen	5 Dokumen			



Pemerintah Kota Bontang

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		dan belanja daerah tahun anggaran 2023	Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Implementasi perencanaan dalam penganggaran	92 Persen	92 Persen			
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun	2 dokumen	2 dokumen			
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun	2 dokumen	2 dokumen			
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen			



2. Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

Tabel 3.34 Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
Keuangan	Badan Pendapatan Daerah	1) Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 2) Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 3) Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%			
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	5 Dokumen	6 Dokumen			
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	3 Dokumen	3 Dokumen			
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	100%	100%			
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100%	83.33%			
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan	100%	100%			
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	100%			
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan BMD	100%	100%			



Pemerintah Kota Bontang

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023	Pemerintahan Daerah						
		4) Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023 perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian PAD	100%	113.70%			
		5) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	92.27%	Kegiatan validasi data PBB menargetkan Kec.Bontang Utara hanya terealisasi 1 Kelurahan yaitu Kel. Guntung. Hal ini disebabkan oleh pihak ke 3 tidak bisa melaksanakan survey karena tidak memenuhi persyaratan	Pelaksanaan survey pendaatan akan diupayakan pada tahun 2024 dan 2025 dengan melibatkan UGM dan BPN Bontang	
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	100%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat Daerah	100%	100%			
			Administrasi Barang Milik	Tingkat pemenuhan administrasi dan	100%	100%			



Pemerintah Kota Bontang

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Daerah pada Perangkat Daerah	laporan keuangan perangkat Daerah					
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	100%	100%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100%	100%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100%	100%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100%	100%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%			
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat kesesuaian tahapan penyusunan APBD	100%	100%			
				Jumlah Perangkat Daerah yang menyajikan laporan keuangan dengan baik	31 OPD	31 OPD			
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen Penyusunan APBD yang tepat Waktu	10 dokumen	10 dokumen			
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Melakukan Penatausahaan Keuangan	31 OPD	31 OPD			
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan	Jumlah OPD yang menyampaikan	31 OPD	31 OPD			



Pemerintah Kota Bontang

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan sesuai standar					
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	5 Laporan	5 Laporan			
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD Lingkup Keuangan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kesesuaian data rincian BMD dengan Aktiva Tetap di neraca Pemerintah Kota	100%	100%			
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertib administrasi pengelolaan BMD baik pada lingkup pengguna barang maupun pengelola barang	31 OPD	31 OPD			



3. Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian

Tabel 3.35 Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1) Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 2) Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 3) Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan	2 Dokumen	2 Dokumen			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	49 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	56 Orang	52 Orang			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	4 Layanan	4 Layanan			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemda	4 Jenis	4 Jenis			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	3 Jenis			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	5 Jenis	5 Jenis			
			Program Kepegawaian Daerah	Indeks Dimensi Disiplin ; Indeks Dimensi Kinerja ; Indeks Dimensi Kualifikasi	100 Persen	100 Persen			



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		daerah tahun 2023 4) Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023 perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 5) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kegiatan layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi ASN	4 Layanan	4 Layanan			
			Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah layanan promosi dan mutasi ASN	3 Layanan	3 Layanan			
			Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	5 Orang	2 Orang Tugas Belajar BKPSM dan 61 orang tugas belajar mandiri			
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah pegawai yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	2900 dokumen	2847 Dokumen	Target tidak tercapai dikarenakan terdapat pegawai yang pensiun dan mutasi		



4. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 3.36 Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1) Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 2) Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 3) Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 4) Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase peningkatan kompetensi minimal 20 JP per tahun	25 Persen	100 Persen			
			Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	107 Orang	1121 Orang			
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah pegawai yang mengikuti sertifikasi dan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	31 Orang	37 Orang			



Pemerintah Kota Bontang

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 5) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023							



5. Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan

Tabel 3.37 Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	1) Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 2) Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 3) Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan ; Persentase keberlanjutan inovasi daerah	77,78 Persen	77,93 Persen			
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Bidang kelitbangan yang dilaksanakan	4 Kajian	4 Kajian			
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kajian dan Rekomendasi bidang ekonomi dan Pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen			
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi daerah	156 Inovasi	158 Inovasi			



Pemerintah Kota Bontang

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		4) Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023 perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 5) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023							



3.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjalankan unsur pengawasan urusan pemerintahan adalah Inspektorat dengan tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan.

Tabel 3.38 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat Daerah	1) Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 2) Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 3) Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100%	100%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100%	100%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100%	100%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100%	100%			



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 4) Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023 perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 5) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berbasis risiko	73%	100%			
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah penyelesaian pembinaan dan pengawasan internal perangkat daerah	225 laporan	553 laporan			
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah kasus yang telah selesai ditindaklanjuti	5 kasus	6 kasus			
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase kebijakan pembinaan dan pengawasan yang telah ditetapkan	100 persen	100 persen			
				Persentase Perangkat daerah yang telah dilakukan pendampingan	75%	100%			
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan pembinaan dan pengawasan	1 kebijakan	1 kebijakan			
			Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan pendampingan dan asistensi pembinaan dan pengawasan	6 kegiatan	9 kegiatan			



3.2.7 Unsur Kewilayahan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dijelaskan bahwa kecamatan adalah bagian wilayah dari kabupaten/kota dan kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan. Serta berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, untuk unsur kewilayahan ini meliputi kecamatan.

Tabel 3.39 Unsur Kewilayahan Urusan Pemerintahan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
Kewilayahan	Kecamatan Bontang Selatan	1) Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 2) Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 3) Perubahan ketiga atas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	201 Orang	201 Orang			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	201 Orang	201 Orang			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	8 Layanan	8 Layanan			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Jenis	2 Jenis			



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		peraturan wali kota nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 4) Peraturan wali kota nomor 15 tahun 2023 perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 5) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2023 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Jenis	3 Jenis			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang dipelihara	4 Jenis	4 Jenis			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang selatan)	99 %	96%			
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Jumlah Subjek Koordinasi	4 Subjek	4 Subjek			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5 Urusan	5 Urusan			
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah objek koordinasi	6 Objek	6 Objek			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	100 %	100 %			
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kompenen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan	12 Unsur	12 Unsur			
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga	3 Lembaga			



Pemerintah Kota Bontang

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan	6 Kelurahan	6 Kelurahan			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100 %	100 %			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan	2 Perda/Perkada	2 Perda/Perkada			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100 %	100 %			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan	227 Orang	227 Orang				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Layanan	227 Orang	227 Orang						



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Administrasi Kepegawaian					
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	7 Layanan	7 Layanan			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	2 Jenis			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang yang Milik Daerah yang di Pelihara	5 Jenis	5 Jenis			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan ; Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	95 %	96 %			
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Subjek Koordinasi	3 Koordinasi	3 Koordinasi			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan	7 Urusan	7 Urusan			
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi	6 Kali	6 Kali			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %			



Pemerintah Kota Bontang

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga	3 Lembaga			
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang utara)	100 %	100 %			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah lembaga yang diberdayakan	3 Lembaga	3 Lembaga			
			Koordinasi Penerapan dan Penegekan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang utara)	100 %	100 %			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %					
	Kecamatan Bontang Barat		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan	4 Kegiatan	4 Kegiatan			



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	6 Kegiatan	6 Kegiatan			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang yang Milik Daerah yang di Pelihara	4 Kegiatan	4 Kegiatan			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan ; Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 %	100 %			
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Subjek Koordinasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	6 Kegiatan	6 Kegiatan			
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah objek koordinasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan			



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	100 %	100 %			
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kompenen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan	3 Kegiatan	3 Kegiatan			
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang Barat)	100 %	100 %			
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang barat)	100 %	100 %			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	1 Kegiatan	1 Kegiatan			



3.2.8 Unsur Pemerintahan Umum

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, unsur pemerintahan umum mencakup urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pelaksanaan unsur Pemerintahan Umum di Kota Bontang pada tahun 2023 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditentukan, dan Urusan kesatuan bangsa dan politik diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang bertujuan pada meningkatnya kondusifitas wilayah, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.40 Unsur Pemerintahan Umum
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
Unsur Pemerintahan Umum	Kesatuan Bangsa dan Politik	1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 2) Peraturan Walikota Nomor 15 tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1 Laporan)	1 Laporan			
			Administrasi Perangkat Daerah	jumlah tenaga adm keuangan PD yang terbayarkan	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah pegawai yang mendapat layanan adm. Kepegawaian Daerah	8 Orang	8 Orang			



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		3) Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis adm.umum yang disediakan	11 Jenis	11 Jenis)			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemda	2 unit	2 unit			
			Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	49 Unit	49 Unit			
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	50%	56%			
			Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi	965 Orang	965 Orang			
			Program Peningkatan Peran Partai dan Lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan	57%				
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	- Jumlah Pelaksanaan Kebijakan dan	800 orang Orang dan 10 Proposal	800 Orang dan 10 Proposal			



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Eriak Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah - Jumlah Proposal Parpol yang terverifikasi					
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase terhadap Pembinaan LSM, Ormas dan OKP	57 Persen	57 Persen			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing didaerah.	20 Laporan	20 Laporan			



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Peningkatan pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	80 Persen	80 Persen			
			Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitas Pencegahan dan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat kepercayaan di daerah.	150 Orang	150 Orang			
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Peresentase penanganan konflik	100 Persen	100 Persen			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	5 Kebijakan	5 Kebijakan			



3.3 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan atau tindakan Kepala Daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Kebijakan strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bontang tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 3.41
Kebijakan Strategis Tahun 2023

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
1.	Menguatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan pencegahan konflik sosial	Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Masyarakat
2.	Pencegahan dan Penanggulangan bencana	Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	Mengurangi dampak bahaya yang akan terjadi di Kota Bontang
3.	Penanggulangan Kemiskinan	Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Kemiskinan	Menguatkan sinkronisasi penanggulangan kemiskinan
		Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Nontunai Daerah	
4.	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan yang merata	Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Stimulan dan Bantuan Tugas Akhir Pendidikan Tinggi	Peningkatan fasilitas pendidikan karakter dan fasilitasi pendidikan lanjut bagi masyarakat melalui beasiswa bagi siswa tidak mampu atau siswa berprestasi
5.	Meningkatkan jaringan dan layanan penempatan tenaga kerja	Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan	Pemberian jaminan sosial bagi pekerja rentan.
6.	Menguatkan pemberdayaan usaha mikro dan ekonomi kreatif	Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama	Meningkatnya pembinaan usaha kecil dan menengah yang kompetitif dan tumbuh kembang



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
7.	Melibatkan partisipasi masyarakat pada tingkat kelurahan yang berbasis Rukun Tetangga (RT) dalam pembangunan di Kota Bontang	Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan	Sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan, ekonomi dan sosial budaya
8.	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan yang merata	Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif	Pemantapan pengelolaan pendidikan berbasis sekolah

3.4 Tindak lanjut rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Dalam penyampaian LKPJ Tahun 2023 terdapat beberapa catatan strategis berupa rekomendasi untuk menyempurnakan penyelenggaraan pemerintah daerah, terdapat catatan dan rekomendasi tersebut telah ditindak lanjuti sebagai berikut :

Tabel 3.42

Tindak lanjut rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Anggaran 2023

No	Uraian Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pendidikan memperhatikan /menyiapkan sarana transportasi bagi tenaga pendidik yang melaksanakan tugas di pulau-pulau di Kota Bontang	Pada tahun 2023 telah diberikan fasilitas sarana transportasi bagi tenaga pendidik yang bertugas di pulau-pulau di Bontang, dengan cara menyewakan kapal untuk transportasi pendidik dan tenaga pendidik untuk menuju lokasi sekolah	Secara prosentase masalah sudah dapat diatasi sekolah para pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja dengan aktif
2	Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pendidikan selain membangun sarana dan prasarana di Daerah Pesisir dan minta segera membangun sekolah TK negeri untuk di Wilayah Kecamatan Bontang Barat	Pemerintah akan membangun TK negeri Bontang Barat di lokasi SDN 002 Bontang saat ini, yang direlokasi pada tahun 2024. Saat ini lokasi tersebut telah dilengkapi sarana, prasarana, Ruang kelas, UKS, Ruang Guru maka dapat difungsikan	Secara Umum masalah Gedung TK Negeri Bontang Barat sudah dapat diatasi apabila SDN 002 Bontang Barat pindah ke lokasi baru pada akhir tahun 2024.



No	Uraian Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
3	Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pendidikan agar meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agar menghasilkan mutu pendidikan yang berdaya saing	Sejak tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah aktif melaksanakan berbagai bimtek Mata Pelajaran, Tata Kelola Keuangan, Administrasi Sekolah, Perpustakaan, Dapodik, dan berlanjut pada tahun 2024 untuk sekolah Negeri maupun Swasta	Secara prosentase masalah peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sudah terpenuhi baik secara kualitas maupun kuantitas pada jenjang pendidikan PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs
4	Pemerintah Kota Bontang melalui dinas kesehatan untuk memperbaiki pengelolaan data JKN dan BPJS	Pengelolaan JKN di Kota Bontang sudah 100% UHC. Jumlah Kepesertaan JKN sebanyak 191.320 orang penduduk (dengan penghitungan proyeksi penambahan penduduk dalam 1 tahun) terdiri dari PBI Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD=55.688 orang, PBI APBN=28.151 orang, Bukan Pekerja (BP)= 1.535 orang, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPNU)= 15.337 orang, Pekerja Penerima Upah (PPU) terdiri dari PPU BU (Badan Usaha)=70.512 orang, PPU PN (Penyelenggara Negara/PNS)=20.097.	Secara persentase masalah sudah teratasi walaupun di lapangan masih terdapat beberapa kasus pasien tanpa memiliki jaminan (JKN) ini dikarenakan ada beberapa masyarakat Kota Bontang yang masih abai, belum mendaftarkan diri. Kedua adanya peserta BPJS mandiri yang menunggak yang tidak mampu membayar tunggakannya dan tidak melaporkan untuk pengalihan ke PBI APBD sehingga pada saat sakit tidak memiliki atau tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Aktif.
5	Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Kesehatan untuk melengkapi fasilitas kesehatan yang kurang memadai	Tahun 2023 sudah melengkapi sarana, prasarana dan alkes yang kurang, termasuk menyediakan aplikasi yang memudahkan pendaftaran pasien (Aplikasi E-MR) pasien bisa mendaftar dari rumah dan bisa melihat nomor antrian dan jam pelayanan yang akan diberikan.	Tujuannya adalah menyelesaikan keluhan pasien yang harus datang ke faskes pagi-pagi dan lamanya waktu menunggu diperiksa. Pemenuhan fasilitas sarana, prasarana, alkes akan meminimalisir keluhan pasien terhadap kualitas pelayanan.



No	Uraian Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
6	Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Kesehatan untuk lebih serius dalam pencegahan dan penurunan stunting di Kota Bontang	Tahun 2022 angka baduta stunting di Kota Bontang sebanyak 22,80% dan pada tahun 2023 turun menjadi 19,65 % (1.780 kasus/9.091 balita yg diukur *100) . Angka penurunan stunting diperoleh merupakan hasil beberapa kegiatan yang telah dilakukan secara masif berupa aksi konvergensi, operasi timbang, pemberian makanan tambahan, pemberian Vit A, tablet tambah darah untuk Ibu hamil, anak remaja dan calon pengantin bekerjasama dengan OPD terkait dan instansi Swasta (CSR).	Tujuan yang ingin dicapai adalah menurunkan angka stunting sesuai target nasional (14%) dan untuk mencapai angka tersebut perlu kerjasama semua pihak, termasuk meningkatkan kesadaran orangtua maupun masyarakat sekitar, tentang pentingnya pemantauan tumbuh kembang dan status gizi anak sehingga balita yang bermasalah gizi dapat ditemukan sedini mungkin dan segera ditangani permasalahan gizinya.
7	Pemerintah Kota Bontang segera menindaklanjuti rekomendasi BPKP, BPK dan LO Kejaksaan Negeri Kota Bontang terkait pemanfaatan gedung RSUD Tipe D.	Pemerintah Kota Bontang telah merencanakan pembebasan lahan untuk menunjang operasionalisasi gedung RSUD kelas D pada tahun 2023, namun waktu yang tersedia di APBD tidak memadai untuk proses pengadaan lahan, sehingga dianggarkan pada APBD murni tahun 2024.	Telah dianggarkan di APBD murni tahun 2024
8	Pemerintah Kota Bontang diminta untuk menyiapkan lahan pemakaman terpadu di Bontang Barat mengingat lahan pemakaman di Kota Bontang yang ada sudah hampir habis	Tahun 2023 telah dilaksanakan FS/Kajian Kelayakan lahan Pemakaman oleh Bapelitbang pada tahun 2023 dan dilanjutkan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) sebagai dasar untuk penganggaran dan pelaksanaan pengadaan tanah berdasarkan PP. 19 tahun 2021 dan Permen ATR/Kepala BPN No.19 tahun 2021. Proses	Sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini dalam hal pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu PP.19 tahun 2021 dan Permen ATR/Kepala BPN No.19 tahun 2021, dalam hal pengadaan tanah untuk bagi pembangunan untuk kepentingan harus mengikuti 4 tahapan



No	Uraian Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		pengadaan tanah akan dilaksanakan pada tahun 2024.	yaitu Tahap Perencanaan, Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Penyerahan Hasil. Saat ini DPKP2 Kota Bontang dalam Tahap Perencanaan (DPPT dan Ketersediaan anggaran)
9	Pemerintah Kota Bontang agar lebih serius dalam upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan melaksanakan optimalisasi pada sumber-sumber pendapatan potensial daerah	Dalam rangka optimalisasi pada sumber-sumber pendapatan, Badan Pendapatan Daerah telah melaksanakan: 1) Validasi data wajib pajak di tahun 2024 bekerjasama dengan BPN dan Perguruan Tinggi 2) Pengembangan aplikasi pelayanan dan pembayaran pajak melalui kanal non tunai dan berbasis geospasial 3) Peningkatan SDM aparatur BAPENDA 4) Melaksanakan kajian-kajian terkait dengan tarif pajak dan retribusi serta potensi PAD yang belum terakomodir dalam Perda Pajak dan Retribusi Daerah.	1. Data Wajib Pajak tervalidasi 2. Memberi kemudahan kepada wajib pajak dalam pembayaran pajak 3. Meningkatnya SDM BAPENDA yang dapat menggali potensi PAD 4. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi
10	Pemerintah Kota Bontang agar lebih cermat dalam menentukan target pendapatan. Dalam menentukan target pendapatan pajak dan retribusi daerah Kota Bontang tahun 2022 hanya memakai angka minimal, sementara masih banyak potensi pendapatan yang bisa dikembangkan	1) Dalam menetapkan target, BAPENDA menggunakan acuan Permendagri Nomor 84 thn 2022 dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi serta rata-rata realisasi 3 tahun terakhir 2) Melaksanakan kajian-kajian dengan tarif pajak dan retribusi serta potensi PAD yang belum terakomodir dalam Perda.	Penetapan target pendapatan mendekati potensi PAD.



No	Uraian Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
11	Perumda AUJ dan BPR hingga tahun 2022 belum memberikan kontribusi PAD kepada Pemerintah Kota Bontang. Untuk itu Pemerintah Kota Bontang diminta memaksimalkan kinerja BUMD tersebut memberikan kontribusi PAD pada tahun berikutnya	Pemerintah Kota Bontang melalui Tim Pembinaan BUMD telah melakukan pendampingan-pendampingan untuk perbaikan kinerja pada Perumda AUJ dan anak perusahaannya diantaranya dengan : a) Mempersiapkan Kajian dan Naskah Akademik terkait perubahan regulasi yang sesuai dengan Peraturan; b) Melakukan penelaahan Rencana Bisnis dan RKAP Perumda AUJ serta Monitoring dan Evaluasi kinerja Perumda AUJ secara berkala; c) Melakukan fasilitasi atas rencana pengembangan-pengembangan bisnis perusahaan	Perbaiki Regulasi dan Tata Kelola Perusahaan agar lebih mandiri dan efisien
12	Pemerintah Kota Bontang untuk melakukan kajian terhadap PT. LBB dalam pengelolaan pelabuhan, mengingat terjadi penurunan penerimaan retribusi dari pengelolaan pelabuhan.	Pemerintah Kota Bontang telah melakukan penyusunan kajian kelayakan dari berbagai analisis, untuk melihat kelayakan peningkatan status PT. LBB menjadi Badan Usaha Milik Daerah. Kajian kelayakan disusun agar PT. LBB dapat lebih berkembang dalam melaksanakan usaha dibidang pengelolaan pelabuhan sehingga dapat memberikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. selain hal tersebut Pemerintah Kota Bontang juga telah melakukan evaluasi dan rekonsiliasi atas kinerja pengelolaan aset pelabuhan oleh PT. LBB	Perbaiki kinerja atas pengelolaan pelabuhan dan rencana pengembangan usaha PT LBB
13	Pemerintah Kota Bontang untuk melakukan	Pada RPJMD maupun RKPD Kota Bontang sudah	Percepatan pencapaian Indeks Kualitas



No	Uraian Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	perencanaan secara komprehensif dan fokus dalam pembangunan infrastruktur di Kota Bontang	berfokus pada pembangunan infrastruktur, meliputi infrastruktur dasar yakni layanan akses air minum, air limbah domestik, persampahan, konstruksi jalan dan jembatan serta konstruksi penanggulangan banjir dengan memperhatikan sinergitas dan sinkronisasi terhadap dokumen rencana induk, masterplan dan perencanaan sektoral infrastruktur lainnya.	Infrastruktur, pengurangan luas kawasan kumuh dan pengurangan luas genangan banjir
14	Pemerintah Kota Bontang untuk segera merealisasikan kegiatan fisik yang telah direncanakan, dan melanjutkan pekerjaan yang belum diselesaikan pada tahun-tahun sebelumnya.	Pemerintah Kota Bontang secara bertahap menyelesaikan pekerjaan fisik yang telah direncanakan sesuai dengan prioritas pembangunan: 1. Pembangunan beberapa kantor kelurahan; 2. Lanjutan gedung sita kejaksaan; 3. Lanjutan pembangunan gedung MTQ Parikesit; 4. Lanjutan pembangunan turap; 5. Lanjutan pembangunan trotoar; 6. Lanjutan pembangunan beberapa ruas jalan; 7. Lanjutan pembangunan gedung sekolah;	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
15	Pemerintah Kota Bontang segera berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi guna mengatasi banjir rob yang terjadi setiap saat	Pemerintah Kota Bontang telah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengusulan penanganan kegiatan penanggulangan banjir rob di Kota Bontang	Potensi pendanaan dan pelaksanaan penanggulangan banjir rob di Kota Bontang dari Pemerintah Pusat
16	Pemerintah Kota Bontang agar menyediakan sarana dan prasarana untuk disabilitas.	Pemerintah Kota Bontang telah menyediakan sarana untuk disabilitas di gedung-gedung pelayanan publik dan pedestrian jalan	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik yang inklusif guna memberikan



No	Uraian Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			kenyamanan dan keamanan bagi penyandang disabilitas
17	Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk segera membangun laboratorium lingkungan	DED Pembangunan Laboratorium Lingkungan telah selesai dilaksanakan tahun 2023, pembangunan gedung Laboratorium Lingkungan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025	Pembangunan Gedung Laboratorium Lingkungan Hidup yang sesuai dengan standar
18	Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk mengevaluasi penarikan tong sampah, mengingatkan masyarakat masih membuang sampah di pinggir jalan.	Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan evaluasi terhadap penarikan tong sampah di pinggir jalan dengan hasil sebagai berikut: 1. penarikan tong sampah di pinggir jalan tetap harus dilakukan untuk memastikan optimalisasi penggunaan pedestrian/ trotoar bagi pejalan kaki 2. adanya resiko kecelakaan pada saat pengangkutan sampah di pinggir jalan 3. pengurangan sampah sampah meningkat karena pembuangan sampah diarahkan langsung ke TPS3R/TPST Rekomendasi: Membangun TPS setiap RT yang berlokasi di dalam gang	Penertiban buang sampah sembarangan di pinggir jalan
19	Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk koordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait galian C yang ada di Kota Bontang mengingat kewenangan sudah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi	Berdasarkan hasil koordinasi bahwa sesuai dengan UU 23 tahun 2014 bahwa kewenangan pengelolaan pertambangan galian C menjadi kewenangan provinsi termasuk pengawasan pertambangan dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Energi dan Mineral Provinsi Kaltim	Pengawasan pertambangan galian C
20	Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Perhubungan untuk lebih	Sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan	1) Pemenuhan/ penyediaan perlengkapan jalan



No	Uraian Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	<p>optimal dalam melengkapi sarana dan prasarana rambu-rambu lintas di Kota Bontang</p>	<p>Angkutan Jalan pada Pasal 25 Ayat 1 Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan Perlengkapan Jalan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rambu Lalu Lintas; 2. Marka Jalan; 3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; 4. Alat Penerangan jalan; 5. Alat Pengendali dan pengaman Pengguna Jalan; <p>Dinas Perhubungan melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota Tahun Anggaran 2023 terdapat Mata Anggaran penyediaan perlengkapan jalan dengan data sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Paku Marka 305 Buah dengan lokasi Jl. Juanda, Ks Tubun 2. RPPJ Bentang Portal dengan lokasi Jl. Bessai Berinta 3. Pengadaan Dan Pemasangan Pju dengan lokasi di ruas jalan Imam Bonjol, Sam Ratulangi, Selat Malaka dan Ruas Jalan Soekarno Hatta 4. Pemasangan Marka Jalan termoplastik dengan lokasi ruas Jalan : Slamet Riyadi, RE. Martadinata dan Pembuatan Zebra cross 5. Pengadaan & Pemasangan Rambu Lalu Lintas Uk. 75 X 75 Cm yang pengadaanya sebagai pengganti pada Rambu-rambu yang rusak atau pudar 	<p>dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan</p> <p>2) Dalam hal pengadaan perlengkapan jalan di Kota Bontang dalam hal pemenuhan penyediaan difokuskan pada (DRK) tempat tempat daerah rawan kecelakaan dan penggantian pada Rambu-rambu yang rusak atau pudar</p>



No	Uraian Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
21	Pemerintah Kota Bontang untuk memaksimalkan penerimaan retribusi melalui pengelolaan parkir	<ol style="list-style-type: none">1. BAPENDA telah berkoordinasi dengan Dishub untuk penertiban sistem pembayaran retribusi parkir Tepi Jalan dan Parkir Khusus secara non tunai2. Penyesuaian perubahan Perwali Nomor 20 tahun 2019 khususnya terkait dengan ketentuan pengelolaan parkir tepi jalan	Agar pengelolaan Parkir Tepi Jalan lebih optimal dalam peningkatan retribusi
22	Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan untuk membuat kajian terkait rencana pemutihan kredit macet dana bergulir di BPR sehingga tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.	Tahun 2023 dilakukan update keberadaan dari peminjam kredit macet dana bergulir, hasilnya ada beberapa peminjam yang sudah tidak berdomisili di Kota Bontang dan ada yang sudah meninggal dunia. Atas rekomendasi dari DPRD kami sependapat akan dibuatkan kajian rencana pemutihan kredit macet dana bergulir	Menyiapkan kajian pemutihan terhadap peminjam kredit macet dana bergulir melalui anggaran perubahan 2024
23	Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan untuk mengelola pasar secara profesional sehingga tidak menimbulkan kesan kumuh dan dapat meningkatkan retribusi.	<ol style="list-style-type: none">1. Telah dilakukan perbaikan manajemen pengelolaan pasar sehingga nilai survei kepuasan masyarakat (Nilai IKM) atas pelayanan UPT Pasar baik.2. Telah dilakukan upaya pemenuhan sarana dan prasarana pasar di 3 pasar yang dikelola UPT Pasar3. Telah dilakukan upaya peningkatan penerimaan retribusi sehingga realisasi penerimaan retribusi telah melampaui hasil penerimaan retribusi di tahun sebelumnya.	Perbaiki pengelolaan pasar dan peningkatan retribusi pelayanan pasar



No	Uraian Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		<p>Realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar sudah baik telah melampaui target yang telah ditetapkan data penerimaan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tahun 2021 dari target sebesar Rp.300.000.000 realisasi sebesar Rp.202.184.250 (101%)- Tahun 2022 target sebesar Rp.500.000.000 realisasi sebesar Rp. 1.074.977.750 (215%)- Tahun 2023 target sebesar Rp.500.000.000 realisasi sebesar Rp.480.833.750 (96%) <p>Penerimaan retribusi tertinggi pada tahun 2022 disebabkan adanya penerimaan biaya masuk pedagang baru paar citra loktuan sebesar Rp.480.760.000</p>	
24	<p>Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan untuk membuat kajian sehingga BPR berdiri sendiri dengan status Perseroda.</p>	<p>Pada tahun 2023 yang lalu telah dilakukan kajian kelayakan terhadap BPR untuk menjadi Perseroda bekerja sama dengan Universitas Indonesia Timur. Berdasarkan hasil kajian tersebut, Perusda BPR Bontang. direkomendasikan untuk menjadi BUMD dengan nama PT Bank Perekonomian Rakyat Bontang Sejahtera (Perseroda).</p>	<p>Pemisahan BPR dari PT AUJ agar dapat mandiri.</p>



No	Uraian Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
25	Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan untuk memaksimalkan retribusi parkir yang ada di dalam pasar	UPT Pasar telah berupaya meningkatkan penerimaan retribusi parkir di dalam pasar dengan melakukan perbaikan sistem pemungutan yang sebelumnya pengguna jasa parkir dipungut retribusinya saat akan meninggalkan lokasi parkir, diubah menjadi pengguna jasa parkir dipungut retribusinya akan saat memasuki area parkir (bayar masuk). Berdasarkan hasil evaluasi, terjadi peningkatan retribusi parkir pada tahun 2023 yaitu dari target Rp 700.000.000,- terealisasi sebesar Rp 832.044.000,- atau terealisasi 118% melampaui target.	Perbaiki penerimaan retribusi parkir di dalam pasar.
26	Pemerintah Kota Bontang melalui kominfo untuk membuat juknis terkait regulasi untuk kerja sama media	Pemerintah Kota Bontang telah menerbitkan Perwali Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman pelaksanaan kerjasama penyebaran informasi publik melalui media massa di lingkungan pemerintah daerah	Untuk mengatur kerjasama penyebaran informasi publik Pemerintah Daerah melalui media massa sehingga tercipta kesamaan pemahaman dalam penyelenggaraan kerja sama dengan Perusahaan Pers di lingkungan Pemerintah Daerah.
27	Pemerintah Kota Bontang melalui kominfo untuk menjaga keamanan dan informasi publik	Pengadaan <i>firewall fortiweb</i> di anggaran perubahan tahun 2022 dan belanja sewa lisensi <i>firewall</i> di tahun 2023 dan seterusnya	Pemenuhan infrastruktur/alat keamanan pada server yang dikelola oleh Diskominfo
28	Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Penanaman Modal untuk segera membuat master plan tentang investasi di kawasan industry.	Dilakukan secara bertahap dengan menyusun dokumen peta peluang investasi di tahun 2024, tahun 2025 akan dilanjutkan dengan pembuatan master plan peluang investasi di kawasan	Memetakan jenis/sektor peluang investasi pada setiap cluster di kawasan peruntukan industri di Bontang Lestari .



No	Uraian Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		peruntukan industri Bontang Lestari.	
29	Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Tenaga Kerja untuk meningkatkan kualitas pencari kerja melalui pelatihan sehingga dapat bersaing dalam mencari kerja	<p>Pada tahun 2023 Dinas Ketenagakerjaan melalui APBD Kota Bontang telah melatih sebanyak 1.254 pencari kerja, sedangkan yang mendapatkan sertifikasi kompetensi sebanyak 650 pencari kerja.</p> <p>Selain itu Dinas Ketenagakerjaan juga melakukan kerjasama dengan BLK baik yang ada didalam maupun diluar Kaltim serta beberapa perusahaan serta beberapa perusahaan yang ada di Kota Bontang sehingga pada tahun 2023 sebanyak 228 pencari kerja yang dilatih dengan menggunakan APBD prov kaltim serta APBN serta dana perusahaan.</p> <p>Dinas ketenagakerjaan juga menghimbau kepada pencari kerja di Kota Bontang untuk meningkat kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan secara mandiri di setiap acara sosialisasi-sosialisasi, sehingga pada tahun 2023 tercatat 130 pencari kerja mengikuti pelatihan secara mandiri pada LPK-LPK yang berada di Kota Bontang.</p>	Kualitas SDM pencari kerja semakin meningkat sehingga dapat bersaing dalam mencari pekerjaan ataupun berwirausaha.
30	Pemerintah Kota Bontang agar dapat meningkatkan status Dinas Tenaga Kerja dari tipe C menjadi tipe B	Peningkatan typologi Dinas Tenaga Kerja dari tipe C menjadi tipe B dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan dengan memperhatikan faktor umum dan faktor teknis.	Pembentukan kelembagaan Pemerintah Daerah



No	Uraian Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
31	Pemerintah Kota Bontang untuk lebih fokus dalam meningkatkan sektor pariwisata dengan menambah destinasi wisata baru untuk mendukung Kota Bontang menjadi kota pariwisata seperti Danau Kanaan dan Pantai Marina ditetapkan sebagai distnasi wisata Kota Bontang	Berdasarkan RPJMD, salah satu hal yang menjadi target untuk mendukung Kota Bontang sebagai Kota Pariwisata adalah dengan penataan objek-objek pariwisata dengan target penambahan 60 objek wisata. Sampai saat ini Pemerintah terus mendorong adanya penambahan objek-objek wisata baru, baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun swasta.	Danau Kanaan sudah ditetapkan ke dalam destinasi wisata Kota Bontang yang tercantum dalam dokumen RIPARDA Kota Bontang. Untuk Pantai Marina tidak ditetapkan sebagai destinasi wisata karena daerah tersebut masuk dalam buffer zone keamanan pabrik PT. Badak NGL yang merupakan zona steril pabrik, perlu dilaksanakan koordinasi lebih lanjut dan adanya kebijakan antara pemerintah Kota Bontang dan PT Badak NGL. Sampai dengan saat ini jumlah ODTW yang ada di Kota Bontang 61 lokasi, upaya untuk meningkatkan Objek wisata baru terus dilaksanakan melibatkan stakeholder terkait.
32	Pemerintah Kota Bontang lebih cermat dalam cara memilih penyedia barang dan jasa	Telah disusun Perwali tentang Kode Etik bagi Personel pada UKPBJ Kota Bontang dan dilakukan monev setiap tahunnya.	Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada Perpres 12/2021 dan telah menggunakan sistem informasi dalam prosesnya.
33	Pemerintah Kota Bontang melalui Inspektorat untuk meningkatkan pengawasan dan supervisi kegiatan pembangunan di Kota Bontang	Inspektorat telah melaksanakan pengawasan dan supervisi di tahun 2023 yang terdiri atas pemeriksaan audit, reuiu, monitoring dan evaluasi. Adapun beberapa pengawasan terkait kegiatan pembangunan, diantaranya: 1) Melakukan probity audit	Inspektorat telah melakukan pengawasan dan supervisi kegiatan Pembangunan dengan melaksanakan Probitity Audit, Reuiu HPS, dan Monitoring paket pekerjaan akhir tahun 2023 serta



No	Uraian Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		<p>pada beberapa paket pembangunan fisik berdasarkan SK Wali Kota Bontang tentang 10 paket proyek strategis</p> <ol style="list-style-type: none">2) Melakukan reviu harga perkiraan sendiri pada 10 paket proyek strategis3) Melakukan monitoring atas paket pekerjaan yang tidak selesai pada tahun anggaran 2023	menyampaikan hasil laporan kepada Perangkat Daerah Terkait
34	Pemerintah Kota Bontang untuk melakukan kajian terkait penyertaan modal di Bank Kaltimtura mengingat dividen yang diterima masih rendah sehingga dibutuhkan penambahan penyertaan modal selanjutnya	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Naskah Akademis Penambahan Penyertaan Modal Kepada Bankaltimtura melalui Kerjasama dengan Tim Peneliti Swasaba Riset Inisiatif pada tahun 2020 untuk rencana pelaksanaan penambahan penyertaan modal tahun 2021-2023.2. Pelaksanaan penambahan penyertaan modal kepada Bankaltimtura baru mulai dilaksanakan pada tahun 2022 dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kota Bontang No. 2 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.3. Pada tahun 2023 dilakukan penambahan penyertaan modal sesuai amanah Perda no. 2 tahun 2022 dengan sebelumnya dilakukan analisis investasi berupa Penilaian Kelayakan Pemenuhan Penyertaan Modal Pemerintah Kota	Dasar hukum penyertaan modal kepada Bank kaltimtura



No	Uraian Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		<p>Bontang kepada Bankaltimtara oleh Penasihat Investasi yang ditunjuk Pemerintah Kota Bontang.</p> <p>4. Berdasarkan Perda nomor 7 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebagai pemenuhan penyertaan modal, pada pelaksanaannya didasari juga oleh Surat Keputusan Wali Kota nomor 100.3.3.3/518/BPKAD/2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023</p>	
35	<p>Pemerintah Kota Bontang agar menaikkan insentif/honor yang semula sebesar Rp.150.000,- menjadi Rp.300.000 bagi Kader Posyandu, Kader Sub KB, Kader Lansia, dan Kader Posbindu.</p>	<p>Pemerintah telah memberikan kenaikan insentif bagi honor kader posyandu, kader sub KB, Kader Lansia dan kader posbindu terhitung mulai 1 Oktober 2023 menjadi Rp 300.000,- berdasarkan Keputusan Walikota Bontang Nomor: 100.3.3.3/378/DSPM/2023 tentang perubahan atas keputusan Walikota Nomor 500 Tahun 2018 tentang pemberian insentif bagi kader pos pelayanan terpadu.</p>	<p>Kenaikan insentif Kader Posyandu, Kader Sub KB</p>



No	Uraian Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
36	Pemerintah Kota Bontang menaikkan gaji Tenaga Kontrak Daerah dan diharapkan tidak dilakukan pemutusan kontrak.	Menganggarkan Kenaikan gaji tenaga kontrak daerah mulai dari APBD perubahan tahun 2023	Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bontang nomor 100.3.3.3/391/BPKAD /2023 tentang standar Gaji Tenaga kontrak Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang, dijelaskan bahwa tertanggal 1 Oktober 2023 standar gaji TKD mengalami kenaikan menyesuaikan dengan kebijakan UMK
37	Dalam rangka penguatan dan mendukung kelangsungan perumda AUJ, maka Pemerintah Kota Bontang segera memerintahkan Pimpinan AUJ melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	Pada Tahun 2022 Direktur Perumda AUJ sebagai pemegang saham atas Anak Perusahaan telah melaksanakan RUPS untuk kembali mengaktifkan 7 (tujuh) anak perusahaan yang mendukung bisnis usaha dari Perumda AUJ. Sehingga Organ Anak Perusahaan telah terbentuk sesuai regulasi	Anak Perusahaan dari Perumda AUJ telah aktif untuk dapat kembali mendukung bisnis usaha
38	Pemerintah Kota Bontang agar memaksimalkan aset daerah melalui perumda dengan pola kerjasama maupun aset yang dipisahkan misalnya:		
	a. Taman kota dan stadion agar dapat dijadikan salah satu sumber pendapatan yang dikelola Perumda	Pembahasan terkait aset Pemerintah Kota Bontang oleh Perumda AUJ, dilaksanakan menyesuaikan dengan regulasi yang mengatur. khususnya terkait tata kelola pengalihan dan kontribusi bagi Pemerintah Daerah	Masih terdapat regulasi yang harus dipenuhi sebagai syarat pengelolaan aset Pemerintah oleh Perumda AUJ
	b. Memaksimalkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan Pulau Beras Basah sebagai sumber	Pemerintah Kota Bontang telah bersurat kepada Gubernur Kalimantan Timur, dimana Pemerintah Kota Bontang meminta untuk dilakukan pelimpahan	Pengembangan Pariwisata khususnya



No	Uraian Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	pendapatan daerah dari sektor pariwisata	kewenangan terkait pengelolaan Pulau Beras Basah.	
	c. Penambahan unit videotron sebagai sumber informasi bagi masyarakat sekaligus sebagai sumber pendapatan daerah	Penambahan videotron oleh Perumda AUJ akan dilakukan sesuai dengan rencana bisnis dan rencana kerja anggaran perusahaan, dengan mempertimbangkan kelayakan bisnis dan kemampuan anggaran dari Perumda AUJ	Perumda AUJ masih berfokus pada pemeliharaan dan pengembangan videotron yang telah terbangun
	d. Penambahan stasiun pengisian Bahan Bakar subsidi terapung untuk nelayan	Untuk pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Pemerintah Kota melakukan fasilitasi untuk terlebih dahulu dapat meningkatkan kuota Bahan Bakar Minyak di Kota Bontang. Sehingga setelah peningkatan kuota, SPBN dapat lebih berkembang sesuai dengan tata kelola perusahaan yang benar	Telah terjadi peningkatan kuota BBM sehingga tahapan selanjutnya akan dilakukan pembahasan untuk pengembangan usaha SPBN
39	Pemerintah Kota Bontang segera menambah rute kapal dari Bontang ke Sulawesi Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saat ini masih dalam proses penyelesaian pembuatan kapal di galangan kapal Kariangau Balikpapan 2. Proses perijinan (Ijin Trayek, Bangunan Kapal, SIUPAL) di Kementerian Perhubungan RI Jakarta 	Bersurat kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Kota Baru di Banjarmasin agar segera pengoperasian kapal dipercepat untuk rute sesuai MoU
40	Pemerintah Kota Bontang agar dapat berkolaborasi dengan perusahaan terkait penggunaan dana TJSL dalam rangka menunjang program Pemerintah Daerah	Kolaborasi Pemerintah Kota Bontang dengan program TJSL sudah berjalan baik. Dan untuk lebih terorganisir, program TJSL akan segera melaksanakan musyawarah daerah (Musda) pertama TJSL Kota Bontang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan ketua dan pengurus Forum TJSL Kota Bontang 2. Penyusunan program kerja



BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

4.1.1 Identifikasi Tugas Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintah Tingkat Daerah Atasnya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, lalu ke pemerintah pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan setelah adanya penugasan pemerintahan melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada daerah (gubernur/bupati/wali kota) atas beban APBN. Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2023 tidak mendapatkan anggaran tugas pembantuan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi.

4.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan di Bawahnya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan sebagai realisasi dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Kota Bontang memiliki 3 Kecamatan dan 15 Kelurahan dan tidak memiliki Desa, sehingga Pemerintah Kota Bontang tidak melaksanakan tugas pembantuan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bahwa Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa.



4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2023 tidak mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi serta tidak melaksanakan tugas pembantuan kepada tingkat pemerintahan dibawahnya.



BAB V

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA DAN PRESTASI/PENGHARGAAN

5.1 Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Pemerintah Kota Bontang sebagai penyelenggara pembangunan daerah menyadari sepenuhnya bahwa diperlukan adanya sinergi dan kerjasama yang baik dengan pihak swasta dan komponen stakeholder lainnya dalam melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu sejak dibetuknya Kota Bontang menjadi daerah otonomi, kerjasama dan sinergi pelaksanaan pembangunan Kota Bontang terus mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Dalam melaksanakan pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sangat diperlukan adanya dukungan dan partisipasi semua pihak karena pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan tanggung jawab bersama. Dalam menjamin agar proses partisipasi tersebut dapat berjalan efektif, pemerintah Kota Bontang telah mengembangkan kerja sama program yang lebih optimal dan efektif untuk secara bersama-sama bersinergi memecahkan permasalahan pembanguna daerah.

Tabel berikut menunjukkan kerjasama antara Pemerintah Kota Bontang dengan pihak ketiga maupun kerjasama dalam bentuk *corporate social responsility* (CSR) tahun 2023 dan kerjasamaa Pemerintah Kota Bontang dengan mitra-mitra kerja, dapat kami sajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Kerjasama Pemerintah Kota Bontang

No.	Mitra Terkait	Bidang/Ruang Lingkup
1	PT. Tower Bersama	Sewa menyewa barang milik daerah untuk pembangunan, penempatan dan pengoperasian menara telekomunikasi
2	Baznas Kota Bontang	Sinergi peningkatan kualitas hidup masyarakat kota bontang
3	Pegadaian	Kerja Sama Kerja Sama Produk Layanan Bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Bontang
4	Komisi Pemilihan Umum	Sosialisasi / Publikasi Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan
5	PT. Pupuk Kaltim	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
6	PT. Badak	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
7	PT. IMM	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
8	PT. KMI	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja



No.	Mitra Terkait	Bidang/Ruang Lingkup
9	PT. KNI	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
10	PT. KPI	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
11	PT. KDM	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
12	PT. KIE	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
13	PT. KNE	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
14	PT. KJS	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
15	PT. YUM	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
16	BLKI Bontang	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
17	LPK Borneo Skill Sinergy	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
18	Lpk Sasana Widya	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
19	LPK Suvi Training	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
20	LPK Global	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
21	LPK Adjie Radja	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
22	LPK BBEC	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
23	LPK Alifcom Institute	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
24	LPK APTEKOM	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
25	LPK Inkubasi Bisnis Permata BUNDA	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
26	LPK Ayulia	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
27	Kaltim Industrial Estate	Pemanfaatan Lahan Milik PT. Kaltim Industrial Estate (Pasar Citra Mas Lok Tuan)
28	PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) UP3 Bontang	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
29	PT. PLN Persero Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara UPPP Bontang	Perjanjian Kerjasama Pemungutan Dan Penyetoran
30	PT. Telekomunikasi Selular	Pemanfaatan Produk Dan Layanan PT. Telekomunikasi Selular
31	Rumah Sakit Islam Bontang	Pembangunan Taman Kesehatan
32	PT. Insan Mitra Teknologi	Kerja Sama Pengembangan Kota Cerdas (Smart City)
33	PT. Pos Indonesia (Persero)	Jasa Layanan PT. Pos Indonesia
34	BPJS Kesehatan	Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
35	BPJS Ketenagakerjaan	Fasilitasi dan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
36	PERTAMINA GAS	Pengelolaan Limbah Air domestik



No.	Mitra Terkait	Bidang/Ruang Lingkup
37	PT. Kaltim Methanol Industri (KMI)	Pengelolaan Limbah Air domestik
38	PT. Kaltim Industrial Estate (KIE)	Pengelolaan Limbah Air domestik
39	PT. Kaltim Daya Mandiri (KDM)	Pengelolaan Limbah Air domestik
40	PT. Kaltim Nitrat Indomesia (KNI)	Pengelolaan Limbah Air domestik
41	Ikatan Ahli Perencanaan	Kerja Sama Penyelenggaraan Penataan Ruang, Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
42	Bank Kaltimtara	Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara Kota Bontang
43	Bank Kaltimtara	Pemanfaatan Kartu ATM / Debit Co-branding Bankaltimtara
44	Bank Kaltimtara	Dashboard PAD
45	Bank Kaltimtara	Retribusi Daerah (Pasar)
46	Bank Kaltimtara	Kerja Sama Bidang Perbankan
47	Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)	Jasa Pendampingan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
48	Rumah Sakit Amalia Bontang	Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kota Bontang
49	PT. Samator Gas Industri	Pengelolaan Limbah Air domestik
50	PT. Laut Bontang Bersinar	Kerja Sama Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Untuk Pelayanan Jasa Kepelabuhan Di Pelabuhan Loktuan Bontang
51	PT. Inti Griya Prima Sakti	Pembangunan Plasa Taman Bontang
52	PT. Selat Mutiara	Kerjasama Pemanfaatan Kawasan Tanah Dan Bangunan Wisma Atlit Bontang
53	PT. Kaltim Parna Industri (KPI)	Pengelolaan Limbah Domestik
54	PT. Kaltim Parna Industri	Pengelolaan Dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota Wana Khatulistiwa
55	BPJS Ketenagakerjaan	Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Di Kota Bontang
56	Provinsi Kalimantan Timur	Kerjasama Pembangunan Daerah
57	Pemkab Kutai Kartanegara	Kerjasama pembangunan daerah
58	Pemkab Kutai Kartanegara - ADDENDUM	Kerjasama pembangunan daerah
59	Pemkab Kutai Timur	Kerjasama pembangunan daerah
60	Pemkot Samarinda	Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan
61	Pemkot Balikpapan	Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan
62	Kab. Barru ; Kab Kotabaru ; Kab Mauju ; Kota Bontang ; Kab Pasangkayu ; Kota Balikpapan	Kesber - Pengembangan Perekonomian Daerah Melalui Pemanfaatan Transportasi Laut Antar Pelabuhan
63	Kab. Barru ; Kab Kotabaru ; Kab Mauju ; Kota Bontang ; Kab Pasangkayu ; Kota Balikpapan	PKS - Pelaksanaan Kerjasama Pengembangan Perekonomian Daerah Melalui Pemanfaatan Transportasi Laut Antar Pelabuhan
64	Kota Balikpapan ; Kota Banjarbaru ; Kota Banjarmasin ; Kota Bontang ; Kota Palangka Raya ; Kota Pontianak ; Kota	Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah



No.	Mitra Terkait	Bidang/Ruang Lingkup
	Samarinda ; Kota Singkawang ; Kota Tarakan	
65	Kementerian PUPR ; Pemprov Kaltim ; Pemkab Kutai Kartanegara	Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang
66	Kejari Kota Bontang	Bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang hukum perdata dan tata usaha negara
67	Kantor Kementerian Agama Kota Bontang	Pelayanan Khusus Kartu Keluarga dan KTP El bagi pasangan pengantin
68	Kantor Kementerian Agama Kota Bontang	Kerja Sama Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Remaja
69	Pengadilan Agama Kota Bontang	Pemanfaatan Teknologi Informasi
70	Pengadilan Agama Kota Bontang	Kerja Sama Pencegahan Perkawinan Usia Anak
71	Kejari Kota Bontang	Bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang hukum perdata dan tata usaha negara
72	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Kota Bontang secara online pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab keuangan negara
73	Badan Informasi Geospasial	Penyelenggaraan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Geospasial Di Kota Bontang
74	Pengadilan Negeri Kota Bontang Kls II	Kerja Sama Pelaksanaan Fungsi Peradilan
75	Lembaga Pemasarakatan Kelas Ila Bontang	Peningkatan Sumber Daya Manusia Warga Binaa
76	Kantor Pertanahan Kota Bontang	Perjanjian kerjasama kegiatan pemetaan, pensertipikatan, fasilitasi penyelesaian permasalahan tanah aset pemerintah dan dukungan pelaksanaan program strategis pertanahan
77	KODIM 0908	Kerja sama pengembangan kota cerdas (<i>smart city</i>)
78	Kepolisian Resort Bontang	Kerja sama pengembangan kota cerdas (<i>smart city</i>)
79	KPKNL Kota Bontang	Penialain aset barang milik daerah dan pertukaran data transaksi tanah
80	Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kaltim	Pengembangan manajemen pemerintah kota bontang
81	Dirjen Pajak ; Dirjen Perimbangan Keuangan	Optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah di kota bontang
82	Kementerian Keuangan	Penempatan lulusan politeknik keuangan negara stan di luar kementerian keuangan
83	Balai BPOM	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu
84	Kanwil Kemenkum dan HAM Kaltim	Fasilitasi Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan Pelayanan Hukum
85	Kantor UKK Keimigrasian	Pembukaan ukk keimigrasian
86	Badan Narkotika Nasional Kota Bontang	Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di wilayah kota bontang



No.	Mitra Terkait	Bidang/Ruang Lingkup
87	Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Penyelenggaraan pilot project penanggulangan dengue dengan metode wolbachia
88	BPIP	Pelaksanaan pembinaan ideologi pancasila
89	Provinsi Kalimantan Timur - Kota Bontang - Kabupaten Kutai Timur dan PT Indominco Mandiri	Pembangunan dan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum regional sistem void indominco (kutai timur-bontang) di provinsi kalimantan timur

Tabel 5.2

Bantuan Perusahaan dalam bentuk Corporate Social Responsibility 2023

No.	Nama Perusahaan	Realisasi Program CSR Tahun 2023
1.	Badak LNG	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Infrastruktur (TPS3R Berebas Tengah, pinjam pakai mobil mitra binaan, bantuan infrastruktur rumah ibadah, sarana pendidikan) ❖ Charity (tanggap bencana, dukungan kegiatan pemerintahan dan masyarakat, mitra TNK, bantuan pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sosial budaya) ❖ Capacity Building (beasiswa BESCA, <i>Cooperative Education Program</i>, pelatihan untuk masyarakat, sertifikasi juru las migas) ❖ Community empowerment (salin swara, saung pandu, pembinaan kampung wisata Kampung Masdarling, Selangan City, UMKM Pesisir, Wisata Berbasis Masyarakat) ❖ Terdapat 5 program bedah pesantren dan 3 bedah rumah bekerjasama dengan YAUMIL Badan LNG ❖ Bantuan CSR Skala Nasional dan Internasional
2.	PT. Pupuk Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pendanaan UMK ❖ Kegiatan Pengembangan UMK ❖ Program Comdev PKT (Guntung ecocultural sport, inovasi olahan kitosan dari limbah cangkang rajungan, konservasi dan diverifikasi mangrove telok bangko, tempat pengelolah sampah terpadu ❖ Kampung digital ❖ Pertanian berkelanjutan dan terpadu ❖ Kilau samudera (konservasi taman laut dan sarana media terumbu karang)
3.	PT. Kaltim Industrial Estate	<ul style="list-style-type: none"> ❖ KIE peduli bumi dalam rangka World Ozon Day ❖ KIE peduli ibu hamil dan anak ❖ Penanaman mangrove dan transplantasi terumbu karang ❖ Sosialisasi pemadam kebakaran untuk masyarakat buffer zone ❖ Program pinjam pakai lahan KIE



No.	Nama Perusahaan	Realisasi Program CSR Tahun 2023
4.	PT. Kaltim Parna Industri	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Peduli kesehatan (program germas, gerakan cegah stunting (gegas), bantuan penanggulangan covid 19) ❖ Peduli pendidikan (pembinaan sekolah berwawasan lingkungan, <i>germas go to school</i>, pekan ilmiah remaja Bontang, pembinaan sekolah sehat, kunjungan industri, <i>program community development</i> PT. KPI) ❖ Peduli lingkungan (kampung minim sampah (kamis), hutan wana khatulistiwa, sekolah berwawasan lingkungan, penanaman pohon, penanganan bencana banjir, kemitraan dengan TNK) ❖ Sosial kemasyarakatan ekonomi (pembinaan UMKM, program pengelolaan kompos, bantuan untuk masyarakat, perayaan HUT RI bersama warga, pengembangan pariwisata, bantuan tas untuk bansos)
5.	PT. Kaltim Methanol Industri	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bank sampah buncis unik (bank sampah dan urban farming-verticulture) ❖ Sanggul Ibu ❖ KMI Peduli (bantuan oksigen, bantuan sembako, bantuan alat medis) ❖ Raja Ruri dan bedah rumah (pekarangan hijau rumahku asri) ❖ Keanekaragaman hayati (taman methanol dan penanaman mangrove) ❖ Program UMKM, Kampung Inggris, stunting, kebencanaan, proklamasi dan kesehatan gigi dan mulut
6.	PT. Indominco Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> ❖ SPAM Regional Sistem Void IMM ❖ Komitmen kerjasama terkait program peningkatan minat baca di Kota Bontang (stand pameran BOMBALIGA MoU Program Peningkatan minat baca di Kota Bontang) ❖ Pembangunan gapura taman literasi ❖ Pilot project perusahaan bersih narkoba (bersinar) ❖ Program pendidikan (beasiswa unggulan desa) ❖ CSR Program Kesehatan (peningkatan pelayanan kesehatan area pesisir) ❖ CSR Program Sosial (dukungan ketahanan pangan dan bantuan sosial) ❖ Program infrastruktur (jalan lingkar tambang) ❖ Program lingkungan (pengelolaan sampah) ❖ Program pendapatan riil (panen rumput laut kelompok nelayan dan pengembangan pertanian padi)
7.	PT. Pamapersada Nusantara	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Program peningkatan dan pengembangan ekonomi masyarakat ❖ Program sosial, budaya dan agama. ❖ Program pendidikan, peningkatan keterampilan dan kursus

No.	Nama Perusahaan	Realisasi Program CSR Tahun 2023
		<ul style="list-style-type: none">❖ Program lingkungan.❖ Program kesehatan dan gizi masyarakat
8.	PT. Kaltim Nitrate Indonesia	<ul style="list-style-type: none">❖ Program perlindungan anak melalui pengembangan rumah kreatif anak - Mahira (Rumah ibadah ramah anak)❖ Perahu kertas (perlindungan, pemenuhan dan kreativitas anak penyandang disabilitas)❖ Hunting De Sun (Pencegahan stunting dengan scaling up nutrition)❖ Program bidang lingkungan (laskar taman nasional kutai)
9	Bankaltimtara	<ul style="list-style-type: none">❖ Bantuan dump truk pengelolaan sampah ke dinas lingkungan hidup❖ Edukasi para pelaku usaha UMKM, Bentor bontang kuala dan RT se Kota Bontang terkait literasi keuangan dan pengelolanya❖ Kegiatan pasar rawah indah siap qris menuju era digitalisasi dan kegiatan sosialisasi bagi seluruh sekolah di kota Bontang

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Bontang tahun 2023

5.2 Penghargaan/Prestasi Kota Bontang Tahun 2023

Pada tahun 2023 Kota Bontang memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan baik skala nasional maupun regional. Prestasi dan penghargaan yang diperoleh antara lain, sebagai berikut:

1. Penghargaan Panji Keberhasilan Bidang Pembangunan Pemprov Kaltim

Penghargaan diserahkan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik kepada Wali kota Bontang Basri Rase yang disaksikan Bupati dan Walikota Se Kaltim serta para undangan lainnya. Torehan prestasi yang diraih Pemerintah Kota Bontang antara lain Panji Keberhasilan Bidang Hilirasasi Peternakan, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Masyarakat, Bidang Penanganan Anak Disabilitas, Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Kategori Kota.



2. Penghargaan APBD Award 2023 dari Kementerian Dalam Negeri

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Asisten II Pemkot Bontang Lukman di Jakarta. Kota Bontang meraih penghargaan peringkat III kategori Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi Tahun Anggaran 2022



4. Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2023 dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia.

Diterima oleh Asisten II Pemkot Bontang Lukman di Jakarta. Penghargaan bertajuk UHC Award tersebut diberikan menyusul Kota Bontang dinilai telah melakukan berbagai upaya optimal sehingga lebih dari 95% penduduknya telah terjamin pembiayaan kesehatannya melalui skema Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).



5. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 dari BPK Kaltim

Pemerintah Kota Bontang kembali menyabet Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Wakil Wali Kota Bontang yang turut didampingi oleh Ketua DPRD Bontang. Diketahui penghargaan tersebut kali ke-10 yang diterima oleh Pemkot Bontang.



6. Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Kategori Nindya Tahun 2023

Pemerintah Kota Bontang berhasil meraih penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) kategori Nindya Tahun 2023. Penghargaan itu disematkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Puspayoga kepada Pemerintah Kota Bontang yang diwakili oleh Wakil Walikota Bontang.





7. Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2023

Wali Kota Bontang menerima Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra Tahun 2023 Untuk Pemerintah Kota Bontang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penghargaan itu diraih berkat komitmen Eksekutif dalam mendukung pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dukungan berupa dukungan anggaran, pengawasan pelaksanaan pembangunan dan penerbitan produk-produk hukum daerah. Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Bontang mendapatkan penghargaan untuk tiga kategori, yaitu Kategori Kepala Daerah Kota Kecil, Kategori Pemerintah Daerah Kota Kecil dan Katergori DPRD



8. Penghargaan Merdeka Award Tahun 2023

Kota Bontang, Kalimantan Timur berhasil mendapatkan penghargaan Merdeka Awards 2023 pada kategori program inovatif pendampingan UMKM. Penghargaan tersebut didapat karena inovasi-inovasi yang diberikan pemerintahan Kota Bontang untuk masyarakat.



9. Penghargaan Proklim (Program Kampung Iklim) Tahun 2023

Wali Kota Bontang menerima penghargaan Piagam Apresiasi Pembina Program Kampung Iklim (Proklim) Tahun 2023. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya, di Auditorium DR. Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti KLHK Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta.





10. Penghargaan Multy Award (Mulawarman University Award) Tahun 2023

Multy Award yang merupakan singkatan dari Mulawarman University Award. Kegiatan ini didasarkan bahwa selama ini Unmul banyak mendapat dukungan atau bantuan dari kabupaten/kota yang ada di Kaltim, baik itu kerja sama-kerja sama di bidang pendidikan mahasiswa dan sebagainya juga berbagai kegiatan lainnya. Pada acara Multy Award Unmul 2023, Pemerintah Kota Bontang meraih 2 kategori *Winner – Cum Laude Award* yaitu *Very Good Region in a Featured Program on Health Sevices* dalam program unggulan Sepat Apung, serta *Very Good Region in a Featured Program in Administrative Services* pada program unggulan Kapal Si Geo.



11. Penghargaan Kota Peduli HAM Tahun 2023

Pemberian penghargaan Kota Peduli HAM yang diserahkan kepada Bontang itu berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kalimantan Timur Jalan Gajah Mada No 2 Kota Samarinda. Penyerahan penghargaan diserahkan langsung oleh Pj Gubernur Kaltim yang diwakili oleh Sekda Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni, didampingi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Kalimantan Timur Dr Gun Gun Gunawan. Kegiatan ini merupakan rangkaian Peringatan Hak Asasi Manusia Ke-75 Tahun 2023 dengan mengambil tema “Harmoni dalam Keberagaman (*Harmony in Diversity*)”.



12. Penghargaan Anugerah Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023 dari Ombudsman Republik Indonesia

Penilaian kepatuhan merupakan bentuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI, yang bertujuan untuk mendorong pencegahan maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penilaian kepatuhan juga menjadi tolok ukur terhadap evaluasi dan penguatan pengawasan internal melalui atasan langsung. Penilaian tersebut juga dilakukan terhadap pejabat dan unit pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang dengan nilai 88.23 (Zona Hijau) termasuk Kategori A (Kualitas Tertinggi).



13. Penghargaan ADIPURA KENCANA Tahun 2023 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia

Kota Bontang kembali menunjukkan prestasinya di bidang lingkungan dan kebersihan. Penghargaan Adipura Kencana disematkan lagi kepada Kota Bontang, sehingga Bontang meraih Piala Adipura Kencana secara berturut-turut pada tahun 2022 dan 2023. Penghargaan Anugerah Adipura Kencana diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Soebroto Jakarta Pusat.





BAB VI PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2023 yang disusun sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2023. Dari penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat dari capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan pemecahan masalahnya. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2023 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintah tahun sebelumnya.

Selain melalui pelaksanaan program dan kegiatan, masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun anggaran 2023 yang disampaikan oleh Wali Kota Bontang kepada DPRD Kota Bontang secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Tahun 2023.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun 2023 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen pemerintah daerah yaitu jajaran eksekutif baik di tingkat Kota, kecamatan maupun kelurahan, serta legislatif (DPRD) dan masyarakat Kota Bontang pada umumnya. Pemerintah Kota Bontang memberikan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada seluruh komponen kepentingan dan masyarakat Kota Bontang yang mendukung situasi dan kondisi sehingga tetap terjaga kondusif dan penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini, Pemerintah Kota Bontang membuka selebar-lebarnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna penyelenggaraan pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian penyampaian LKPJ Kota Bontang Tahun 2023 ini, diiringi harapannya semoga di tahun-tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Kota Bontang. Semoga Allah memberkati kita semua.